

# Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat



Valentina Y. D. Utari

Asep Kurniawan

Dedy Hermansyah

**LAPORAN LAPANGAN SMERU**

**Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar  
di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Valentina Y. D. Utari

Asep Kurniawan

Dedy Hermansyah

**Editor**

Wiwin Purbaningrum

**The SMERU Research Institute**

**Januari 2020**

# Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penulis: Valentina Y.D. Utari, Asep Kurniawan, Dedy Hermansyah

Editor: Wiwin Purbaningrum  
Foto Sampul: Dok. SMERU

Data Katalog-dalam-Terbitan The SMERU Research Institute

Valentina Y. D. Utari

Laporan lapangan SMERU: Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Dompu - Provinsi Nusa Tenggara Barat./ Ditulis oleh Valentina Y. D. Utari, Asep Kurniawan, Dedy Hermansyah.

lv; 75 hlm.; 29 cm.

ISBN 978-602-7901-53-7 (PDF)

ISBN 978-623-7492-15-3

1. Pendidikan      2. Kabupaten Dompu  
I. Judul

370.7 –ddc 23

Diterbitkan Oleh:  
The SMERU Research Institute  
Jl. Cikini Raya No.10A  
Jakarta 10330  
Indonesia

Cetakan pertama, Januari 2019



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, mohon hubungi kami di nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id); atau kunjungi situs web [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).

# TIM PENELITIAN

## **Peneliti SMERU**

Valentina Y. D. Utari

Asep Kurniawan

## **Peneliti Lapangan**

Dedy Hermansyah

Lina Rozana

## UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini dapat diselesaikan berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh tim Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia, atau The Innovation for Indonesia's School Children (INOVASI) yang telah memfasilitasi dan memberi arahan teknis selama pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, khususnya bupati, sekretaris daerah, kepala badan/dinas di bidang pendidikan beserta stafnya, yang telah memperlancar dan memberikan informasi berharga sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada para informan kunci di bidang pendidikan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa atas informasinya yang berharga. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid yang telah bersedia meluangkan waktu mereka untuk diwawancarai. Terakhir, kami berterima kasih kepada para peneliti di Kabupaten Dompu dan peneliti tamu yang telah membantu tim peneliti SMERU dalam melakukan wawancara dan diskusi kelompok terfokus untuk mengumpulkan informasi di lapangan.

## Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Valentina Y.D. Utari, Asep Kurniawan, dan Dedy Hermansyah

Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) dan The SMERU Research Institute (SMERU) melakukan studi diagnostik terhadap sistem pendidikan dasar di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi capaian pembelajaran murid di tingkat pendidikan dasar. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini melakukan pemetaan terhadap pemangku kepentingan di bidang pendidikan, analisis ekonomi politik tentang permasalahan pendidikan, dan pemetaan terhadap kebijakan atau inovasi pendidikan di Kabupaten Dompu. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yakni wawancara mendalam, wawancara kelompok, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan kajian singkat dokumen. Temuan lapangan SMERU menunjukkan bahwa capaian pembelajaran murid di tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Dompu berkaitan erat dengan rendahnya kualitas guru, minimnya sarana belajar mengajar, dan rendahnya motivasi murid untuk belajar di rumah. Berbagai kelompok pemangku kepentingan memperlihatkan potensi untuk berkontribusi dan kemauan yang tinggi untuk meningkatkan capaian pembelajaran murid. Akan tetapi, para pemangku kepentingan belum melakukan komunikasi secara rutin untuk secara khusus mendiskusikan dan mencari pemecahan masalah terkait pembelajaran murid. Meskipun demikian, SMERU menemukan bahwa beberapa pemangku kepentingan telah secara aktif menciptakan berbagai inovasi di tingkat sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung dijalankan untuk meningkatkan capaian pembelajaran murid.

Kata kunci: pendidikan dasar, inovasi pendidikan, kemampuan calistung, Dompu, kebijakan pendidikan

# DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	v
I. PENDAHULUAN	1
II. ANALISIS EKONOMI POLITIK TENTANG PERMASALAHAN PENDIDIKAN DASAR	2
2.1 Permasalahan Pendidikan	2
2.2 Komunikasi Antarpemangku Kepentingan	5
III. ANALISIS INOVASI DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN	7
IV. PEMANGKU KEPENTINGAN PENDIDIKAN: KEPEDULIAN DAN PENGARUH	10
4.1 Potensi untuk Berkontribusi dan Kemauan untuk Terlibat dalam Peningkatan Hasil Pembelajaran Murid	10
4.2 Pengaruh Aktual dan Potensi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pembelajaran	14
DAFTAR ACUAN	16
LAMPIRAN	17

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Isu-Isu Utama bagi Pemangku Kepentingan	18
Lampiran 2	Metode Komunikasi Pemangku Kepentingan	39
Lampiran 3	Tabel A1. Daftar Mitra Potensial	45
Lampiran 4	Tabel A2. Matriks Nilai Pemangku Kepentingan	47
Lampiran 5	Gambar A1. Peta Pemangku Kepentingan 1	52
Lampiran 6	Gambar A3. Analisis Jejaring Pemangku Kepentingan	54
Lampiran 7	Tabel A3. Matriks Metode Komunikasi Pemangku Kepentingan	56
Lampiran 8	Gambar A5. Analisis Pohon Masalah	65
Lampiran 9	Tabel A4. Analisis Penyelesaian Masalah Pendidikan	66
Lampiran 10	Tabel A5. Daftar Inovasi Pendidikan	67
Lampiran 11	Tabel A6. Daftar Data Sekunder Kabupaten Dompu	69
Lampiran 12	Tabel A7. Diagram Proses Pemetaan Pemangku Kepentingan dalam Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat	71

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

APK	angka partisipasi kasar
APM	angka partisipasi murni
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
calistung	membaca, menulis, dan berhitung
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade
Dinas Dikpora	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
DPAP-SKPD	Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	diskusi kelompok terfokus ( <i>focus group discussion</i> )
GTT	guru tidak tetap
INOVASI	The Innovation for Indonesia's School Children (Inovasi untuk Anak Indonesia)
IPA	Ilmu Pengetahuan Alam
IPS	Ilmu Pengetahuan Sosial
kabid dikdas	kepala bidang pendidikan dasar
kabid dikmen	kepala bidang pendidikan menengah
K-13	Kurikulum 2013
K3S	kelompok kerja kepala sekolah
KBM	kegiatan belajar mengajar
KCD	kepala cabang dinas
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KKG	kelompok kerja guru
KTSP	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LPM	lembaga pemberdayaan masyarakat
LPTK	lembaga pendidikan tenaga kependidikan
LSM	lembaga swadaya masyarakat
MBS	manajemen berbasis sekolah
MGMP	musyawarah guru mata pelajaran
MKKS	musyawarah kerja kepala sekolah
musdes	musyawarah desa
musrenbang	musyawarah perencanaan pembangunan
musrenbangdes	musyawarah perencanaan pembangunan desa
PAI	Pendidikan Agama Islam
pemda	pemerintah daerah

Penjaskes perda	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan peraturan daerah
PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia
PNPM Mandiri Perdesaan GSC	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Generasi Sehat Cerdas
PNS	pegawai negeri sipil
PPKN	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
PR	pekerjaan rumah
RPJMD	rencana pembangunan jangka menengah daerah
SATAP	satu atap
SBK	Seni, Budaya, dan Keterampilan
SD	sekolah dasar
SKPD	satuan kerja perangkat daerah
SMA	sekolah menengah atas
SMK	sekolah menengah kejuruan
SMP	sekolah menengah pertama
SPPD	surat perintah perjalanan dinas
STM	sekolah teknik menengah
surel	surat elektronik
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
UPTD	unit pelaksana teknis dinas

# I. PENDAHULUAN

Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia, atau The Innovation for Indonesia's School Children (INOVASI), adalah program kerja sama antara Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Program INOVASI merupakan program berjangka waktu empat tahun yang dirancang bersama dengan Pemerintah Indonesia dan memberikan dukungan bagi pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam konteks Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, INOVASI melakukan penelitian untuk memperoleh bukti mengenai hal-hal apa saja yang berhasil meningkatkan capaian pembelajaran murid di tingkat pendidikan dasar dan situasi/lingkungan seperti apa yang membuat hal-hal tersebut berhasil dilakukan.

Selain itu, INOVASI akan memfasilitasi pemanfaatan bukti-bukti yang diperoleh tersebut oleh Pemerintah Indonesia supaya Pemerintah Indonesia dapat menghasilkan kebijakan pendidikan yang bermanfaat dan memperbaiki praktik-praktik pembelajaran. INOVASI hendak menerapkan dan mengevaluasi program penelitian, inovasi, dan pembelajaran yang bertumpu pada tiga aspek, yakni (i) pengajaran di dalam kelas yang berkualitas, (ii) dukungan yang berkualitas untuk menghasilkan pengajaran di dalam kelas yang berkualitas, dan (iii) kepastian bahwa semua anak-anak dapat belajar.

Sebagai bagian dari pelaksanaan program, INOVASI bekerja sama dengan The SMERU Research Institute dalam melakukan penelitian diagnostik terhadap sistem pendidikan di tingkat daerah. Kegiatan penelitian diagnostik ini mencakup (i) pemetaan pemangku kepentingan di bidang pendidikan, (ii) analisis ekonomi politik tentang permasalahan pendidikan, dan (iii) pemetaan kebijakan atau inovasi pendidikan di daerah. Penelitian dilaksanakan di enam kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Keenam kabupaten tersebut adalah Bima, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Laporan ini memaparkan hasil penelitian diagnostik yang dilakukan di Kabupaten Dompu.

Pengumpulan data dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini dilakukan melalui (i) wawancara mendalam; (ii) wawancara kelompok; (iii) diskusi kelompok terfokus, atau *focus group discussion* (FGD); dan (iv) kajian singkat dokumen. Para informan meliputi pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, kecamatan, sekolah, dan desa. INOVASI melakukan penetapan kriteria sekolah dan akhirnya diperoleh dua sekolah dasar (SD) dan dua sekolah menengah pertama (SMP) sebagai sekolah sampel yang dikunjungi oleh tim peneliti. SMERU melakukan penetapan kriteria informan kunci. Tim peneliti yang terdiri atas empat peneliti kualitatif melakukan pengumpulan data di Kabupaten Dompu pada 7–20 Agustus 2016. Jumlah wawancara mendalam adalah 16 di tingkat kabupaten, 4 di tingkat kecamatan, 8 di tingkat sekolah, dan 2 di tingkat desa. Jumlah wawancara kelompok di tingkat sekolah adalah 16, yakni 4 wawancara kelompok guru, 4 wawancara kelompok orang tua murid, 4 wawancara kelompok murid perempuan, dan 4 wawancara kelompok murid laki-laki. FGD dilakukan satu kali dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan sekolah.

## II. ANALISIS EKONOMI POLITIK TENTANG PERMASALAHAN PENDIDIKAN DASAR

### 2.1 Permasalahan Pendidikan

Dari sisi ketersediaan sarana sekolah, seperti ruang kelas dan rasio murid per kelas, akses anak usia SD di Kabupaten Dompu untuk mengenyam pendidikan dasar<sup>1</sup> tidak lagi menjadi masalah besar. Untuk tingkat SD, misalnya, rasio jumlah murid per ruang kelas adalah 22:1 (Dinas Dikpora, 2015: 74) yang menunjukkan bahwa kapasitas kelas yang tersedia sudah melebihi standar nasional. Hal ini diperkuat dengan angka partisipasi murni (APM) tingkat SD yang sudah hampir mencapai 100%. Di sisi lain, APM di tingkat SMP masih berada pada kisaran 82%. Namun, masalahnya tidak terletak pada ketersediaan ruang kelas mengingat rasio jumlah murid per ruang kelas di tingkat SMP adalah 24:1 (Dinas Dikpora, 2015: 74) yang menunjukkan kapasitas yang cukup jika merujuk pada standar nasional, yaitu maksimal 36 murid per kelas.

Selain itu, jumlah tenaga pengajar pendidikan dasar di Kabupaten Dompu dapat dikatakan lebih dari cukup. Hal ini terlihat dari rasio jumlah murid per guru di tingkat SD yang mencapai 8:1. Besarnya jumlah guru disebabkan oleh banyaknya pengangkatan guru tidak tetap (GTT) yang dilakukan oleh sekolah. Lebih dari separuh guru yang ada di Kabupaten Dompu adalah GTT. Di salah satu SD sampel, misalnya, setiap kelas diampu oleh satu guru PNS yang didampingi tiga hingga empat GTT.

Guru menjadi pekerjaan yang banyak dipilih para lulusan perguruan tinggi. Minimnya lapangan pekerjaan di bidang lain merupakan salah satu pertimbangan lulusan perguruan tinggi menjadi guru. Tidak masalah jika mereka harus melalui masa bekerja sebagai GTT karena GTT dipandang sebagai langkah awal untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Status PNS masih memiliki prestise tinggi pada sebagian masyarakat Dompu. Hal ini didorong oleh masih kuatnya anggapan bahwa seseorang baru bisa dikatakan sudah bekerja jika menjadi PNS.

Para informan kunci menyampaikan bahwa salah satu permasalahan pendidikan di Kabupaten Dompu adalah **kualitas guru yang masih rendah**. Berlimpahnya jumlah guru di Kabupaten Dompu ternyata tidak berbanding lurus dengan kualitas para guru. Rendahnya kualitas guru dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kreativitas guru, lemahnya kemauan guru untuk belajar, dan ketaksesuaian latar belakang pendidikan guru dengan pekerjaan. Faktor eksternal mencakup tidak meratanya distribusi guru, kurang aktifnya kelompok kerja guru (KKG)/musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), serta terbatasnya jumlah dan jenis pelatihan bagi guru.

Rendahnya kualitas guru dapat diukur dari rendahnya kreativitas guru dalam mengajar. Banyak guru dinilai hanya mengajar untuk memenuhi tugas dan kewajibannya; mereka hanya mengandalkan buku pegangan guru tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik para murid. Lemahnya kemauan guru untuk belajar menjadi masalah kunci. Wadah pengembangan profesi seperti KKG dan MGMP—yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh para guru untuk bertukar ilmu dan pengalaman—kurang aktif. Situasi ini diperparah dengan tidak adanya upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan guru, baik atas inisiatif sendiri maupun melalui fasilitasi pemerintah kabupaten.

<sup>1</sup>Koordinasi SD dan SMP reguler berada pada dua bidang yang berbeda. Subbidang pendidikan dasar bertanggung jawab atas PAUD, TK, dan SD, sementara subbidang pendidikan menengah bertanggung jawab atas SMP dan SMA/K.

Selain itu, beberapa informan menjelaskan bahwa rendahnya kualitas guru juga disebabkan oleh ketaksesuaian antara latar belakang pendidikan guru dan mata pelajaran yang diampunya. Banyak pula guru yang bukan sarjana pendidikan. Akibatnya, ada saja guru yang tidak menguasai metode pembelajaran, bahkan tidak menguasai bahan ajar. Selain itu, informan lain juga menjelaskan bahwa banyak guru berasal dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang kualitasnya rendah. Akibatnya, kualitas lulusan LPTK tersebut turut dinilai rendah. Pada salah satu wawancara kelompok guru, seorang guru mengeluhkan tentang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dinas Dikpora) Kabupaten Dompu yang menolak ijazah sarjana yang diajukan oleh guru tersebut untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi guru.

Tidak terfasilitasinya peningkatan kapasitas guru, meskipun guru-guru telah memiliki kemauan kuat untuk meningkatkan kapasitas mereka, dipengaruhi oleh banyak hal termasuk peran lembaga pemerintah yang berwenang membuat kebijakan pendidikan, pengawas sekolah, dan kepala sekolah. Distribusi guru yang tidak merata dipandang sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kualitas guru dalam mengajar yang pada akhirnya memengaruhi capaian kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) para murid. Rasio murid per guru di Kabupaten Dompu memang menunjukkan bahwa jumlah guru di Kabupaten Dompu telah melebihi kebutuhan. Namun, para informan kunci di tingkat kabupaten menyampaikan bahwa ketimpangan distribusi guru antarsekolah dan antarmata pelajaran masih terjadi. Atas kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Dompu berencana membuat kebijakan pemerataan guru dengan menggunakan sistem perjanjian penempatan kerja.

Guru-guru yang berkualitas dan sudah berstatus PNS lebih banyak dijumpai di sekolah-sekolah yang berada di wilayah perkotaan, seperti Kecamatan Dompu, Kecamatan Woja, dan Kecamatan Pajo. Walaupun demikian, beberapa informan kunci menyampaikan bahwa sesungguhnya rendahnya kualitas guru terjadi baik di wilayah pinggiran maupun perkotaan. Ketua Dewan Pendidikan dan salah satu kepala cabang dinas (KCD) menyebutkan bahwa guru-guru enggan ditempatkan di sekolah-sekolah di pinggiran kota atau perdesaan karena (i) bertugas di sekolah-sekolah di perkotaan yang rata-rata berlabel sekolah favorit menyematkan gengsi tersendiri bagi guru, (ii) jarak dari rumah para guru ke sekolah-sekolah di wilayah pinggiran jauh, dan (iii) fasilitas-fasilitas di sekolah di wilayah pinggiran masih belum lengkap. Faktor kedekatan politis para guru dengan kalangan pembuat kebijakan pun dipandang berperan dalam distribusi guru.

Salah seorang pengawas sekolah mengatakan bahwa kepala sekolah belum melibatkan guru dalam pengelolaan sekolah sebagaimana dipesankan dalam konsep manajemen berbasis sekolah (MBS). Akibat minimnya keterlibatan guru, kegiatan-kegiatan KKG/MGMP luput dari alokasi penggunaan dana BOS sehingga tidak banyak KKG/MGMP yang aktif. Selain itu, beberapa informan menilai bahwa pengawas sekolah belum optimal dalam menjalankan tugas supervisinya kepada guru. Para guru di salah satu SD, misalnya, mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mendapat supervisi dari pengawas pembina sekolahnya. Alih-alih melakukan supervisi akademik dengan guru, pengawas sekolah datang ke sekolah hanya untuk memenuhi kewajibannya. Menurut seorang guru, pengawas sekolah datang ke sekolah hanya untuk menandatangani surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Sementara itu, para pengawas sekolah menilai bahwa hasil supervisi mereka tidak dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan. Mutasi guru, misalnya, tidak didasari penilaian yang dihasilkan oleh para pengawas sekolah. Sekali lagi, faktor kedekatan politislah yang lebih mendominasi dalam penentuan kebijakan terhadap guru dan kepala sekolah.

Di pihak lain, pembuat kebijakan di pemerintah daerah (pemda) tidak merencanakan program yang memadai untuk guru. Dengan kata lain, pelatihan untuk peningkatan kapasitas guru sangat terbatas. Para guru dari keempat sekolah yang dikunjungi tim peneliti mengonfirmasi tidak adanya kegiatan pelatihan dari pemerintah kabupaten dalam lima hingga enam tahun terakhir. Pelatihan

yang mereka ikuti biasanya adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah provinsi; itu pun untuk kepentingan implementasi kurikulum baru. Ironisnya, salah satu visi bupati adalah pendidikan yang berkualitas. Namun, sampai menginjak periode kedua jabatannya, implementasi visi tersebut tidak ditemukan dalam program dan kegiatan pemda, baik yang tertulis dalam dokumen<sup>2</sup> maupun yang dirasakan oleh para pelaku pendidikan.

**Minimnya sarana belajar yang membatasi upaya guru mengajar** juga menjadi permasalahan pendidikan di Kabupaten Dompu. Tidak semua guru berkualitas rendah atau kurang menguasai metode pembelajaran. Para guru di sekolah-sekolah sampel menyatakan bahwa mereka tetap berupaya maksimal menjalankan pembelajaran. Namun, para guru terbentur oleh kurangnya sarana belajar, seperti buku dan alat peraga. Guru-guru terpaksa memfotokopi buku paket pegangan guru karena ketersediaan buku yang terbatas. Setidaknya dua sekolah sampel sangat kekurangan buku pegangan murid. Ketiadaan buku paket untuk murid membuat para guru terpaksa menggunakan metode mendikte materi dari buku pegangannya untuk disalin oleh murid.

Kalaupun memiliki buku pegangan murid dan buku pegangan guru, pihak sekolah menyatakan bahwa buku pelajaran murid yang diterima oleh sekolah sejauh ini adalah buku untuk pelaksanaan Kurikulum 2013 (K-13). Tentu saja ini tidak cocok dengan kebutuhan sekolah yang masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Selain itu, setiap tahun sekolah-sekolah sampel menerima bantuan alat peraga yang sama. Salah seorang guru di sekolah mengatakan, “Kami sudah kelebihan alat peraga globe dan peta karena beberapa tahun ini menerima barang yang sama. Padahal, kekurangan kami adalah alat peraga untuk pelajaran IPA.” Menyikapi keterbatasan tersebut, beberapa guru di sekolah-sekolah sampel mengatakan bahwa mereka tetap menggunakan sarana yang ada sebagai bahan penugasan bagi murid. Buku-buku K-13, misalnya, tetap dipinjamkan kepada murid untuk dibawa pulang sebagai bahan pekerjaan rumah (PR). Menurut para guru, materi dalam buku-buku K-13 tetap bisa digunakan sebagai bahan bacaan murid.

Permasalahan pendidikan lainnya di Kabupaten Dompu adalah **rendahnya motivasi murid untuk belajar di rumah**. Guru-guru dari keempat sekolah sampel menyatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya hasil belajar murid adalah motivasi belajar murid yang rendah. PR tidak menjadi sarana bagi murid untuk mengasah kemampuannya. Hal ini tecermin dari pengakuan para guru bahwa jawaban murid atas PR yang mereka berikan hampir selalu sama semua. Para guru menyimpulkan bahwa PR hanya dikerjakan oleh satu atau dua murid, sedangkan murid-murid lain menyontek isian PR tersebut.

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa rendahnya motivasi murid untuk belajar juga sangat dipengaruhi oleh profesionalisme guru. Profesionalisme guru yang rendah membuat guru kurang berusaha untuk memberikan murid pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Para murid mengungkapkan bahwa mereka kehilangan semangat belajar ketika guru selalu menyuruh mereka menyalin catatan yang ada di papan tulis. Padahal, secara jelas para murid menyampaikan bahwa mereka lebih menyukai guru yang (i) mau menjelaskan materi pelajaran berulang-ulang sampai semua murid mengerti, (ii) memberi kesempatan murid untuk bertanya, dan (iii) menyelingi pelajaran dengan humor.<sup>3</sup> Seorang peserta wawancara kelompok murid menyampaikan, “Salah satu murid diminta untuk menulis pelajaran dari buku ke papan tulis,

---

<sup>2</sup>Dokumen-dokumen dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak yang ditelusuri oleh tim peneliti mencakup dokumen statistik Dinas Dikpora, rencana kerja tahunan Dinas Dikpora, realisasi anggaran pendidikan Kabupaten Dompu, laporan hasil ujian murid SD dan SMP, rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), profil pendidikan Kabupaten Dompu, dan dokumen pelaksana anggaran perubahan satuan kerja perangkat daerah (DPAP-SKPD).

<sup>3</sup>Lihat Lampiran 1 untuk respons lengkap murid.

lalu murid yang lain menyalin di buku catatan masing-masing. Gurunya sendiri keluar kelas. Merokok.”

Hal lain yang menyebabkan rendahnya motivasi murid dalam belajar adalah lingkungan yang kurang mendukung, seperti kurangnya kepedulian orang tua. Para guru menyampaikan bahwa kemauan orang tua untuk mengawasi dan menemani anak ketika belajar di rumah sangat kurang. Kepala sekolah dan kepala desa mengungkapkan bahwa di wilayah perdesaan masih lazim orang tua mengajak anak-anak mereka untuk ikut bekerja di ladang ketika musim tanam dan panen tiba. Akibatnya, anak-anak pun bolos sekolah hingga beberapa hari.

Dalam menyikapi masalah ini, kepala sekolah dan guru di keempat sekolah yang dikunjungi memiliki kepedulian yang tinggi. Mereka secara proaktif mendatangi rumah orang tua tersebut. “Kalau ada murid lebih dari dua hari tidak masuk sekolah, pasti kami datang rumah orang tuanya,” kata salah satu kepala SD sampel. Saat berkunjung ke rumah orang tua, kepala sekolah salah satu SD sampel tidak sekedar mengingatkan orang tua, tetapi juga meminta mereka menandatangani perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Namun, hingga saat ini perjanjian tersebut belum menunjukkan keefektifannya karena orang tua kembali mengajak anak mereka bekerja pada musim tanam atau musim panen berikutnya.

Kepala sekolah dan guru-guru SD sampel yang lain memiliki hubungan yang cukup baik dengan pemerintah desa setempat, termasuk dalam hal memastikan murid-murid SD tersebut rajin bersekolah. Guru-guru sering melapor kepada kepala desa jika ada murid dari desa tersebut yang tidak masuk sekolah karena diminta untuk bekerja di ladang oleh orang tuanya. Selain itu, salah satu guru berperan aktif di desa sebagai ketua lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Dengan pelibatan guru tersebut, pesan-pesan mengenai pentingnya pendidikan selalu diselipkan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan desa.

## 2.2 Komunikasi Antarpemangku Kepentingan

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran murid, para pelaku pendidikan di Kabupaten Dompu masih lebih banyak menggunakan cara-cara konvensional, seperti tatap muka melalui rapat, kunjungan atau pertemuan informal, dan surat pemberitahuan atau undangan. Sebagian besar komunikasi antarpelaku pendidikan dilakukan melalui telepon atau layanan pesan singkat.

Di tingkat Dinas Dikpora, sejauh ini komunikasi lebih banyak mengandalkan metode tatap muka melalui rapat atau kunjungan ke sekolah. Saluran komunikasi, baik telepon atau layanan pesan singkat, digunakan hanya sebagai alat pemberitahuan atau undangan pertemuan. Hal ini terjadi dalam komunikasi antara Dinas Dikpora dan aparatur pendidikan di bawah koordinasi Dinas Dikpora. Hal yang sama terjadi dalam komunikasi horizontal antara Dinas Dikpora dan Dewan Pendidikan, DPRD kabupaten, atau satuan-satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain. Untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti pengumpulan data bagi kepentingan perencanaan program, Bappeda mengaku cukup menelepon Dinas Dikpora untuk meminta pihaknya mengantar data yang mereka perlukan.

Selain rapat atau kunjungan ke sekolah, kepala bidang pendidikan menengah (kabid dikmen) menyampaikan bahwa instansinya sudah memanfaatkan surat elektronik (surel) dan grup WhatsApp sebagai media komunikasi dengan para kepala SMP di Kabupaten Dompu. Surel dimanfaatkan oleh kabid dikmen untuk mengirimkan kalender pendidikan, laporan, dan informasi kebijakan terbaru ke sekolah. Grup WhatsApp menjadi media komunikasi dengan para kepala SMP

dan dimanfaatkan untuk menyebarkan undangan pertemuan dan informasi tentang berbagai kebijakan di bidang pendidikan. Meskipun demikian, kabid dikmen menyampaikan bahwa belum semua kepala SMP tergabung dalam grup tersebut karena masih banyak kepala sekolah yang belum menggunakan telepon genggam yang kompatibel dengan aplikasi WhatsApp.

Komunikasi di tingkat pengawas sekolah dilakukan melalui pertemuan rutin yang diadakan tiap bulan. Agenda pertemuan adalah bertukar informasi dan pengalaman mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawas sekolah dan kebijakan terbaru. Para pengawas SMP mengadakan pertemuan rutin di ruang pengawas sekolah di kantor Dinas Dikpora, sedangkan para pengawas SD di kantor unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pendidikan di kantor kecamatan. Para pengawas sekolah beranggapan bahwa telepon dan pesan singkat sudah cukup memadai sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi, baik antarpengawas sekolah maupun dengan para kepala sekolah dan guru di lingkup kerja pengawas sekolah. Sejauh ini, komunikasi antarpengawas sekolah belum banyak menggunakan aplikasi media sosial. Akan tetapi, satu dari dua pengawas SMP yang menjadi informan kunci mengaku tergabung dalam grup pemerhati pendidikan Dompus di media sosial Facebook.

Di tingkat sekolah, pola komunikasi yang ditemukan juga sebatas tatap muka, telepon, atau layanan pesan singkat. Penggunaan media sosial baik antarguru maupun antara kepala sekolah dan guru tidak dijumpai di keempat sekolah sampel. Dua SMP sampel sudah memiliki sambungan internet nirkabel (Wi-Fi), tetapi sambungan ini belum banyak digunakan oleh pengelola sekolah untuk kepentingan pembelajaran. Hanya ada satu guru peserta wawancara kelompok guru di SMPN A yang mengaku tergabung dalam grup WhatsApp alumni pelatihan guru yang baru saja selesai diikutinya. Menurut guru tersebut, para peserta grup WhatsApp ini cukup aktif mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan pendidikan, terutama kebijakan-kebijakan pendidikan terbaru dari Pemerintah Pusat. Namun, sejauh ini ia mengaku hanya menjadi peserta pasif-tidak ikut berpendapat dalam diskusi grup WhatsApp itu.

Secara umum, faktor kedekatan personal para pengelola sekolah dengan pejabat daerah, baik bupati maupun kepala dinas, masih berpengaruh kuat di Kabupaten Dompus. Untuk pemenuhan kebutuhan sekolah yang berasal dari pemda, ketua komite sekolah atau kepala sekolah lebih mengandalkan lobi untuk memastikan alokasi anggaran bagi sekolah yang diampunya. Namun, alih-alih mengajukan alokasi anggaran untuk keperluan peningkatan kualitas pengajaran guru dan kualitas pembelajaran murid, kebutuhan yang diajukan pengelola sekolah masih berkisar pada kelengkapan sarana fisik penunjang sekolah, seperti ruang guru atau WC.

Komunikasi antara pihak sekolah dan murid dan antara sekolah dan orang tua/wali murid bisa dikatakan hanya mengandalkan tatap muka atau surat. Komunikasi jarang sekali dilakukan dengan menggunakan telepon atau layanan pesan singkat. Komunikasi melalui tatap muka atau surat pun tidak berjalan rutin. Komunikasi terjadi hanya jika sekolah memerlukan respons orang tua murid, contohnya jika ada murid yang tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Berkaitan dengan komite sekolah, pengelola sekolah biasanya melibatkan komite sekolah pada saat penyusunan rencana kerja sekolah tahunan. Namun, para informan kunci di tingkat kabupaten mengungkapkan bahwa pelibatan tersebut hanya formalitas, sekadar mendapatkan tanda tangan ketua komite sekolah sebagai syarat pengesahan perencanaan sekolah.

### III. ANALISIS INOVASI DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN

Setidaknya terdapat sepuluh program/kebijakan yang dapat dikategorikan sebagai inovasi di bidang pendidikan di Kabupaten Dompu. Delapan dari sepuluh inovasi merupakan terobosan di tingkat sekolah yang digagas oleh pengelola sekolah. Dua inovasi merupakan kebijakan Dinas Dikpora<sup>4</sup> (lihat Lampiran 10) yang kini tidak lagi berjalan seiring dengan pergantian kepala Dinas Dikpora di Kabupaten Dompu.

**Murid bergantian berceramah di depan sekolah.** Penggagas kegiatan ini adalah kepala SMPN B. Kegiatan rutin ini merupakan interpretasi kepala sekolah atas pendidikan berkarakter yang merupakan bagian dari Kurikulum 2013. Didampingi oleh guru-guru yang ditugaskan khusus oleh kepala sekolah, para murid bergantian memberikan ceramah di halaman sekolah di depan teman-teman mereka dan para guru. Program yang dijalankan mulai 2015 ini tidak saja dianggap mampu mendorong para murid untuk berani berbicara di depan umum, tetapi juga melatih para murid untuk mengasah keterampilan menulis dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Bahan ceramah dapat diambil dari, salah satunya, kisah-kisah nabi.

**Satu jam bersama wali murid.** Penggagas kegiatan ini adalah kepala SMPN yang juga merupakan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Dompu. Gagasan ini merupakan replikasi dari kegiatan serupa yang dilakukan di sekolah-sekolah di luar negeri, serta bermula dari hasil observasi kepala sekolah terhadap para murid yang merasa bosan dengan jadwal kegiatan belajar mengajar (KBM) yang ketat dari Senin hingga Sabtu. Mekanisme inovasi ini adalah KBM ditiadakan setiap Jumat. KBM pada Jumat digantikan dengan kegiatan satu jam bersama wali murid untuk setiap tingkatan kelas di SMPN tersebut. Jam pelajaran yang ditiadakan pada Jumat akan ditambahkan ke hari-hari yang lain sehingga pada Senin–Kamis dan Sabtu murid-murid pulang satu jam lebih lambat. Kegiatan dilakukan setelah murid selesai melakukan senam bersama dan ekstrakurikuler Imtaq pada Jumat pagi. Undangan bagi wali murid diserahkan oleh anak dari wali murid tiga hari sebelum wali murid memberikan paparan. Capaian kegiatan ini ada dua. Pertama, para murid menjadi bangga dengan orang tua dan profesi orang tua mereka. Kedua, murid-murid belajar meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia karena diskusi antara wali murid dan para murid dilakukan dalam bahasa Indonesia.<sup>5</sup>

**Datang pungut, pulang pungut.** Inovasi yang digagas oleh Ketua MKKS Kabupaten Dompu ini dijalankan jauh sebelum ia menjabat kepala SMPN. Tujuan utama kegiatan ini adalah mengajarkan murid untuk mencintai dan menghargai lingkungan. Para murid diminta untuk memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah sebelum pelajaran dimulai dan sesudah pelajaran usai. Namun, tidak ada informasi mengenai keberlangsungan kegiatan ini hingga sekarang dan informasi mengenai kemungkinan adanya sekolah-sekolah lain yang mempraktikkan hal serupa.

**Kunjungan rumah (*home visit*).** Kegiatan menjemput dan mengantar murid dari rumah ke sekolah ini dilakukan oleh kepala SD dan SMP beserta para guru. Dana untuk kegiatan antar-jemput diambil dari BOS. Tujuan kegiatan ini adalah mengembalikan anak-anak ke sekolah dan memastikan bahwa

---

<sup>4</sup>Selama pengumpulan data, tim peneliti mendapati 11 kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai inovasi (lihat tabel inovasi). Namun, satu inovasi tidak tergalikan secara mendalam karena tim peneliti tidak mendapatkan konfirmasi atas kegiatan ini dari para informan kunci selain informan pemberi informasi.

<sup>5</sup>Dalam batas tertentu, murid-murid membantu orang tua mereka mempersiapkan bahan berbagi dalam bahasa Indonesia. Hal ini mereka lakukan karena orang tua murid terbiasa menggunakan bahasa Mbojo dalam keseharian mereka dan orang tua murid belum pernah melakukan kegiatan berbagi ini.

kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak meningkat. Kegiatan kunjungan rumah juga melibatkan komite sekolah dan kepala desa, terutama jika terkait dengan upaya meminta orang tua untuk tidak mengajak anak-anak mereka bekerja. Latar belakang kegiatan antar-jemput murid ini adalah masih ada saja anak-anak yang bolos sekolah karena orang tua mereka mengajak anak-anak itu bekerja terutama pada masa tanam atau masa panen.

**Dekorasi kelas sebagai media pembelajaran.** Sebelum tahun ajaran 2016/2017 dimulai, kepala SDN B mencanangkan program menghias kelas dengan tulisan-tulisan, misalnya “Jagalah kebersihan” dan “Tiada hari tanpa membaca”, dan gambar-gambar bangun ruang, serta satuan luas. Kepala sekolah mendapatkan gagasan untuk menghias kelas-kelas di sekolahnya dengan berbagai tulisan dan gambar tersebut setelah bertandang ke SD tetangga. Ia pun kemudian meminta guru dari SD tetangga dan salah satu guru dari SD yang dipimpinnya untuk menghias ruang-ruang kelas di SDN B. Kepala sekolah menyatakan bahwa ia tertarik dengan dekorasi kelas semacam itu karena dekorasi tersebut tidak saja membuat ruang kelas menjadi lebih menarik bagi anak-anak, tetapi juga bermanfaat bagi para murid untuk meningkatkan keterampilan berbahasa dan belajar berhitung.<sup>6</sup>



**Gambar 1. Dekorasi kelas di SDN B**

**Ulangan dengan sistem buka buku (*open book*).** Ketua MKKS Kabupaten Dompu bercerita bahwa ia pernah menerapkan kebijakan buka buku saat pelaksanaan ulangan di SMPN di Manggalewa yang dipimpinnya. Salah satu manfaat yang diharapkan dari kebijakan ini adalah bahwa murid tidak sekadar menghafalkan isi buku, tetapi sungguh-sungguh memahami inti pelajaran yang diberikan. Kebijakan ini dibuat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Karena mau ulangan murid tadi malam tidak belajar, Pak. Ini (ketika) guru-guru ini (berkata), “Ulangan,” serta-merta murid itu mengeluarkan kertas untuk menjawab. (Menurut saya,) Jangan dipaksa murid untuk menjawab kalau dia tidak bisa, Pak. Makanya salah satu yang, apa namanya, supaya murid itu bisa membaca, itu dipaksa. Pada saat ulangan suruh saja membuka buku. Minimal itu bisa *mengkover* isi bukunya. Itu maksudnya.” (Ketua MKKS, laki-laki, 19 Agustus 2016)

<sup>6</sup>Penelitian ini memang tidak secara khusus meminta tim peneliti untuk melakukan observasi terhadap situasi sekolah dan kegiatan yang berkaitan dengannya. Namun, dalam kegiatan wawancara kelompok murid laki-laki, tim peneliti memutuskan untuk bertanya kepada para murid apakah tulisan dan rumus yang ada pada dinding kelas sudah pernah dipakai oleh para guru untuk menerangkan pelajaran. Murid-murid menjawab belum pernah. Ketika tim peneliti mengajak para murid untuk membaca satu per satu tulisan yang ada pada dinding kelas tersebut, para murid dengan bersemangat membaca tulisan-tulisan itu. Namun, ketika tim peneliti bertanya tentang arti kalimat-kalimat yang baru saja dibaca dengan lantang oleh para murid, tidak semua murid bisa langsung menjawab.

**Seleksi penerimaan GTT.** Inovasi ini digagas oleh seorang kepala SMPN di Woja dengan harapan mendapatkan GTT yang berkualitas. Dasar pemikiran lainnya adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa guru PNS yang telah bersertifikasi memiliki intensitas mengajar yang menurun atau makin malas. Memiliki GTT yang berkualitas dipandang mampu mengatasi situasi tersebut. Untuk mengawali seleksi, kepala sekolah merekrut panitia seleksi yang terdiri atas kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru senior yang memiliki kompetensi. Inovasi ini baru dimulai pada tahun ajaran 2015/2016.

**Antar-jemput murid.** Kegiatan antar-jemput murid dilakukan oleh kepala sekolah dan para guru salah satu SD sampel. Kegiatan ini berlatar belakang kenyataan bahwa banyak di antara para murid tinggal jauh dari sekolah (pengawas SD, Kecamatan Woja, 18 Agustus 2016). Biaya transpor dialokasikan dari dana BOS yang diterima sekolah. Jika kepala sekolah dan para guru tidak dapat melakukan antar-jemput, orang tua murid akan mendapatkan uang transportasi pengganti. Secara umum, kegiatan ini dipandang bermanfaat karena dapat menjamin kehadiran murid di sekolah, bahkan meningkatkan angka kehadiran murid.<sup>7</sup>

**Pakta integritas antara Dinas Dikpora dan para kepala SD di Kabupaten Dompu tentang ketuntasan calistung.** Keberhasilan pakta integritas yang berlaku dari 2008–2010 ini belum dapat diukur ketika pakta integritas tidak dijalankan lagi setelah terjadi pergantian kepala Dinas Dikpora. Menurut salah satu pengawas sekolah dan ketua UPTD Dikpora, di dalam pakta integritas ini disebutkan bahwa seorang kepala sekolah yang dalam tiga tahun kepemimpinannya tidak berhasil menuntaskan masalah calistung pada murid-muridnya akan dicopot dari kedudukannya sebagai kepala sekolah dan akan kembali menjadi guru biasa di sekolah tersebut. Ketuntasan belajar calistung murid-murid kelas 3 akan menjadi bahan evaluasi kepemimpinan kepala sekolah.

**Pendampingan bagi murid-murid yang lemah dalam pelajaran, termasuk calistung.** MoU tersebut diterjemahkan menjadi kegiatan pendampingan khusus bagi murid-murid yang lemah dalam calistung oleh guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Terlepas dari tidak berlakunya kembali MoU, kegiatan pendampingan bagi murid-murid yang lemah dalam berbagai mata pelajaran, termasuk calistung, masih berjalan di banyak SD. Penguasaan calistung merupakan dasar bagi para murid untuk menguasai mata pelajaran yang lain. Biasanya, pihak yang bertugas mendampingi para murid yang lemah adalah GTT. Kegiatan pendampingan dapat dilakukan langsung di dalam kelas dengan GTT bertindak sebagai asisten guru kelas atau di ruangan lain, misalnya di perpustakaan.

**Program Petirahan sebagai bentuk kerja sama antara Dinas Sosial Provinsi NTB dan Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Woja.** Tahun 2016 adalah tahun ketiga kerja sama tersebut. Peserta program adalah murid-murid berkelakuan khusus, yakni mereka yang sangat nakal, sering mengganggu teman, malas, dan tidak bisa membaca. Setiap tahun setidaknya 45 murid kelas 4, 5 dan 6 SD dikirim ke Mataram untuk dikarantina dan mendapat pembinaan selama satu bulan.<sup>8</sup> Murid-murid ini baru dapat mengikuti kegiatan setelah mendapatkan izin dari orang tua masing-masing dan melalui proses penyaringan. Setelah menyelesaikan kegiatan ini, murid-murid dikembalikan kepada orang tua/lingkungan masing-masing. Menurut kepala UPTD, dampak kegiatan ini positif, yakni perilaku para murid menjadi lebih baik atau lebih dewasa.

---

<sup>7</sup>Kegiatan ini juga dapat dipandang sebagai upaya sekolah untuk mempertahankan murid dan menarik minat calon orang tua murid untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah tertentu. Kepala desa salah satu desa lokasi SD sampel menyebutkan bahwa kegiatan antar-jemput tidak hanya dilakukan oleh SD reguler tetapi juga oleh madrasah swasta yang memiliki armada khusus untuk antar-jemput murid.

<sup>8</sup>Kemungkinan besar yang dimaksud dengan tempat petirahan adalah Rumah Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak Putra Utama Mataram (<http://sosdukcapil.ntbprov.go.id/uptd/uptd-rumah-perlindungan-dan-petirahan-sosial-anak-putra-utama-mataram/>).

## IV. PEMANGKU KEPENTINGAN PENDIDIKAN: KEPEDULIAN DAN PENGARUH

### 4.1 Potensi untuk Berkontribusi dan Kemauan untuk Terlibat dalam Peningkatan Hasil Pembelajaran Murid

Terkait dengan hasil belajar murid, para pemangku kepentingan dapat dikelompokkan menjadi pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pendukung pelaksanaan kebijakan. Pihak-pihak yang termasuk dalam pembuat kebijakan adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dinas Dikpora), UPTD Dikpora, Bappeda, DPRD, dan kepala sekolah. Pelaksana kebijakan terdiri atas kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Pendukung pelaksanaan kebijakan terdiri atas Dewan Pendidikan, MKKS, PGRI, orang tua, komite sekolah, kepala desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media massa. Tiap kelompok pemangku kepentingan menunjukkan potensi berkontribusi, kemauan untuk terlibat, dan pengaruh aktual yang berbeda-beda terhadap hasil pembelajaran murid.

**Dinas Dikpora memiliki potensi berkontribusi yang tinggi** untuk meningkatkan hasil pembelajaran karena lembaga ini memiliki tupoksi mengelola dan mengawasi jalannya pendidikan di daerah. Namun, perlu dicatat bahwa kemauan pejabat pendidikan menengah dan pendidikan dasar berbeda<sup>9</sup> dalam mengambil peran untuk perbaikan hasil pembelajaran murid. Selain menjalankan tupoksinya, pejabat pendidikan menengah menerapkan pendekatan kekerabatan kepada para kepala sekolah SMP supaya komunikasi antarlembaga berjalan lancar. Sementara itu, pejabat pendidikan dasar cenderung sekadar menjalankan tupoksinya.

Sebagai pelaksana teknis Dinas Dikpora, **UPTD Dikpora memiliki potensi berkontribusi dan kemauan untuk terlibat yang tinggi** terkait hasil belajar murid. Secara khusus, UPTD Dikpora memiliki peluang untuk lebih kreatif menjalankan tugas-tugas mereka dalam memastikan bahwa pembelajaran murid dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh, UPTD Dikpora Kecamatan Dompu memiliki program mengunjungi sekolah-sekolah untuk mengetahui keberhasilan dan kesulitan tiap sekolah dalam mengelola pembelajaran murid. Contoh lainnya adalah UPTD Dikpora Kecamatan Woja yang memanfaatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Generasi Sehat Cerdas (PNPM Mandiri Perdesaan GSC) untuk menjangkau masyarakat dan anak-anak dalam rangka memotivasi orang tua untuk mengutamakan pendidikan bagi anak-anak mereka.

UPTD Dikpora Kecamatan Woja juga memanfaatkan program Dinas Sosial provinsi untuk mengatasi persoalan anak berkelakuan khusus. Anak berkelakuan khusus yang dimaksud adalah anak yang nakal, suka membolos, dan lambat belajar termasuk dalam calistung. Kepala UPTD Dikpora Woja menyatakan bahwa “anak-anak menjadi lebih dewasa” setelah mengikuti kegiatan tersebut. Namun, tidak ada pemantauan lebih lanjut terhadap perkembangan para murid termasuk oleh sekolah dan orang tua murid.

**Bappeda memiliki potensi berkontribusi yang sedang** karena pelaksanaan tugas penganggaran dana pendidikan oleh Bappeda melalui bidang sosial dan budaya sangat bergantung pada prioritas kebijakan bupati dan pengutamaan program SKPD. Bappeda memiliki pengaruh yang rendah

---

<sup>9</sup>Bidang pendidikan dasar bertanggung jawab atas pendidikan tingkat PAUD hingga SD. Bidang pendidikan menengah bertanggung jawab atas pendidikan tingkat SMP dan SMA.

terhadap hasil pembelajaran murid tidak saja karena secara pribadi kepala bidang sosial budaya sudah akan pensiun, tetapi juga karena tupoksi Bappeda tidak langsung terkait dengan KBM.

**DPRD—dalam hal ini Komisi 3—juga memiliki potensi berkontribusi yang sedang.** Hal ini karena upaya Komisi 3 untuk berpihak pada peningkatan hasil pembelajaran sangat bergantung pada program pendidikan dari pemda dan Dinas Dikpora. DPRD memerlukan data yang cukup untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendorong program pendidikan di Kabupaten Dompu supaya lebih fokus pada peningkatan hasil pembelajaran.

**Kepala sekolah sebagai manajer sekolah memiliki potensi berkontribusi dan kemauan terlibat yang tinggi** dalam hal meningkatkan hasil pembelajaran murid. Hal ini karena rata-rata kepala sekolah mengetahui situasi pendidikan di sekolah yang dikelolanya. Misalnya, untuk mengatasi orang tua murid yang mengajak anak-anak mereka ke tempat kerja atau bekerja pada masa tanam atau masa panen, kepala sekolah menerapkan kebijakan kunjungan rumah.

Kedekatan personal seorang kepala sekolah dengan sekolah yang dipimpinnya juga cukup menentukan apakah kepala sekolah tersebut akan mendedikasikan waktunya secara penuh untuk pengelolaan sekolah. Seorang kepala sekolah sampel yang menghibahkan tanahnya untuk pembangunan sekolah menyerahkan beberapa meter tanah sekolah kepada pihak desa untuk pembangunan jalan. Jalan ini memberikan manfaat bagi para murid yang tidak perlu berjalan memutar terlalu jauh seperti yang biasa mereka lakukan sebelumnya.

Dalam batas tertentu, pertimbangan politis sangat memengaruhi kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai manajer sekolah. Salah satu kepala SMP sampel yang pernah ‘dirumahkan’ selama beberapa tahun menekankan kemauannya terlibat dalam peningkatan hasil pembelajaran murid. “Sepanjang untuk pembelajaran, saya bersedia [dan tidak mau terlibat dalam politik],” ucapnya.

Sebagai pihak utama yang bertemu langsung dengan kepala sekolah dan pengajar, **pengawas sekolah memiliki potensi berkontribusi yang tinggi dan kemauan untuk terlibat yang sedang hingga tinggi** dalam peningkatan hasil pembelajaran murid. Potensi berkontribusi pengawas sekolah tinggi karena bisa dikatakan bahwa pengawas sekolah paling menguasai data sekolah. Ia adalah pihak yang pertama kali mengetahui apa yang terjadi kepada kepala sekolah dan para pengajar. Potensi berkontribusi yang tinggi ini juga didukung oleh fasilitas biaya transportasi bagi para pengawas sekolah untuk melakukan supervisi ke sekolah-sekolah.

Kemauan pengawas sekolah untuk terlibat tidak merata karena tidak semua pengawas sekolah terlibat secara aktif dalam peningkatan hasil pembelajaran murid. Ada pengawas sekolah yang jarang mengunjungi sekolah-sekolah yang menjadi sekolah binaannya. Ada juga pengawas sekolah yang aktif hingga mampu bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemda yang menurutnya membuat murid sekolah kehilangan waktu belajar mereka di sekolah. Ia mengkritik pelibatan murid-murid dalam berbagai kegiatan di tingkat kabupaten, seperti ulang tahun Kabupaten Dompu. Artikel pengawas sekolah yang berupa kritik tersebut dimuat di salah satu media lokal dan mengundang banyak respons positif. Namun, tidak ada tanggapan dari Dinas Dikpora terhadap kritik yang dilontarkannya itu.

**Potensi berkontribusi guru dan kemauan guru untuk terlibat dalam peningkatan mutu pembelajaran murid tinggi.** Hal ini dapat terjadi karena guru adalah pihak yang paling dekat dengan murid dalam konteks KBM. Tinggi rendahnya potensi kontribusi guru sangat bergantung pula pada kebijakan manajemen sekolah. Kontribusi guru untuk menyelesaikan masalah pembelajaran juga terkait erat dengan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas sekolah, misalnya masukan dari pengawas sekolah tentang cara mengajar guru yang perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan hasil

pembelajaran murid, para guru bersedia mengikuti pelatihan karena mereka merasa hal tersebut penting bagi mereka dan para murid.<sup>10</sup>

**Dewan Pendidikan memiliki potensi yang tinggi** dalam upaya perbaikan hasil pembelajaran murid mengingat tupoksi badan ini adalah memberikan rekomendasi terkait berbagai masalah pembelajaran di Kabupaten Dompu. Akan tetapi, pada kenyataannya **pengaruh Dewan Pendidikan berada pada tingkat sedang** karena badan ini hanya menjalankan tupoksinya dan terkesan sulit bersikap kritis terhadap pemda mengingat Dewan Pendidikan berada dalam struktur yang disahkan melalui surat keputusan bupati.

Salah satu anggota Dewan Pendidikan menyoroti persoalan pemenuhan gizi pada anak-anak prasekolah. Menurut anggota Dewan Pendidikan tersebut, kurang diperhatikannya pemenuhan gizi pada anak berkontribusi pada rendahnya kualitas murid dan kemampuan mereka dalam menerima pelajaran di sekolah. Ia juga menyoroti perkelahian antarkampung yang sudah sampai pada tahap mengancam akses murid-murid ke sekolah. Selain itu, ia menekankan tidak dimanfaatkannya dana sertifikasi oleh para guru untuk memperkaya diri mereka secara profesional. Alokasi dana sertifikasi dipandang terlalu besar ketika tidak ada upaya dari para guru untuk mengalokasikan dana tersebut untuk meningkatkan kualitas mereka sebagai pendidik. Hal lain yang juga disoroti oleh anggota dewan tersebut adalah politik praktis yang sangat berdampak pada kelangsungan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Dompu.

Sebagai sebuah forum musyawarah kepala sekolah, **MKKS memiliki potensi dan kemauan terlibat yang tinggi** untuk peningkatan hasil pembelajaran murid. MKKS telah menunjukkan kontribusi yang cukup baik terhadap upaya peningkatan hasil pembelajaran karena menjadi wadah bagi kepala sekolah untuk berbagi informasi mengenai pemecahan masalah pembelajaran, termasuk inovasi pendidikan di tingkat sekolah.

**Potensi PGRI untuk berkontribusi terhadap perbaikan hasil pembelajaran murid bisa dikatakan berada pada tingkat menengah.** Hal ini karena sebagai sebuah organisasi profesi guru, fokus utama PGRI adalah kesejahteraan guru. Perhatian organisasi ini terhadap upaya peningkatan hasil belajar murid masih sangat rendah. PGRI baru berada pada tahap berencana mengadakan pelatihan-pelatihan bagi guru.

**Media lokal memiliki potensi yang tinggi** untuk berkontribusi terhadap peningkatan hasil pembelajaran murid meskipun dampak peran media lokal boleh jadi tidak langsung dirasakan oleh para murid. Media lokal memiliki ruang untuk melakukan pemantauan atas proses belajar mengajar dan kebijakan pendidikan pemda. Kemauan media lokal untuk terlibat dalam peningkatan hasil belajar murid sangat bergantung pada kebijakan dan ketertarikan redaktur media tersebut dengan isu-isu pendidikan.<sup>11</sup>

Di Kabupaten Dompu, tidak banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) bergerak dalam isu pendidikan dan kebijakan pendidikan. Tiga LSM—Lensa NTB Dompu, World Relief, dan We Save—yang ditemui oleh tim peneliti menunjukkan tingkatan potensi yang berbeda. **Lensa NTB Dompu memiliki potensi menengah** karena sebagai sebuah LSM lokal, mereka dapat bergerak dalam berbagai isu, termasuk isu pendidikan. Selain itu, Lensa NTB Dompu pernah melakukan pendampingan penyusunan anggaran pemda, termasuk anggaran pendidikan, dan pendampingan

---

<sup>10</sup>Masih lazim bagi guru-guru untuk menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Bima-Dompu atau Mbojo (dominan) dan bahasa Indonesia, saat mengajar.

<sup>11</sup>Menurut informan dari media lokal, ketertarikan ini bisa dilihat dari tetap dimuatnya reportase tentang pendidikan di Dompu meskipun jatah halaman untuk pemberitaan tentang Dompu sudah habis.

penyusunan rancangan peraturan daerah (perda) di bidang pendidikan dan kesehatan pada masa kepemimpinan bupati yang lama.

World Relief bergerak di bidang manajemen bencana. Meskipun mengadakan kerja sama dengan beberapa sekolah di salah satu kecamatan di Kabupaten Dompu, kegiatan yang dilakukan oleh LSM ini tidak berkaitan dengan proses belajar mengajar dan tidak berpengaruh pada hasil belajar murid. Oleh karenanya, **potensi World Relief untuk berkontribusi terhadap hasil belajar murid rendah** karena memang misi dan visi lembaga tidak menysasar khusus ke bidang pendidikan dasar.

Sebagai sebuah komunitas yang memberikan pelatihan bahasa Inggris dan, baru-baru saja, matematika bagi anak-anak dari keluarga miskin, **We Save memiliki potensi yang tinggi untuk berkontribusi terhadap hasil belajar murid**. Anak-anak yang menjadi bagian dari komunitas ini, termasuk guru-guru mereka, mengungkapkan bahwa setelah mengikuti kelas belajar di We Save, anak-anak menjadi lebih percaya diri saat belajar di sekolah. Selain itu, nilai-nilai mereka untuk pelajaran yang dianggap sulit, contohnya Bahasa Inggris dan Matematika, menjadi lebih baik. Meskipun tidak secara khusus memberikan pendampingan dalam hal bahasa Indonesia, guru-guru komunitas We Save menyatakan bahwa mereka berupaya untuk mendorong anak-anak menjadi lebih percaya diri dalam belajar dan membuat kemampuan bahasa anak-anak asuhan mereka meningkat.

Dari ketiga LSM tersebut, hanya We Save yang memiliki kemauan tinggi untuk terlibat dalam upaya peningkatan hasil pembelajaran murid, khususnya murid-murid yang berasal dari kelompok masyarakat miskin. Namun, perlu dicatat bahwa We Save memiliki nilai-nilai tertentu yang mungkin hanya bisa diterapkan dalam lingkup komunitas khusus dan tidak dalam skala besar. Dua LSM yang lain, yakni **Lensa NTB Dompu dan World Relief, memiliki tingkat kemauan rendah** karena memang mereka tidak memiliki ketertarikan khusus akan isu pendidikan, apalagi hasil pembelajaran murid.

**Potensi komite sekolah untuk berkontribusi terhadap hasil belajar murid sangat bervariasi, yakni menengah hingga tinggi**. Potensi komite sekolah untuk berkontribusi sangat bergantung pada aktif tidaknya komunikasi antara komite sekolah, kepala sekolah, dan para orang tua murid. Komite sekolah umumnya memiliki tingkat kemauan untuk terlibat di tingkat menengah karena biasanya mereka lebih terlibat dalam pembangunan fisik sekolah, alih-alih peningkatan hasil belajar murid. Hanya terdapat dua dari empat ketua komite sekolah yang menunjukkan ketertarikan yang besar dengan hasil pembelajaran.<sup>12</sup>

**Kepala desa memiliki potensi untuk berkontribusi yang sedang/menengah**. Tim peneliti menemukan bahwa dua kepala desa yang diwawancarai sama-sama responsif terhadap pengaduan guru dan kepala sekolah tentang murid yang alpa di kelas karena diajak oleh orang tua mereka untuk bekerja di ladang. Kepala desa aktif mengingatkan orang tua murid untuk mendorong anak-anak mereka kembali ke sekolah. Selain itu, musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) memberi ruang bagi para guru (mewakili kepala sekolah yang biasanya tidak tinggal di desa tersebut) untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan sarana sekolah yang kemudian disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kedua kepala desa yang ditemui oleh tim peneliti menunjukkan kemauan yang tinggi untuk terlibat dalam upaya peningkatan hasil pembelajaran murid.

---

<sup>12</sup>Satu dari empat ketua komite sekolah yang diwawancarai adalah pendidik sehingga ia sangat memahami konteks pendidikan. Seorang ketua komite sekolah lainnya memiliki peran yang cukup signifikan, termasuk berperan dalam mendorong anak-anak di lingkungan sekitar sekolah dan tempat tinggalnya untuk rajin bersekolah, meskipun ia tidak berprofesi sebagai pendidik.

## 4.2 Pengaruh Aktual dan Potensi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pembelajaran

Kepala sekolah dan guru memiliki pengaruh aktual yang paling kuat dalam pembelajaran murid. Pada keempat sekolah yang dikunjungi, semua kepala sekolah memiliki komitmen kuat dalam memastikan murid datang ke sekolah. Dalam banyak kasus, anak bolos sekolah karena diajak orang tua/wali bekerja di kebun. Para kepala sekolah menyatakan bahwa mereka selalu menyempatkan diri atau menugaskan guru untuk berkunjung ke rumah orang tua murid yang anaknya telah absen selama lebih dari dua hari. Kunjungan dilakukan untuk memastikan bahwa orang tua/wali murid membiarkan anak-anak mereka tetap bersekolah. Bahkan di salah satu SD, kepala sekolah meminta orang tua untuk membuat surat perjanjian sebagai jaminan untuk tetap membiarkan anaknya ke sekolah setiap hari.

Di salah satu SD, kepala sekolah juga menjalankan fungsi manajerial sumber daya manusia dengan baik. Perhatiannya terhadap efektivitas pengajaran di kelas diwujudkan dengan menempatkan guru yang cocok untuk setiap tingkat kelas. Misalnya, ia menempatkan guru yang mudah berbaur dengan anak kecil untuk mengajar kelas 1. Selain itu, untuk mengefisienkan pengelolaan GTT yang banyak terdapat di sekolahnya, kepala sekolah juga memfungsikan GTT sebagai 'guru kolaborasi' atau asisten bagi guru PNS yang menjadi guru kelas. Tugas utama GTT adalah memeriksa pemahaman murid terhadap setiap materi yang diberikan oleh guru kelas. Jika ada murid-murid yang tertinggal dalam memahami materi tertentu, mereka akan dipisahkan dari kelas untuk diajar secara lebih intensif oleh GTT.

Di setiap sekolah juga ditemukan guru yang selalu berkunjung ke rumah orang tua/wali jika ada murid yang absen sekolah. Selain itu, guru yang berdomisili di desa setempat juga aktif dalam kegiatan pemerintahan desa, baik dalam musyawarah desa maupun kelembagaan desa. Dengan keterlibatan tersebut, mereka mengaku selalu mengingatkan warga desa dalam setiap pertemuan agar memperhatikan pendidikan anak-anak mereka.

Dalam kaitan langsung dengan pembelajaran, guru tetap berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kemampuan belajar murid di tengah keterbatasan sarana yang ada. Di salah satu SD, guru menggunakan buku K-13 untuk menjadi bahan PR bagi murid walaupun mereka sebenarnya masih menjalankan kurikulum KTSP. Bagi mereka, bahan bacaan dalam buku K-13 tetap bisa digunakan.

Dengan kapasitas dan komitmen yang dimiliki, kepala sekolah dan guru jelas berpotensi besar untuk dilibatkan lebih jauh dalam upaya peningkatan pembelajaran murid. Dalam hal ini, kebutuhan yang mereka ungkapkan adalah memperoleh pengayaan metode dan mendapatkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan jumlahnya memadai agar dapat meningkatkan motivasi belajar murid di sekolah.

Kepala desa dan tokoh desa berperan cukup besar dalam memastikan bahwa murid tetap bersekolah. Interaksi antara pihak sekolah dan kepala desa serta perangkatnya dapat dikatakan cukup baik. Dalam kasus anak yang sering tidak masuk sekolah karena orang tua, kepala desa selalu dilibatkan untuk turut mengingatkan para orang tua. Di sisi lain, pelibatan tokoh masyarakat desa setempat dalam komite sekolah memperkuat peran mereka dalam penyelesaian masalah-masalah sekolah. Di sekolah-sekolah yang dikunjungi, komite sekolah diketuai oleh perangkat desa, kepala keamanan desa, atau tokoh masyarakat yang dihormati warga desa.

Dengan ketokohnya, ketua komite sekolah di salah satu sekolah turut terlibat bersama dengan para guru menjemput murid-murid yang tidak bersekolah. Bahkan, ia turut membantu memastikan bahwa murid-murid mendapatkan fasilitas sepatu dari alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) walaupun sejauh ini komite sekolah belum pernah dilibatkan dalam (pembicaraan mengenai) pembelajaran. Hal ini juga dipengaruhi oleh ketertarikan mereka yang lebih besar dengan masalah fisik sekolah. Dilihat dari kondisi tersebut, pemerintah desa bersama tokoh-tokoh masyarakat setempat berpotensi untuk dilibatkan lebih banyak dalam hal pembelajaran murid.

Pengawas sekolah belum menunjukkan keterlibatan yang besar dalam proses pembelajaran murid. Pengawas sekolah sebenarnya merupakan ‘teman terdekat’ kepala sekolah dan guru dalam upaya memecahkan masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Pengawas sekolah memiliki dua tugas utama: melakukan supervisi manajerial terhadap kepala sekolah dan supervisi akademik terhadap guru. Dalam menjalankan tugas itu, terungkap bahwa pengawas sekolah datang ke sekolah sekadar untuk memenuhi kewajiban kunjungan. Beberapa guru mengaku tidak ditanya atau diajak berdiskusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi di kelas.

Walaupun demikian, tidak semua pengawas sekolah bersikap tak acuh terhadap masalah pembelajaran. Beberapa informan yang menjabat sebagai pengawas sekolah mengatakan bahwa mereka sudah berupaya maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Masalahnya adalah bahwa rekomendasi yang mereka buat berdasarkan hasil pengawasan dan supervisi nyaris tidak pernah mendapat perhatian dari Dinas Dikpora atau pemerintah kabupaten. Kebijakan yang dibuat pemerintah kabupaten tidak didasari penilaian para pengawas sekolah. Hal ini, misalnya, tampak dari kebijakan mutasi guru dan kepala sekolah yang lebih didasari kedekatan politis pihak guru dengan pemegang kebijakan.

Di tingkat pembuat kebijakan, Dinas Dikpora, Bappeda, dan DPRD belum optimal dalam menjalankan kewenangannya dalam meningkatkan hasil pembelajaran murid. Sebagian besar informan di tingkat kabupaten ini masih beranggapan bahwa pembelajaran murid di kabupaten ini tidak bermasalah. Ketika diperlihatkan kepada mereka data hasil belajar calistung di Kabupaten Dompu yang rendah, para informan tersebut malah mengelak dengan menyatakan bahwa hal itu hanya bersifat kasuistik dan terjadi di daerah pinggiran. Mereka lebih banyak menyalahkan orang tua murid yang dianggap kurang memperhatikan pendidikan anak dan menyalahkan murid yang dinilai banyak meluangkan waktu di media sosial dan sering bermain *game* atas rendahnya hasil pembelajaran mereka. Selain itu, kebijakan pendidikan gratis juga dianggap membuat orang tua murid bersikap tak acuh terhadap pendidikan anaknya. Kebijakan pendidikan gratis yang dipahami masyarakat tersebut tampaknya tidak sejalan dengan visi bupati, yaitu pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, bukan pendidikan gratis atau murah.

Kecuali MKKS, para pemangku kepentingan seperti Dewan Pendidikan, PGRI, dan LSM belum memberikan perhatian yang besar terhadap pembelajaran murid. Dewan Pendidikan sejauh ini belum menjalankan aktivitas yang terprogram. Se jauh ini, rekomendasi yang pernah dikeluarkan oleh Dewan Pendidikan adalah terkait dengan pemerataan distribusi guru. Namun, hasil dari rekomendasi itu pun tidak tampak. PGRI pun sejauh ini masih berkutat pada permasalahan tuntutan guru akan peningkatan kesejahteraan mereka. Selain itu, tidak ada LSM yang secara konsisten menggeluti isu-isu pendidikan dalam aktivitasnya.

Saat ini MKKS memiliki potensi yang besar dan pengaruh yang cukup kuat untuk meningkatkan pembelajaran murid. Hal ini didorong oleh peran ketua MKKS yang banyak melakukan inovasi di sekolahnya. Dalam kaitan dengan hal tersebut, ketua MKKS secara aktif menyebarkan inovasi-inovasi tersebut untuk ditiru oleh para kepala sekolah lain. Ia juga beberapa kali diundang oleh kepala dinas untuk menyampaikan inovasi-inovasi tersebut di hadapan para kepala sekolah dari semua tingkatan. Sebagai hasilnya, menurut pengakuan ketua MKKS, salah satu inovasi yang ia lakukan berupa kewajiban murid memungut sampah, yaitu kebijakan “Datang pungut, pulang pungut”, sudah diterapkan di beberapa sekolah lain. Dengan kapasitas yang dimilikinya, ketua MKKS berpotensi besar untuk dilibatkan dalam upaya peningkatan pembelajaran murid.

## DAFTAR ACUAN

Dinas Dikpora (2015) 'Profil Pendidikan 2014–2015.' Laporan tidak dipublikasikan, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN 1

## Isu-Isu Utama bagi Pemangku Kepentingan

### a) Kelompok Pembuat Kebijakan

Kualitas guru kurang. Semua pemangku kepentingan yang masuk dalam kelompok pembuat kebijakan sepakat bahwa rendahnya kompetensi guru mengajar merupakan faktor penentu rendahnya hasil pembelajaran murid sekolah tingkat pendidikan dasar. Ketua Komisi 3 DPRD mencermati bahwa masih sedikit guru bisa mengajar dengan kreatif dan menggunakan metode yang menyenangkan sehingga tidak membuat para murid tertekan saat belajar. Suasana kelas yang membuat murid merasa tertekan dipandang berpotensi melemahkan hasrat murid untuk belajar dan berprestasi.

Kabid Dikmen Dinas Dikpora menilai bahwa guru belum mampu menilai dengan benar perkembangan murid-murid dalam konteks pembelajaran. Rendahnya kompetensi guru membuat guru memiliki kecenderungan memperlakukan para murid sama rata atau tidak melihat kebutuhan khusus para murid. Murid-murid yang sebetulnya memerlukan dukungan khusus bisa jadi akan terabaikan dan kekurangan para murid ini tidak teratasi hingga mereka berada di kelas yang lebih tinggi. Di sisi lain, murid-murid yang memiliki potensi lebih tidak mendapatkan perhatian sehingga potensi tersebut tidak terasah dan murid pun tidak dapat berprestasi.

Kualitas guru yang rendah dipandang memiliki kaitan erat dengan terbatasnya pelatihan bagi para guru. Dinas Dikpora, dalam hal ini Kasi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, Kasi Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah, dan Kabid Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas), mengakui bahwa pelatihan terbatas bagi kelompok guru tertentu saja. Lembaga yang memberikan pelatihan pun sama, yakni LPMP Mataram. Peran kepala sekolah dalam mendorong guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka juga signifikan. Ketua Komisi 3 DPRD berpendapat bahwa kepala sekolah kurang memotivasi para guru sehingga guru sekadar menjalankan kewajiban mengajarnya sehari-hari tanpa merasa perlu untuk mengikuti isu-isu pendidikan terbaru atau mempelajari metode pembelajaran yang baru. Perhatian kepala sekolah, terutama kepala sekolah SMP dan SMA, akan hal ini kurang karena mereka lebih mementingkan pengadaan proyek sarana dan prasarana sekolah daripada peningkatan kualitas guru.

Kepedulian orang tua dalam mendukung pendidikan anak kurang. Kecuali DPRD, semua pemangku kepentingan yang merupakan pembuat kebijakan menyatakan bahwa orang tua kurang memperhatikan (peningkatan) hasil pembelajaran murid. Bappeda mencermati bahwa masih ada anak usia sekolah, yakni mereka yang berusia 7–19 tahun, yang tidak mengenyam pendidikan karena orang tua mereka tidak peduli akan hal itu. Ketidakpedulian orang tua membuat anak juga kurang menyadari manfaat pendidikan bagi mereka.

Bappeda juga menekankan tentang perbedaan tingkat kepedulian orang tua di wilayah perdesaan dan orang tua di wilayah nonperdesaan. Menurut Bappeda, orang tua di perdesaan lebih tidak peduli akan arti penting pendidikan bagi anak-anak daripada orang tua di wilayah nonperdesaan. Secara khusus, Dinas Dikpora menyoroti kebiasaan sebagian orang tua di daerah perdesaan yang mengajak anak-anak mereka turut bekerja di ladang pada masa tanam dan panen sehingga anak-anak membolos. Perwakilan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora menyatakan bahwa hal tersebut membuat capaian pembelajaran sekolah-sekolah yang terletak di wilayah perdesaan atau pinggiran lebih rendah daripada capaian sekolah-sekolah di perkotaan.

Keberadaan dana BOS sangat membantu dalam upaya pemenuhan kebutuhan operasional sekolah. Meskipun demikian, masih banyak sekolah yang sulit mengembangkan diri dengan hanya bergantung pada dana BOS. Peran serta orang tua murid untuk mendukung pembiayaan pendidikan masih sangat diperlukan. Namun, pengelola sekolah makin sulit mendapatkan dukungan orang tua dalam bentuk kontribusi dana. Dinas Dikpora dan Bappeda berpendapat bahwa orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya enggan berkontribusi lebih pada pendidikan anak-anak mereka karena persepsi mereka yang tidak tepat tentang pendidikan dasar gratis. Kampanye Pemerintah Pusat tentang pendidikan gratis tersebut membuat orang tua tidak peduli akan pentingnya dukungan mereka bagi pendidikan anak-anak. Lebih jauh lagi, orang tua tidak peduli akan kualitas pendidikan anak-anak mereka.

Ketimpangan antarsekolah yang tinggi. Semua pemangku kepentingan mengakui adanya kesenjangan antarsekolah dalam berbagai hal yang dianggap berpengaruh pada hasil pembelajaran murid. Bagi DPRD, berbagai kesenjangan antarsekolah bermula dari ketiadaan kebijakan yang mengutamakan pemerataan untuk menghilangkan kesenjangan tersebut. Isu ketimpangan antarsekolah ini meliputi (i) persebaran guru yang tidak merata, (ii) pembedaan antara sekolah favorit dan sekolah nonfavorit, dan (iii) kelengkapan sarana dan prasarana yang timpang.

Beberapa pemangku kepentingan, yakni Dinas Dikpora dan DPRD, secara khusus menyoroti persebaran guru yang tidak merata. Kasi Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora menjelaskan bahwa topografi wilayah Dompu menjadi salah satu faktor guru memilih mengajar di sekolah-sekolah yang dekat dengan pusat kabupaten. Namun, yang lebih penting lagi adalah bahwa belum ada kebijakan pemerataan penempatan guru sehingga guru-guru yang berkualitas masih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Guru-guru yang sudah berstatus PNS pun rata-rata enggan mengajar di daerah pinggiran dan perdesaan. Oleh karena itu, perwakilan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora menekankan tentang perlunya dikeluarkan kebijakan rotasi dari pemda untuk mengatur penempatan guru.

Menurut pandangan Dinas Dikpora, capaian pembelajaran sekolah-sekolah di daerah pinggiran cenderung rendah karena sekolah-sekolah ini kekurangan guru yang berkualitas. Guru-guru yang berkualitas memilih mengajar di sekolah-sekolah yang lebih mudah diakses serta sarana dan prasarannya lebih lengkap. Jika dicermati, sekolah-sekolah negeri, terutama yang dipandang berkualitas tinggi, menumpuk di wilayah perkotaan. Guru-guru PNS, apalagi yang memiliki kompetensi tinggi pun, jarang yang mengajar di daerah pinggiran atau perdesaan. Orang tua pun kemudian condong menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah favorit karena dipandang lebih berkualitas. Meskipun tidak ada informasi yang pasti tentang sekolah yang kekurangan murid akibat adanya sekolah favorit dan nonfavorit ini, para pengelola sekolah sampel menunjukkan bahwa mereka menerapkan berbagai strategi untuk menarik perhatian orang tua agar menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah sampel.

Informan dari DPRD menuturkan bahwa perkara sekolah favorit versus sekolah nonfavorit ini mulai berkembang sepuluh tahun terakhir terutama pada sekolah menengah atas (SMA). Program-program pengembangan sekolah kala itu difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana hingga menarik perhatian guru-guru untuk mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Namun, kualitas lulusan sekolah favorit ini, menurut pandangan DPRD, biasa-biasa saja. Motivasi dan prestasi para murid yang bersekolah di sekolah favorit belum tentu lebih tinggi daripada mereka yang bersekolah di sekolah nonfavorit.

Para pemangku kepentingan menyepakati bahwa bagi para pengelola SD dan SMP di Kabupaten Dompu, secara umum akses murid ke sekolah serta sarana dan prasarana sekolah sudah teratasi. Namun, DPRD masih menganggap bahwa kesenjangan kelengkapan sarana dan prasarana antarsekolah masih menjadi persoalan. Contohnya, masih ada sekolah yang daya tampungnya

kurang (kekurangan ruangan), prasarana pendukung masih minim (tidak memiliki laboratorium), dan ruangan kelas tidak layak pakai karena rusak.

Ketua Komisi 3 DPRD dan Kepala Bidang Sosial-Budaya Kantor Bappeda menyatakan bahwa capaian calistung murid masih rendah. Kasi Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora bahkan menekankan bahwa calistung masih menjadi masalah utama. Masih banyak anak kelas 6 SD yang belum menguasai calistung, terutama numerasi. DPRD menuturkan bahwa jika dicermati lebih lanjut, persoalan calistung terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di wilayah pinggiran. Hal ini tidak terlepas dari kesenjangan kualitas murid yang masuk ke sekolah di pinggiran dan mereka yang masuk ke sekolah di wilayah perkotaan.

Upaya guru untuk memperbaiki kualitas murid dengan cara bersikap tegas untuk mendisiplinkan murid kini menghadapi potensi hambatan. Hanya satu pemangku kepentingan, yakni DPRD, yang menuturkan bahwa sejak Undang-Undang Perlindungan Anak disosialisasikan, para guru makin ragu bersikap tegas kepada murid karena khawatir akan dilaporkan oleh orang tua murid kepada pihak berwajib.

#### *Informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan*

Untuk dapat mendukung peningkatan hasil pembelajaran murid, Bappeda dan DPRD memerlukan berbagai informasi. Informasi khusus yang dibutuhkan oleh Bappeda adalah data terkait perencanaan sehingga Bappeda bisa mendukung upaya peningkatan hasil pembelajaran melalui penganggaran. DPRD memerlukan data terkait capaian pembelajaran supaya bisa mendorong program pendidikan Dinas Dikpora agar lebih fokus pada peningkatan hasil pembelajaran.

#### **b) Kelompok Pelaksana Kebijakan**

Belum ada dukungan spesifik bagi murid dengan kebutuhan khusus. Hanya sebagian kecil dari kelompok pelaksana kebijakan, yakni Kepala sekolah SDN B, guru-guru SDN B, dan pengawas SMP, menyebutkan belum tersentuhnya isu anak berkebutuhan khusus dalam konteks pembelajaran di tingkat pendidikan dasar. Kepala sekolah dan para guru SDN B menghadapi persoalan murid berkebutuhan khusus. Murid tuna wicara yang bersekolah di SDN B terpaksa diperlakukan sama dengan murid-murid yang tidak memiliki kebutuhan khusus seperti dirinya. Akibatnya, murid ini lebih banyak tidur di dalam kelas saat pelajaran berlangsung karena ia tidak memahami instruksi yang diberikan oleh guru. Para guru malahan meminta sesama murid untuk mengajari murid yang tuna wicara tersebut. Hal ini terjadi lebih karena guru-guru tidak memiliki keterampilan khusus untuk mendampingi murid dengan kondisi seperti ini.

Capaian kemahiran membaca, menulis, dan berhitung (calistung) rendah. Sebagian dari para pemangku kepentingan yang termasuk dalam kelompok pelaksana kebijakan sepakat bahwa masih ada persoalan calistung yang harus dihadapi dan ditangani oleh penyelenggara pendidikan tingkat dasar dan menengah di Kabupaten Dompu. Para kepala UPTD Dinas Dikpora mengakui keberadaan anak-anak yang lemah dalam hal calistung di wilayah kerja mereka. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Dompu menekankan bahwa situasi tersebut lebih banyak ditemukan di sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran atau perdesaan.

Akan tetapi, para pengawas SD dari Kecamatan Woja dalam keterangannya menyiratkan bahwa murid-murid yang lemah dalam calistung juga dapat ditemui di sekolah-sekolah yang masuk dalam wilayah Kecamatan Woja yang relatif dekat dengan pusat kabupaten. Senada dengan para pengawas SD, para pengawas SMP dari Kecamatan Dompu menuturkan bahwa persentase murid yang lemah calistung bisa jadi lebih besar dari hasil penelitian yang ditunjukkan oleh tim peneliti

SMERU kepada mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut, semua sekolah sampel memberikan pendampingan bagi para murid yang belum lancar calistung.

Kepala sekolah dari dua SD sampel menyatakan bahwa murid-murid yang kemampuan calistungnya masih rendah bukan saja mereka dari kelas bawah tetapi juga dari kelas atas, contohnya kelas 4 dan kelas 5. Guru-guru dari salah satu SD sampel yang lokasinya lebih jauh dari SD sampel yang lain menyebutkan bahwa kira-kira ada lima murid dari tiap tingkatan kelas atas yang tidak bisa membaca dan berhitung. Guru-guru mengutarakan kesulitan saat mereka meminta murid menjawab soal cerita ketika murid tersebut belum lancar membaca.

Kesulitan yang dihadapi oleh para guru SD ini juga memberatkan guru-guru SMP. Para guru dari dua SMP sampel menyatakan keheranan mereka karena murid-murid yang masih belum lancar calistung tersebut bisa lulus dari SD. Guru Bahasa Indonesia dari SMP sampel harus menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Mbojo dan bahasa Indonesia, saat menerangkan pelajaran kepada murid-murid, mengingat lima hingga enam murid kelas 1 SMP belum lancar membaca. Guru Matematika SMP sampel sering kali menjadi guru pertama yang menyadari persoalan murid yang belum bisa membaca ketika murid mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal cerita. Para guru sepakat bahwa kemahiran calistung murid rendah karena motivasi belajar anak rendah. Hal ini bisa dilihat dari PR yang tidak pernah mereka kerjakan.

Sebagian besar pelaksana kebijakan pendidikan menyatakan bahwa kepedulian orang tua dalam mendukung pendidikan anak kurang. Pengawas SD menganggap ketidakpedulian tersebut sebagai dampak dari persepsi orang tua terhadap kebijakan pendidikan gratis bagi anak usia SD dan SMP. Karena biaya pendidikan gratis, orang tua menunjukkan kecenderungan tidak bersedia berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Lebih mendasar lagi, orang tua tidak mendukung anak untuk berprestasi di sekolah.

Dalam beberapa kasus, seperti yang disampaikan oleh pengawas SMP, para kepala sekolah, dan guru sekolah sampel, murid-murid diajak orang tua mereka untuk bekerja di ladang saat musim tanam dan panen. Akibatnya, anak-anak membolos. Kesibukan orang tua mencari nafkah, hingga merantau ke luar negeri, memaksa anak-anak untuk tinggal dengan nenek dan kakek mereka. Kondisi ini membuat peran orang tua makin minim dalam mendorong anak-anak mereka rajin belajar. Para guru pun kesulitan untuk mendiskusikan perkembangan anak-anak ini dengan orang tua mereka. Terlepas dari situasi orang tua yang merantau dan sibuk bekerja karena desakan ekonomi tersebut, para pelaksana kebijakan sepakat menyatakan bahwa peran orang tua sangat minim dalam mendukung pembelajaran anak-anak mereka.

Jumlah GTT di Kabupaten Dompu sudah melebihi kebutuhan. Lebih dari separuh guru di kabupaten ini adalah GTT. Beberapa pemangku kepentingan, termasuk salah satu kepala UPTD Dinas Dikpora, melihat hal tersebut sebagai dampak kebijakan seleksi penerimaan GTT yang tidak ketat. Salah satu pengawas SMP dengan tegas menambahkan bahwa kebijakan seleksi dan penempatan GTT sangat politis. Penempatan dengan dasar seperti ini membuat kepala sekolah salah satu SD sampel hanya bisa menerima penugasan lima GTT langsung dari Dinas Dikpora, padahal jumlah GTT di sekolah tersebut sudah melebihi kebutuhan. Berlimpahnya GTT membuat SD sampel tersebut menempatkan hingga tiga GTT dalam kelas yang telah diampu oleh seorang guru PNS. Anggaran sekolah pun terbebani; honorarium bagi GTT juga minim karena anggaran harus dikelola secara ketat oleh sekolah untuk membiayai para GTT tersebut.

Sebagian dari para pemangku kepentingan pelaksana kebijakan menyebutkan tentang rendahnya hasil pembelajaran murid sebagai akibat dari kualitas guru yang rendah. Salah satu kepala UPTD yang menjalani profesi sebagai guru dan kepala sekolah sebelum menjabat kepala unit tersebut merasa resah mengetahui guru-guru kurang kreatif dalam menyampaikan suatu materi pengajaran,

bahkan terkesan tidak menguasai bahan ajar. Kepala UPTD ini mencurigai bahwa latar belakang para guru yang kebanyakan bukan dari jurusan kependidikan membuat kemampuan didaktik dan metodik mereka kurang. Selain merasa sangat terbebani dengan kurikulum yang berubah-ubah dan tuntutan yang makin besar kepada guru, guru-guru pun terpaku pada bahan ajar dan tidak kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai bahan ajar. Kepala sekolah juga mengeluhkan kurikulum yang berubah-ubah.

Baik kepala sekolah SD maupun kepala sekolah SMP yang dikunjungi oleh tim peneliti mengakui pentingnya meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar, termasuk penguasaan teknologi terkini bagi para guru senior. Meningkatkan kualitas guru pada dasarnya, menurut salah satu pengawas SMP, akan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran para murid. Mengutip pendapat salah satu kepala sekolah SD sampel, kurangnya kreativitas guru dalam mengajar membuat murid-murid tidak aktif dalam belajar. Menurut para pengawas SD, para guru yang telah mendapatkan sertifikasi tidak memanfaatkan dana sertifikasi sebagai investasi untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai guru yang profesional. Pengawas SD tersebut berpendapat bahwa masalah pendanaan yang terbatas untuk penyelenggaraan pelatihan bagi para guru seharusnya dapat diatasi oleh para guru dengan cara berswadaya mengadakan pelatihan. “Lulus sertifikasi, seharusnya berkualitas”, komentar salah satu kepala SD sampel tentang para guru bersertifikat yang kualitasnya masih rendah.

Guru-guru tidak mengelak bahwa mereka memang perlu terus belajar mengenai metode pembelajaran. Forum MGMP merupakan kesempatan yang baik bagi para guru untuk saling bertukar pengetahuan mengenai metode pembelajaran dan mendapatkan masukan atas kesulitan saat mengajar. Namun, forum MGMP untuk guru-guru SMP di wilayah studi telah dua tahun vakum, padahal seharusnya forum ini diselenggarakan minimal sekali dalam satu semester.

Selain persoalan kualitas guru dan pelatihan guru yang kurang, isu tidak tercapainya ketuntasan belajar mengajar (KBM) setiap tahun ajaran disampaikan oleh sebagian kecil dari kelompok pelaksana kebijakan. Kepala UPTD mengukur ketidaktuntasan tersebut dari target kurikulum. Salah satu pengawas SD menyesalkan ketidaktuntasan KBM yang terjadi setiap tahun ajaran karena sekolah-sekolah selalu diminta untuk mengerahkan para murid untuk mengisi kegiatan perayaan ulang tahun Kabupaten Dompu. Persiapan kegiatan perayaan tersebut membuat murid-murid meninggalkan jam pelajaran selama sehari-hari.

### **c) Kelompok Pendukung Pelaksana Kebijakan**

Capaian kemahiran membaca, menulis, dan berhitung (calistung) rendah. Sebanyak 11 dari 15 pemangku kepentingan yang merupakan pendukung pelaksana kebijakan pendidikan menyatakan bahwa capaian kemahiran calistung murid-murid SD dan SMP Kabupaten Dompu masih rendah. Dari 11 pemangku kepentingan ini, LSM We Save dan SDN A telah melakukan aktivitas terencana untuk mengatasi persoalan tersebut. LSM We Save memberikan pendampingan calistung bagi anak-anak usia SD dan SMP yang merupakan penerima program lembaga ini. SDN A menugaskan GTT untuk memberikan pendampingan bagi murid-murid yang belum lancar calistung. Tidak terdapat data tentang informasi yang dibutuhkan oleh para pendukung pelaksana kebijakan pendidikan untuk dapat mengatasi persoalan capaian calistung murid.

Ketua komite sekolah SDN A mengakui bahwa meskipun hasil UN sekolah menyatakan bahwa semua murid SD tersebut lulus, sesungguhnya masih ada lulusan SD tersebut yang belum lancar membaca. Fakta ini sejalan dengan hasil pengamatan ketua komite sekolah SMPN A yang menyampaikan bahwa beberapa tahun yang lalu ia menjumpai satu murid dari SMP sampel ini yang

tidak lancar membaca. Dengan tegas ketua MKKS menyatakan bahwa di Kabupaten Dompu, dari 30 murid SMP hanya 5 murid yang mampu menguasai literasi dan numerasi.

Rata-rata informan yang mengamati persoalan capaian calistung yang masih rendah di Kabupaten Dompu mengakui bahwa kondisi ini lebih banyak dijumpai di daerah pinggiran atau perdesaan di Kabupaten Dompu. Para informan menilai kebiasaan para murid dan guru menggunakan bahasa daerah (bahasa Bima-Dompu atau bahasa Mbojo) saat berada di lingkungan sekolah, bahkan saat proses belajar mengajar berlangsung, berkontribusi pada rendahnya capaian kemahiran membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.

Murid memerlukan pelajaran tambahan. Kelompok orang tua murid SDN A dan orang tua murid SMPN B menyampaikan bahwa anak-anak mereka memerlukan pelajaran tambahan. Satu dari dua kelompok orang tua murid ini, yakni kelompok orang tua murid SMPN B, menambahkan tentang perlunya kegiatan ekstrakurikuler bagi para murid.

Kebutuhan murid akan pelajaran tambahan juga berkaitan erat dengan kesulitan yang dialami oleh para murid dalam mata pelajaran tertentu. Orang tua murid menyampaikan keluhan anak-anak mereka tentang mata pelajaran yang dianggap sulit, yakni Matematika, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Agama Islam (PAI). Bagi para murid, hal yang menyulitkan mereka dalam pelajaran Matematika adalah rumus-rumus yang harus mereka pahami. Hal yang menyulitkan mereka dalam pelajaran Bahasa Inggris adalah tulisan yang berbeda dengan cara membacanya. Hal yang menyulitkan mereka dalam pelajaran PAI adalah surat-surat pendek dalam Alquran yang susah dihafal.

Kepedulian orang tua dalam mendukung pendidikan anak kurang. Hampir 50% dari pemangku kepentingan yang merupakan pendukung pelaksanaan kebijakan menyatakan bahwa kepedulian orang tua murid dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka masih kurang. Ketua MKKS dan seorang anggota Dewan Pendidikan menyebutkan bahwa kampanye pendidikan gratis menjadi faktor penting yang membuat orang tua murid tidak lagi merasa perlu untuk terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kualitas pendidikan anak-anak mereka.

Para informan menyatakan bahwa kurangnya kepedulian orang tua akan arti penting dukungan orang tua bagi anak-anak dapat dilihat dari, antara lain, mayoritas orang tua yang jarang menemani anak mereka belajar di rumah. Kalaupun ada yang menemani, biasanya hanya ibu yang melakukannya. Dua dari lima belas pemangku kepentingan menyampaikan persoalan tentang murid-murid yang malas mengerjakan PR. Komite sekolah SMPN B menekankan tentang anak-anak yang masih sering malas tidak hanya dalam hal mengerjakan tugas tetapi juga dalam hal mengerjakan PR. Perwakilan orang tua murid SDN B mengakui bahwa ada anak-anak yang kurang belajar. Perwakilan orang tua murid ini menambahkan bahwa hal tersebut biasanya terjadi pada anak-anak yang latar belakang ekonomi keluarganya rendah dan orang tua mereka bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI).

Tiga pemangku kepentingan, yakni komite sekolah SDN A, komite sekolah SDN B, dan orang tua murid SDN A, menyampaikan persoalan tentang murid-murid yang dibawa orang tua atau kakek-nenek mereka berladang di hutan sehingga harus membolos. Hal ini biasanya terjadi pada musim berladang. Anak-anak dibawa oleh orang tua atau kakek-nenek<sup>13</sup> mereka selama sehari-hari untuk tinggal bersama dengan orang tua mereka di ladang biasanya karena tidak ada yang menjaga anak-anak di rumah selama orang tua atau kakek-nenek mereka bekerja di ladang.

---

<sup>13</sup>Terjadi pada anak-anak yang orang tuanya bermigrasi ke luar daerah atau ke luar negeri.

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah menjadi salah satu hal yang membuat orang tua kesulitan membantu anak-anak mereka belajar atau mengerjakan PR. Tiga dari lima belas pendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan berpendapat bahwa tingkat pendidikan orang tua murid yang rendah merupakan isu penting dalam bidang pendidikan. Seorang ibu yang turut dalam wawancara kelompok orang tua murid di salah satu SMP sampel tidak dapat membaca dan menulis. Ia pun sibuk berdagang di pasar. Oleh karena itu, ia tidak mendampingi anak-anaknya belajar dan membantu mereka mengerjakan PR. Hal serupa dialami oleh orang tua yang bekerja sebagai petani. Kesibukan mereka di sawah/ladang membuat mereka tidak memiliki waktu untuk mendampingi anak-anak mereka.

Ketua Komite Sekolah SMPN B menegaskan bahwa sekolah sudah sering kali meminta orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anak mereka terutama dalam perkembangan capaian pendidikan anak-anak tersebut. Namun, seperti yang ditekankan oleh Ketua Komite Sekolah SDN B, masih saja ada anak-anak yang membolos sehingga pihak sekolah harus datang ke rumah mereka untuk meminta orang tua anak-anak tersebut mendorong anak-anak mereka kembali bersekolah. Keempat sekolah sampel menerapkan kebijakan yang sama, yakni perwakilan pihak sekolah akan datang ke rumah murid yang absen selama dua hari berturut-turut untuk mencari tahu alasan murid absen.

Terdapat kesenjangan antarsekolah dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana. Tujuh dari lima belas pemangku kepentingan melihat kesenjangan antarsekolah dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana sebagai salah satu isu pendidikan yang memengaruhi kualitas pendidikan. Kesenjangan kelengkapan sarana dan prasarana membuat sekolah-sekolah yang dekat dengan perkotaan lebih mudah mendapatkan murid karena rata-rata sekolah yang ada di perkotaan memiliki fasilitas yang lebih baik daripada sekolah yang ada di pinggiran atau perdesaan. Kesenjangan ini juga membuat guru-guru enggan ditempatkan di sekolah-sekolah di wilayah pinggiran atau perdesaan (lihat Bab 2). Persoalan sarana dan prasarana ini meliputi aspek (i) ketersediaan buku ajar, buku murid, dan buku referensi; (ii) fasilitas pendukung proses belajar mengajar, seperti laboratorium dan perpustakaan; (iii) fasilitas pelengkap sanitasi, yakni air bersih; dan (iv) fasilitas keamanan sekolah.

Empat pemangku kepentingan, yakni perwakilan orang tua murid SMPN A, SMPN B, SDN A, serta Ketua Komite Sekolah SMPN A menyatakan pentingnya memenuhi kebutuhan sekolah akan buku ajar. Di keempat sekolah sampel ditemukan bahwa tidak ada jumlah buku ajar yang cukup untuk semua murid. Satu buku ajar harus dipakai bersama oleh dua hingga tiga murid. Para pemangku kepentingan juga menyampaikan bahwa fasilitas sekolah di wilayah pinggiran Dompus masih belum selengkap fasilitas sekolah di wilayah perkotaan. Misalnya, sekolah-sekolah di pinggiran belum memiliki laboratorium dan perpustakaan yang memadai dan belum memiliki akses internet yang baik. Satu dari empat sekolah sampel, yakni SMPN A, bahkan belum memiliki sarana air bersih yang memadai. Jika perlu menggunakan kamar kecil, murid-murid harus pulang atau pergi ke rumah warga yang dekat dengan sekolah.

Kualitas guru rendah. Empat dari lima belas pendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan menyebutkan bahwa kompetensi guru untuk mengajar masih rendah. Ketua Dewan Pendidikan menyatakan bahwa pembenahan kualitas guru masih harus dilakukan meskipun secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Dompus sudah lumayan. Ketua MKKS menduga bahwa mutasi membuat kepala sekolah dan para guru berpotensi malas bekerja dan hal ini berpengaruh pada kompetensi mereka. Namun, tim peneliti tidak mendapatkan informasi yang cukup lengkap mengenai mutasi dan efek yang ditimbulkannya.

Dua pemangku kepentingan, yaitu ketua MKKS dan perwakilan media lokal, menyatakan bahwa kebijakan seleksi guru yang tidak ketat merupakan persoalan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Dompus dan berkaitan erat dengan rendahnya kualitas guru. Ketua MKKS

menggarisbawahi persoalan terkait guru-guru yang tidak memiliki kualifikasi yang baik untuk mengajar meskipun mereka telah lolos sertifikasi. Hal ini terjadi karena ada proses yang tidak berjalan dengan benar dalam perekrutan dan pengangkatan guru.<sup>14</sup> Perwakilan media lokal menambahkan bahwa kualitas guru yang rendah berkaitan dengan kewenangan sekolah untuk merekrut langsung GTT. Kewenangan ini berakibat pada standar kualitas GTT terekrut tidak terkendali. Perwakilan media lokal juga menyayangkan kebijakan nasional tentang pengangkatan guru honorer kategori 2 (K2) menjadi PNS yang dipandanginya tidak mempertimbangkan kualitas K2 sebagai guru.

Seorang anggota Dewan Pendidikan menyampaikan persoalan tentang guru-guru yang ia nilai tidak kreatif dalam mengajar karena terlalu terpaku pada kurikulum. Anggota Dewan Pendidikan tersebut menyayangkan rendahnya kualitas guru karena, menurutnya, hal ini merupakan pemborosan anggaran negara. Mutu guru tidak berbanding lurus dengan besarnya pengeluaran negara untuk sertifikasi guru. Perwakilan media lokal menyampaikan persoalan tentang guru-guru yang mengajar sekadar untuk memenuhi target minimum jumlah jam mengajar demi kepentingan sertifikasi. Dengan kata lain, guru mengajar hanya untuk memenuhi kewajiban. Ketua MKKS Kabupaten Dompu pun mengemukakan bahwa para guru tidak memanfaatkan sertifikasi yang mereka peroleh untuk peningkatan profesionalisme mereka. Kemauan para guru untuk belajar (sangat) kurang, padahal mereka sudah memiliki tunjangan profesional yang seharusnya mereka manfaatkan untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai guru.

Ketua LSM We Save berpendapat bahwa lemahnya penguasaan guru atas metode pengajaran membuat guru tidak kreatif dalam mengajar. Akibatnya, alih-alih belajar dengan cara yang menyenangkan, murid-murid justru merasa stres saat belajar. Kurang kreatifnya guru dalam mengajar bisa juga karena guru-guru kurang mendapatkan pelatihan dan penyegaran. Satu pemangku kepentingan, yakni perwakilan media lokal, mencermati hal ini. Perwakilan media lokal ini menambahkan bahwa walaupun ada pelatihan guru, jumlah pelatihannya sedikit. Selain itu, guru-guru yang dikirim untuk mengikuti pelatihan tersebut biasanya cenderung orang yang sama.<sup>15, 16</sup>

Selain itu, ketua MKKS menegaskan bahwa rendahnya kualitas pengajaran guru disebabkan para guru sering kali tidak membuat persiapan pengajaran. Menurut ketua MKKS yang juga kepala sekolah salah satu SMPN di Kecamatan Woja, para guru kurang membaca atau 'sering meninggalkan buku'. Selain minimnya pelatihan dan penyegaran, kurikulum yang berubah-ubah membuat guru-guru kesulitan menyampaikan materi pelajaran sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh murid. Komite sekolah SMPN A yang menyatakan hal tersebut kebetulan berprofesi sebagai guru dan bertugas di salah satu sekolah swasta di Dompu.

Minimnya pelatihan bagi para guru juga berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendidikan daerah yang belum baik. Hal ini disampaikan oleh perwakilan media lokal yang menyoroti penggunaan anggaran daerah untuk belanja pegawai. Ada indikasi bahwa pelatihan bagi guru terabaikan karena anggaran daerah habis untuk belanja pegawai, yakni 60% belanja pegawai dan 40% belanja modal.<sup>17</sup> LSM Lensa NTB Dompu juga menekankan pentingnya pemantauan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan daerah tersebut.

---

<sup>14</sup>Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menelusuri isu proses perekrutan dan pengangkatan guru yang tidak berjalan dengan benar ini supaya dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang persoalan kualitas guru di Kabupaten Dompu.

<sup>15</sup>Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menelusuri penyebab pelatihan guru hanya diikuti guru-guru yang sama.

<sup>16</sup>Pengalaman perwakilan media lokal yang pernah menjadi guru honorer sebelum beralih profesi sebagai wartawan membuatnya dapat memberikan banyak sisi pandang tentang isu pendidikan di Kabupaten Dompu kepada tim peneliti.

<sup>17</sup>Perlu penelusuran lebih lanjut untuk melihat kaitan langsung antara alokasi belanja daerah dan terabaikannya pelatihan bagi guru terutama karena penelitian ini tidak secara khusus mencermati anggaran belanja pemda.

Persebaran guru tidak merata. Empat dari lima belas pendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan menyatakan bahwa persebaran guru (berkualitas) yang tidak merata memengaruhi kualitas pendidikan tingkat SD dan SMP di Kabupaten Dompu. Ketua MKKS menyampaikan tentang adanya wacana bupati yang hendak langsung memimpin upaya pemerataan guru di seluruh Kabupaten Dompu. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan persebaran guru yang tidak merata sangat penting dan mendesak untuk ditangani.

Ketua MKKS dan koordinator LSM World Relief mengemukakan bahwa guru-guru yang berkualitas tidak terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Dompu. Ketua Dewan Pendidikan menyatakan bahwa rata-rata tenaga pendidik tidak bersedia ditempatkan di daerah pinggiran, seperti halnya guru perempuan yang memilih ditempatkan di wilayah tempat suami mereka bekerja. Ketua Dewan Pendidikan menambahkan bahwa rata-rata guru PNS memilih mengajar di wilayah-wilayah perkotaan.

Sekolah dituntut untuk memenuhi target kelulusan. Media lokal dan LSM We Save menekankan persoalan tentang kepala sekolah dan guru-guru yang dituntut untuk memenuhi target kelulusan 100%. Tuntutan ini memaksa para guru untuk meluluskan atau menaikkan murid-murid meskipun mereka belum memenuhi ketuntasan belajar.<sup>18</sup> Ketua MKKS, perwakilan media lokal, dan LSM We Save menganggap persoalan nilai ujian yang didongkrak ini sebagai persoalan besar terkait pendidikan di Kabupaten Dompu. Kelulusan semata-mata menjadi target daerah dan sekolah yang harus dipenuhi. Anggota Dewan Pendidikan menyampaikan keprihatinannya karena kebutuhan murid untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tampak makin terpinggirkan dengan adanya kewajiban untuk memenuhi target kelulusan tersebut. Murid-murid pun tidak lagi memiliki kekhawatiran tidak lulus ujian akhir karena mereka tahu bahwa mereka pasti (di)lulus(kan).

Peraturan daerah berganti/tidak dijalankan seiring pergantian pemimpin daerah. Satu pemangku kepentingan, yakni LSM Lensa NTB Dompu, mencermati persoalan tentang peraturan daerah yang berubah seiring pergantian kepemimpinan daerah tersebut. Sebagai contoh, saat kepemimpinan bupati dua periode sebelumnya, terdapat peraturan bupati tentang layanan pendidikan dan kesehatan gratis. Pendidikan gratis ini khusus untuk SMA dan sederajat. Ketika bupati berganti, peraturan tersebut serta-merta tidak berlaku.

Tidak ada forum khusus untuk mendiskusikan masalah pembelajaran. Para perwakilan orang tua murid dari dua sekolah sampel, yakni SDN A dan SMPN B, menyampaikan persoalan tentang ketiadaan forum khusus yang membicarakan masalah pembelajaran. Tidak ada forum khusus yang melibatkan orang tua dan komite sekolah. Tidak ada forum khusus yang diadakan di tingkat desa untuk membicarakan masalah pembelajaran anak-anak. Ketidadaan forum khusus ini menunjukkan masih lemahnya sinergi antarpemangku kepentingan di bidang pendidikan di Kabupaten Dompu. Isu tentang lemahnya sinergi antara organisasi lokal pemerhati pendidikan dan Dinas Dikpora disampaikan oleh LSM We Save. LSM We Save menyatakan bahwa mereka mengalami penolakan dari Dinas Dikpora ketika hendak membangun jejaring bersama.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Hal ini tampaknya dipandang sebagai salah satu masalah pembelajaran ketika upaya pemenuhan target tersebut membuat KBM mengesampingkan fakta bahwa murid memiliki tingkat pemahaman materi yang berbeda-beda. Karena semata-mata untuk memenuhi target kelulusan, tidak terlihat adanya upaya yang komprehensif untuk membangun sistem belajar yang bersahabat bagi murid-murid yang memiliki kebutuhan khusus.

<sup>19</sup>Perlu penelusuran lebih lanjut untuk memahami situasi yang dialami oleh LSM We Save, mengingat LSM ini, berdasarkan penuturan ketuanya, mendapatkan dukungan yang sangat baik dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berdasarkan hasil wawancara tim peneliti dengan ketua LSM We Save, lembaga ini memiliki nilai-nilai khusus yang sangat spesifik bagi komunitas mereka yang mewarnai KBM mereka dengan anak-anak.

Konflik sosial menghambat akses murid ke sekolah. Dua dari lima belas pemangku kepentingan, yakni ketua MKKS dan perwakilan media lokal, menyatakan bahwa akses murid ke sekolah dapat terhambat oleh konflik sosial. Konflik sosial yang dimaksud adalah konflik antardesa, yakni antara dua desa tetangga. Konflik ini membuat guru dan murid kesulitan untuk mencapai sekolah karena jalanan menuju sekolah tidak dapat dilalui; kedua pihak yang bertikai selama sehari-hari 'menduduki' wilayah tersebut. Salah satu pemangku kepentingan bahkan menyebutkan bahwa konflik antardesa ini memengaruhi tingginya angka putus sekolah SD dan SMP.

#### **d) Kelompok Murid<sup>20</sup>**

Hal-hal penting mengenai pendidikan yang disampaikan oleh kelompok murid SD dan SMP berkisar pada poin-poin berikut: (i) alasan mereka bersekolah di sekolah sampel, (ii) pelajaran yang murid sukai dan tidak sukai, (iii) cara murid belajar di sekolah, (iv) cara murid belajar di rumah, (v) akses murid terhadap pelajaran tambahan, (vi) harapan murid terkait kelanjutan pendidikan, dan (vii) perubahan yang terjadi di sekolah sampel. Tim peneliti mengelompokkan pendapat murid SD dan murid SMP secara terpisah.<sup>21</sup>

#### **(1) Kelompok Murid SD**

Alasan bersekolah di sekolah sampel. Rata-rata murid peserta diskusi kelompok menyatakan bahwa orang tua yang memilih sekolah bagi mereka. Ada juga yang menyatakan memilih sendiri, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Pertimbangan utama orang tua menyekolahkan anak-anak mereka ke dua sekolah sampel ini adalah jarak antara rumah dan sekolah yang dekat (atau sekolah sampel adalah SD terdekat dari rumah). Selain itu, pertimbangan penting lainnya adalah faktor keamanan, terutama untuk SDN A. Keberadaan sekolah ini membuat anak-anak yang masih usia SD tidak perlu lagi menyeberang jalan besar yang ramai kendaraan untuk mencapai sekolah.

Para murid SD menyatakan bahwa mereka suka bersekolah di SD sampel karena guru-guru mereka baik-baik, guru-guru suka bercanda (tidak galak), dan ada banyak teman bermain di sekolah. Dari empat kelompok wawancara murid SD, hanya kelompok murid perempuan (di dua SD sampel) menyebutkan bahwa mereka senang bersekolah di SD sampel karena sekolah dekat dari rumah dan bangunan sekolah mereka bagus, bahkan makin hari makin bagus. Hanya satu kelompok wawancara murid, yakni murid laki-laki dari SDN A, menyatakan bahwa mereka suka bersekolah di SD sampel karena senang mengerjakan PR yang diberikan oleh para guru dan karena ada pelajaran olahraga di sekolah.

Pelajaran yang disukai dan tidak disukai. Para murid menyatakan bahwa mereka menyukai pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, PAI, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).<sup>22</sup> Murid-murid

---

<sup>20</sup>Kecuali SDN B, rata-rata murid yang mengikuti wawancara kelompok dipilih dan disiapkan oleh pihak sekolah untuk menjadi peserta kegiatan pengumpulan data yang dipandu oleh tim peneliti. Murid-murid ini merupakan murid berprestasi atau punya *ranking*. Kehadiran para murid peserta wawancara kelompok murid di SDN B yang tidak terseleksi terlebih dulu justru memberikan gambaran lapangan yang melengkapi temuan tim peneliti. Dua dari empat murid peserta wawancara kelompok murid perempuan SDN B tergolong murid yang lemah dalam pelajaran atau tertinggal dari teman-teman sekelasnya. Dua murid ini belum lancar berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Satu dari lima murid peserta wawancara kelompok murid laki-laki SDN B tergolong mereka yang tertinggal dalam hal capaian hasil belajar.

<sup>21</sup>Selain itu, tim peneliti juga mengelompokkan pendapat murid SD dan SMP berdasarkan jenis kelamin murid meskipun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada murid tidak dirancang secara khusus untuk penggalian informasi berbasis gender.

<sup>22</sup>Dalam wawancara kelompok dengan murid laki-laki SDN B, satu peserta dengan sigap menjadi penerjemah bagi tim peneliti dan teman-teman peserta itu. Peserta ini termasuk murid terpandai di kelasnya. Peserta lain lebih sering menggunakan bahasa daerah ketika menjawab pertanyaan peneliti meskipun peneliti berkali-kali menjelaskan bahwa

yang menyukai Matematika menyatakan bahwa mereka menyukai pelajaran ini karena mendapat pengajaran perkalian, penambahan, dan pengurangan. Pelajaran IPA disukai karena dalam pelajaran ini murid-murid dapat belajar tentang berbagai bentuk zat/benda dan tumbuh-tumbuhan. PAI disukai karena pelajaran ini membuat para murid bisa mengaji dan membuat hati tenang.

Mereka yang menyukai Bahasa Indonesia merasa senang karena dalam pelajaran ini murid-murid diajar menulis dan membaca. Bahasa Indonesia membuat mereka dapat mengenal budaya dan berbicara dengan guru-guru yang tidak bisa berbahasa daerah. Yang dimaksud dengan guru-guru yang tidak dapat berbahasa daerah adalah tim peneliti. Dari 24 murid peserta wawancara kelompok, ada satu murid laki-laki yang menyatakan senang dengan Bahasa Indonesia karena bermanfaat untuk mengajari adiknya dalam belajar. Dari 24 murid peserta wawancara kelompok murid, hanya satu murid, yaitu murid perempuan, mengatakan bahwa dengan menguasai bahasa Indonesia, ia dapat mengikuti berbagai lomba, misalnya lomba mengaji dan ceramah yang dilaksanakan di sekolah dan masjid di lingkungan rumahnya.

Semua murid SD peserta wawancara kelompok menyatakan bahwa dalam KBM, para guru menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara bergantian. Murid-murid peserta diskusi kelompok menceritakan tentang kawan-kawan mereka sesama murid yang belum paham atau tidak mahir menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, ada juga murid yang kesulitan memahami Matematika. Mereka yang kesulitan dalam dua pelajaran ini adalah murid perempuan dan murid laki-laki. Namun, para murid peserta wawancara kelompok menekankan bahwa lebih banyak murid laki-laki yang mengalami kesulitan dalam dua pelajaran tersebut.

Murid-murid menyebutkan empat mata pelajaran yang tidak disukai, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Seni, Budaya, dan Keterampilan (SBK). Sebagian besar murid laki-laki peserta wawancara kelompok dari SDN B menyatakan bahwa mereka tidak menyukai Bahasa Indonesia. Namun, mereka tidak dapat menyebutkan alasan mengapa mereka tidak menyukai pelajaran itu.

Dua dari empat kelompok murid yang mengikuti wawancara, yakni murid laki-laki dan murid perempuan SDN A, menyatakan bahwa mereka tidak menyukai SBK. Alasan mereka tidak menyukai SBK berbeda. Kelompok murid laki-laki tidak menyukai SBK karena mereka tidak terlalu suka menggambar dan bernyanyi yang membuat mereka "Capek!". Kelompok murid perempuan tidak menyukai SBK karena mereka lebih senang menyanyi, sedangkan SBK lebih banyak tentang menggambar. Selain itu, murid-murid perempuan tidak menyukai SBK karena mereka sering diganggu murid-murid laki-laki saat menggambar hingga buku gambar murid perempuan robek dan pensil mereka berceceran.

Hanya satu dari 24 murid peserta wawancara kelompok menyatakan tidak menyukai IPS. Yang membuat murid perempuan ini tidak menyukai IPS bukanlah materi pelajarannya tetapi karena guru tidak membolehkan murid-murid menulis dengan menggunakan huruf kapital semua. Si murid ini terbiasa menulis dengan menggunakan huruf kapital. Dua dari 24 murid peserta wawancara kelompok menyatakan bahwa mereka tidak menyukai Matematika. Dua murid ini adalah murid-murid perempuan yang tergolong tertinggal di kelas mereka. Ketertinggalan dua murid perempuan ini dalam hal capaian pendidikan, termasuk literasi dan numerasi, diungkapkan oleh teman-teman mereka baik yang ada dalam wawancara kelompok murid perempuan maupun yang ada dalam wawancara kelompok murid laki-laki. Dua murid ini tidak

---

sebaiknya mereka menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia. Akibatnya, satu peserta tersebut selalu menerjemahkan pertanyaan peneliti dan jawaban teman-temannya.

menyukai Matematika karena mereka tidak bisa mengerjakan soal-soal terutama perkalian susun dan pembagian.

Dua dari 24 murid peserta wawancara kelompok menyatakan tidak menyukai IPA. Mereka adalah murid perempuan dari SDN B yang termasuk murid dengan *ranking* teratas di kelas mereka. Dua murid ini tidak menyukai IPA karena menurut mereka IPA merupakan pelajaran yang sulit. Meskipun mereka tidak menyukai IPA, nilai yang mereka peroleh untuk mata pelajaran ini tetap bagus, yakni minimal 70.

Sebagian besar dari peserta wawancara kelompok murid laki-laki SDN A menyampaikan bahwa mereka menyukai Matematika dan Bahasa Indonesia. Mereka menyukai Matematika karena dalam pelajaran ini mereka diajarkan tentang berhitung, perkalian, pertambahan, dan pengurangan. Sebagian murid menyukai Bahasa Indonesia; selebihnya tidak. Murid-murid menyukai Bahasa Indonesia karena pelajaran ini mudah, mereka mendapat pelajaran mengarang, dan mereka dapat mendengarkan cerita serta membaca puisi, selain diberi tugas untuk menuliskan apa yang tercantum di papan tulis. Alasan sebagian murid tidak menyukai Bahasa Indonesia sama dengan alasan murid-murid menyukai Bahasa Indonesia.

Para murid yang mengikuti wawancara kelompok murid SD menyebutkan bahwa guru yang mengajar (hampir) semua mata pelajaran adalah guru kelas mereka. Mata pelajaran yang biasanya memiliki pengampu tersendiri adalah olah raga dan PAI. Tinggi rendahnya nilai pelajaran yang dicapai oleh para murid tidak berkaitan dengan siapa guru yang mengampu pelajaran tersebut (apakah murid menyukai guru tersebut atau tidak), tetapi lebih dengan kemampuan para murid. Murid-murid tidak menyukai guru yang sering marah meskipun kemarahan itu karena murid-murid melakukan kesalahan, seperti tidak mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh.

Murid-murid SD umumnya menyukai guru yang tidak pemarah, lucu atau suka humor, tidak suka menghukum, dan sabar saat menerangkan pelajaran. Murid-murid perempuan SDN B menyampaikan bahwa guru-guru biasanya mengajar dengan cara menuliskan soal-soal di papan tulis.<sup>23</sup> Kemudian, mereka meminta para murid secara bergantian maju ke depan untuk mengerjakan atau menjawab soal tersebut. Guru akan menerangkan kembali materi pelajaran kepada murid-murid yang tidak dapat mengerjakan soal. Ada kalanya guru meminta murid yang pandai untuk membantu menerangkan cara menjawab soal kepada murid yang kurang pandai.

Murid-murid perempuan SDN A yang menjadi peserta wawancara kelompok murid menyebutkan bahwa ada kalanya guru-guru marah, lalu menghukum para murid. Guru akan memukul pantat atau tangan murid yang malas dengan menggunakan penggaris kayu. Murid-murid ini juga menyebutkan beberapa aturan yang berlaku bagi murid kelas 5. Salah satu aturan tersebut menyatakan bahwa jika ada satu murid melakukan kesalahan, semua murid akan menerima hukuman. Contohnya, ruang kelas 5 baru saja selesai dibersihkan oleh murid-murid perempuan. Muncul seorang murid laki-laki yang masuk kelas dan mengotori kelas tersebut. Maka, semua murid, termasuk mereka yang baru saja membersihkan kelas, akan menerima hukuman. Berikut beberapa aturan lainnya yang disampaikan oleh murid-murid perempuan: (i) tidak boleh merusak lingkungan, (ii) tidak boleh membuang sampah sembarangan, (iii) tidak boleh mencoret-coret dinding tembok, dan (iv) tidak boleh merusak buku-buku pelajaran atau poster-poster. Mereka yang merusak buku atau poster harus membayar denda sebesar Rp1.000.

---

<sup>23</sup>Seorang murid rata-rata memiliki dua buku tulis untuk setiap mata pelajaran. Satu buku untuk catatan dan satu buku untuk latihan soal-soal.

Cara murid belajar di sekolah. Murid-murid menyukai guru yang rajin mengulangi penjelasannya ketika murid-murid belum memahami materi yang diterangkan. Rata-rata guru menuliskan materi pelajaran di papan tulis dan murid-murid menyalin materi tersebut ke buku catatan masing-masing. Selain menulis materi pelajaran di papan tulis dan menjelaskannya kepada murid-murid, guru beberapa mata pelajaran, misalnya Matematika dan IPA, menggunakan media atau alat peraga saat menerangkan pelajaran. Yang dimaksud dengan alat peraga adalah gambar-gambar atau poster-poster yang ada di dinding kelas atau gambar yang dibuat sendiri oleh guru di papan tulis.

Para murid mengungkapkan bahwa mereka tidak menyukai guru yang terus-menerus menulis di papan tulis dan meminta murid menyalin materi yang tertulis di papan tulis tanpa memberikan penjelasan. Ada kalanya guru memberikan PR bagi murid. Para peserta menyatakan bahwa mereka senang mengerjakan PR daripada duduk diam atau bermain saja; menurut mereka, lebih baik belajar dengan cara menyelesaikan PR. Biasanya, murid laki-laki tidak mengerjakan PR dengan alasan lupa.

Guru yang berhalangan hadir akan digantikan oleh guru pengganti. Guru PNS yang berhalangan hadir akan digantikan oleh GTT. Guru tidak hadir biasanya karena sedang ditugaskan oleh sekolah untuk mengikut pelatihan atau ada peristiwa penting, seperti kematian anggota keluarga guru tersebut. Guru pengganti belum tentu memberikan pelajaran yang sama. Jika tidak ada guru pengganti, murid-murid akan melakukan berbagai kegiatan, seperti (i) bermain di dalam kelas, (ii) bermain bola kasti di luar kelas, dan (iii) membaca buku (di perpustakaan). Murid laki-laki cenderung lebih sering ribut sendiri atau bermain-main dibandingkan dengan murid perempuan ketika guru tidak hadir dan tidak ada guru pengganti. Murid-murid perempuan peserta wawancara kelompok SDN A menceritakan bahwa jika tidak ada guru pengganti di kelas, murid perempuan biasanya membersihkan ruang kelas dan murid laki-laki lebih banyak bermain-main.

Jika kurang memahami penjelasan guru, murid-murid akan bertanya kembali supaya guru mengulang penjelasannya. Menurut peserta diskusi kelompok murid, guru akan menjelaskan kembali jika murid bertanya dengan baik-baik. Guru juga sering meminta murid-murid yang tergolong pandai di kelasnya untuk membantu murid-murid lain yang mengalami kesulitan saat belajar di sekolah. Rata-rata peserta wawancara kelompok murid SD perempuan pernah mendapat tugas dari guru untuk menolong teman sekelas mereka yang sulit memahami materi pelajaran. Dari semua murid laki-laki peserta wawancara kelompok murid SD, hanya satu murid dari SDN B menyatakan bahwa guru sering menugaskannya untuk membantu teman-teman sekelasnya yang memerlukan bantuan dalam memahami pelajaran.

Tugas membantu teman sekelas ini berlangsung baik selama jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Murid-murid yang lebih cepat mengerti ini tidak hanya membantu menerangkan ulang materi pelajaran (menjelaskan kembali tentang Matematika), tetapi juga membantu teman-teman mereka dalam berlatih membaca supaya segera lancar membaca.<sup>24</sup> Murid-murid perempuan menyatakan bahwa mereka sering merasa kesal karena lelah membantu menerangkan pelajaran, sementara teman sekelas yang mereka dampingi tidak mau belajar.

Cara murid belajar di rumah. Mereka belajar di rumah jika ada PR dari guru. Meskipun demikian, ada juga murid yang menyatakan bahwa ia selalu belajar di rumah setiap hari. Biasanya, waktu

---

<sup>24</sup>Baik murid SDN A maupun murid SDN B menyatakan bahwa masih saja ada murid-murid kelas 5 yang belum lancar calistung. Selain itu, di antara murid kelas 5 SDN B, terdapat murid-murid berkebutuhan khusus, yakni murid yang tidak dapat berbicara dan murid yang lambat memahami pelajaran. Pengelola SDN A menyediakan buku-buku untuk dibawa pulang oleh murid yang belum lancar membaca. Murid dapat meminjam buku tersebut selama satu hari.

belajar di rumah mulai pukul 6 sore hingga pukul 9 malam. Seorang murid menceritakan bahwa belajar di rumah merupakan keharusan. Jika ia tidak belajar, ibunya akan memukulnya. Selain belajar, murid-murid perempuan biasanya melakukan kegiatan lain di rumah sepulang dari sekolah. Murid-murid perempuan rata-rata mendapat tugas membantu ibu mereka mengerjakan pekerjaan pengasuhan dan perawatan (*care work*), yakni menjaga adik, membersihkan rumah, atau mencuci piring. Murid-murid mengakui bahwa mereka tidak selalu mengerjakan sendiri PR yang diberikan oleh guru. Ada saja murid yang mengerjakan PR di sekolah dan menyontek jawaban PR dari teman sekelas yang lebih pandai.

Hampir semua murid belajar sendiri di rumah tanpa bantuan orang tua mereka. Orang tua murid rata-rata sibuk bekerja atau mempunyai kesibukan lain, seperti mengasuh anggota keluarga yang masih bayi. Ada juga murid yang kadang-kadang didampingi oleh ibu, bapak, atau kakak perempuan mereka saat belajar. Lain halnya dengan murid-murid yang tinggal di bawah asuhan kakek nenek mereka. Mereka yang tidak tinggal bersama orang tua mau tidak mau harus belajar sendiri karena kakek-nenek mereka tidak dapat membantu menerangkan pelajaran sekolah.

Murid-murid merasa perlu didampingi saat belajar di rumah terutama ketika mereka menjumpai soal yang tidak bisa mereka jawab, misalnya soal matematika. Jika mengalami kesulitan dalam belajar, ada murid yang meminta bantuan kepada ibu, bapak, atau kakak perempuan. Seorang murid perempuan menyatakan lebih suka meminta bantuan kepada orang tuanya daripada kepada kakak laki-lakinya karena kakaknya pemarah. Ada juga murid yang ketika mengalami kesulitan belajar berusaha mengatasinya dengan cara belajar bersama dengan adik sepupu atau tetangga yang berada di tingkatan kelas yang sama.

Belum ada murid yang memiliki telepon genggam. Komunikasi dilakukan dengan tatap muka. Murid-murid SD sampel rata-rata tinggal dekat dengan SD tersebut. Oleh karena itu, para murid terbiasa untuk langsung bertandang ke rumah teman kelasnya jika mereka perlu berkomunikasi, misalnya untuk menentukan waktu untuk belajar kelompok atau ketika memerlukan bantuan teman sekelas mengerjakan PR. Meskipun belum ada murid yang memiliki telepon genggam, orang tua murid umumnya sudah memiliki telepon genggam.

Biasanya para murid meminjam telepon genggam orang tua mereka untuk bermain *game* atau supaya dapat menggunakan kalkulator. Murid-murid perempuan SDN A menyampaikan bahwa mereka belum mendapatkan izin untuk menggunakan telepon genggam karena orang tua mereka khawatir mereka akan menggunakan alat komunikasi ini untuk berpacaran seperti yang terjadi pada murid SMP dan SMA. Yang menarik adalah bahwa terdapat satu murid perempuan<sup>25</sup> dari SDN di Woja yang belum memiliki telepon genggam tetapi telah mempunyai akun Facebook. Kakak perempuan murid ini mengajarnya menggunakan Facebook. Melalui akun Facebook yang dimilikinya, murid perempuan ini mencari tahu berita tentang artis sinetron kesukaannya.

Belajar kelompok menjadi media komunikasi murid untuk mengerjakan tugas dari guru. Namun, murid-murid jarang melakukan belajar kelompok. Mereka belajar dalam kelompok hanya jika guru menugaskan. Anggota kelompok biasanya sudah dipilihkan oleh guru. Guru-guru mengelompokkan murid yang pintar dengan yang lambat belajar. Para murid laki-laki menyatakan bahwa mereka senang belajar kelompok karena mereka bisa sering bergurau dan tertawa-tawa saat belajar. Belajar kelompok dapat dilakukan di rumah dan di sekolah.

---

<sup>25</sup>Berdasarkan observasi tim peneliti dan informasi dari teman-teman sekelasnya, murid perempuan ini termasuk yang paling lemah di kelasnya dalam hal pembelajaran.

Biasanya, belajar kelompok dilakukan untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA. Murid-murid perempuan menyampaikan bahwa mereka lebih suka belajar kelompok dengan sesama murid perempuan. Hal ini karena murid laki-laki sering mengganggu saat belajar kelompok dan banyak bergurau. Akibatnya, yang bekerja hanya murid perempuan. Selain belajar kelompok, ada juga tugas kelompok. Tugas kelompok tidak terlalu terkait dengan pelajaran. Murid-murid perempuan SDN A mendapat tugas kelompok dari guru kelas, yakni mengumpulkan alat kebersihan, misalnya sapu lidi, atau mengumpulkan uang untuk keperluan kelas. Uang yang terkumpul akan dibelanjakan oleh guru kelas untuk keperluan kelas.

Akses atas pelajaran tambahan. Hingga saat ini tidak ada pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh sekolah. Tidak ada pula pelajaran tambahan bagi murid yang difasilitasi oleh orang tua murid. Semua murid perempuan menyatakan membutuhkan pelajaran tambahan, terutama untuk Matematika. Mereka ingin menjadi makin pintar. Ada murid perempuan yang merasa baik-baik saja jika harus belajar di sore hari di rumah guru mereka atau di sekolah, tetapi ada juga yang tidak mau. Lain halnya dengan murid laki-laki. Hampir semua murid laki-laki beranggapan bahwa mereka tidak membutuhkan pelajaran tambahan. Mereka tidak mau kembali ke sekolah seandainya ada guru yang menyuruh mereka datang setelah jam sekolah untuk belajar lagi.

Harapan murid terkait kelanjutan pendidikan. Dari semua murid peserta wawancara kelompok, hanya satu murid menyatakan tidak akan melanjutkan sekolah. Murid yang tidak ingin melanjutkan sekolah ini adalah murid perempuan yang sehari-hari tinggal bersama dengan kakek dan neneknya karena orang tuanya berpisah. Murid perempuan ini menyatakan akan langsung bekerja setelah lulus SD. Alasan ia hendak langsung bekerja adalah supaya bisa membantu meringankan beban orang tua.

Murid-murid lain menyatakan akan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka ingin melanjutkan sekolah karena bercita-cita menjadi dokter, polisi, atau tentara. Rata-rata para murid ingin melanjutkan sekolah ke SMP yang dekat dengan desa mereka atau SMP yang statusnya satu atap dengan SD mereka. Di antara semua murid yang ingin melanjutkan ke SMP ini, hanya satu murid yang belum tahu hendak melanjutkan ke SMP mana.

Selain alasan jarak yang tidak terlalu jauh dari rumah, murid-murid ingin melanjutkan sekolah ke SMP tertentu karena sekolah tersebut memiliki lingkungan yang bersih, nyaman untuk belajar, atau ada saudara kandung yang bersekolah di sekolah tersebut. Ada juga yang ingin mendaftar ke SMP yang tidak berlokasi dekat dari SD sampel karena bosan berada di lingkungan yang sama dan ingin mempunyai kawan baru.

Perubahan yang terjadi di sekolah sampel. Para murid, terutama murid perempuan, mencermati berbagai perubahan fisik yang terjadi pada sekolah mereka. Murid-murid SDN B mencermati hal-hal berikut. Dinding ruang kelas mereka kini dihiasi satuan volume (contoh, bangun ruang) dan kalimat-kalimat peribahasa. Ada juga kalimat bijak dalam bahasa daerah. Murid-murid menyebutkan nama salah satu guru, yakni guru kelas, yang membuat gambar-gambar tersebut. Murid-murid juga mencermati perubahan pada bahan pagar sekolah. Mulai tahun ajaran 2016/2017, pagar sekolah yang semula dari kayu/bambu kini telah berganti menjadi tembok yang dilengkapi dengan pintu gerbang besi.

Selain itu, murid laki-laki SDN B menyampaikan bahwa ketika mereka kelas 1, mereka belajar di ruang perpustakaan. Kini murid-murid kelas 1 telah memiliki ruang belajar sendiri. Karena ruang perpustakaan sudah bisa dimanfaatkan, murid-murid sering ke perpustakaan untuk membaca buku termasuk ketika ada jam kosong karena guru tidak datang mengajar. Terlepas dari berbagai perubahan baik tersebut, murid-murid menyampaikan bahwa WC murid rusak. Jika hendak

buang air kecil atau buang air besar, murid-murid terpaksa pergi ke sungai yang letaknya tidak jauh dari sekolah. Para murid menyatakan tidak menyukai hal ini karena tepian sungai itu rimbun dengan semak-semak.

Lain halnya dengan murid-murid dari SDN A. Tidak ada murid laki-laki yang menyampaikan informasi tentang perubahan yang terjadi di sekolah. Sebaliknya, semua murid perempuan peserta wawancara kelompok mencermati perubahan signifikan di sekolah mereka, yakni ruang kantor dan tembok pagar (meski belum mengelilingi sekolah). Selain merasa senang dengan perubahan baik di sekolah mereka, murid-murid perempuan bercerita bahwa sekolah mereka ini kerap dilanda banjir. Mereka menyampaikan bahwa pernah terjadi dua banjir yang menyebabkan tembok sekolah retak dan ambruk. Air pun masuk ke sekolah hingga ke ruang-ruang kelas. KBM pun ditiadakan dan diganti dengan kerja bakti yang melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan para murid untuk membersihkan sekolah.

## **(2) Kelompok Murid SMP**

Alasan bersekolah di sekolah sampel. Alasan paling umum mengapa murid-murid SMP peserta wawancara kelompok memilih bersekolah di SMP sampel adalah pilihan/saran orang tua dan jaraknya yang dekat dari rumah. Jarak sekolah yang relatif dekat membuat murid-murid dapat mencapai sekolah dengan berjalan kaki saja. Waktu tempuh tercepat dari rumah murid ke sekolah sampel adalah lima menit. Di antara murid-murid peserta wawancara kelompok, hanya ada satu murid perempuan yang rumahnya agak jauh dari sekolah. Waktu tempuh dari rumah murid tersebut ke sekolahnya, yakni SMPN A, adalah 60 menit.

Beberapa alasan lain yang disampaikan oleh murid adalah (i) terdapat kegiatan olahraga voli di sekolah, (ii) terpaksa masuk sekolah sampel karena tidak diterima di sekolah favorit yang diinginkan, (iii) mengikuti orang tua yang merantau dari Jawa Timur ke Dompu, dan (iv) mengikuti kakak perempuan yang pindah dari Jawa Barat untuk mengikuti suaminya yang orang Dompu. Selain itu, status sekolah sampel yang merupakan sekolah negeri juga menjadi alasan penting mengapa orang tua murid-murid ini menyarankan anak-anak mereka bersekolah di sekolah sampel. Seorang murid perempuan mengatakan bahwa dengan bersekolah di sekolah negeri, ia tidak akan kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Semua murid menyatakan senang bersekolah di sekolah sampel. Alasan yang paling umum disampaikan adalah (i) jarak rumah dan sekolah dekat, (ii) guru-guru sekolah sampel baik dan tidak terlalu 'keras' saat menghukum, dan (iii) tidak ada guru yang galak. Alasan yang lebih spesifik disampaikan oleh murid laki-laki SMPN B yang merasa suka bersekolah di sekolah sampel ini adalah karena lingkungan sekolah bersih dan aman. Berkaitan dengan lingkungan sekolah, murid laki-laki SMPN A menyukai lingkungan sekolahnya yang nyaman dan tidak berisik. Sementara itu, dua murid perempuan SMPN B yang merupakan murid pindahan dari Pulau Jawa menyebutkan bahwa situasi sekolah sampel sebetulnya sama saja dengan sekolah mereka yang lama. Namun, mereka senang belajar di sekolah sampel karena mendapat teman-teman baru dan bisa belajar bahasa daerah lain.

Pelajaran yang disukai dan tidak disukai. Para murid laki-laki SMPN B menyukai mata pelajaran yang berbeda-beda. Pelajaran-pelajaran tersebut adalah Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes), Keterampilan, Biologi, serta Seni dan Budaya. Bahasa Indonesia disukai karena gurunya tidak galak dan memberikan perhatian kepada murid. Murid yang menyukai Penjaskes mengatakan bahwa pelajaran itu membuatnya sehat. Murid ini senang karena dalam Penjaskes guru menjelaskan tentang berbagai macam cabang olahraga. Pelajaran Keterampilan disukai karena guru pengampu pelajaran mengajarkan, antara lain, cara menganyam dan membuat gantungan kunci. Murid-murid menyampaikan bahwa cara guru

mengajar yang santai, menarik, dan mudah dipahami membuat mereka menyukai Biologi. Selain itu, guru Biologi sering mengajak murid-murid keluar kelas untuk belajar dari lingkungan sekitar sekolah.

Hampir semua murid perempuan SMPN B peserta wawancara kelompok menyukai Bahasa Indonesia. Alasannya, gurunya baik dan asyik, cara mengajarnya bagus, dan penjelasannya mudah dipahami. Alasan ini juga disampaikan murid-murid terkait mata pelajaran lain yang mereka sukai, yakni Bahasa Inggris dan Pendidikan Agama Islam (PAI). Hanya ada satu orang murid yang menyukai pelajaran Fisika. Selain karena guru Fisika pandai menyampaikan materi, murid tersebut menyukai Fisika karena pelajaran ini dianggapnya menantang.

Para murid laki-laki SMPN A memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang pelajaran yang mereka sukai. Berbagai mata pelajaran tersebut adalah Penjaskes, Seni dan Budaya, PAI, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Bahasa Inggris. Murid-murid menyukai Penjaskes karena meskipun ada teori yang diajarkan di dalam kelas, sebagian besar kegiatan pelajaran ini dilakukan di luar kelas. Pelajaran Seni dan Budaya disukai karena dalam pelajaran ini murid belajar tentang cara membuat batik dan patung. Salah satu murid menyukai PAI dengan alasan bahwa guru pengampu mengajarkan dan menyampaikan kisah-kisah nabi. Murid ini menyatakan betapa ia sangat suka belajar mengaji dengan melagukan bacaan Alquran. Bagi murid laki-laki, TIK termasuk pelajaran yang disukai karena dalam pelajaran ini guru memberikan penjelasan tentang jaringan dan komputer. Murid-murid juga mengatakan bahwa mereka menyukai Bahasa Inggris karena ingin segera mampu berbicara dalam bahasa Inggris.<sup>26</sup>

Para murid perempuan SMPN A mempunyai pelajaran kesukaan masing-masing dan pelajaran yang mereka sukai cukup beragam. Empat dari enam murid menyukai Biologi karena cara mengajar guru pengampu mata pelajaran tersebut membuat mereka mudah memahami pelajaran. Setidaknya, ada dua murid yang menyukai Bahasa Indonesia. Selain cara menerangkan guru pengampu yang sangat jelas, pelajaran ini disukai karena manfaatnya yang besar, yakni bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di sekolah. Dalam keseharian mereka, murid-murid lebih banyak menggunakan bahasa daerah. Matematika juga menjadi salah satu pelajaran yang disukai meskipun murid-murid masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan rumus-rumus tertentu. Pelajaran Matematika cukup membantu dua murid dalam melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Selain bersekolah, seorang murid berjualan keliling kampung sejak ia masih SD dan seorang murid lain bertugas menjaga warung yang dikelola orang tuanya di rumah mereka. Dua murid ini merasakan manfaat pelajaran Matematika dalam kegiatan jual beli.

Mata pelajaran yang tidak disukai kelompok murid laki-laki SMPN B adalah Biologi, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Murid yang tidak menyukai Biologi menyatakan bahwa ia kesulitan mengikuti penjelasan guru pengampu. Guru pengampu terlalu cepat berbicara saat menjelaskan materi sehingga si murid sulit menulis ulang penjelasan guru. Murid-murid laki-laki SMPN B tidak menyukai pelajaran Bahasa Inggris dengan alasan bahwa pelajaran ini cukup sulit dipahami, terutama percakapan dalam bahasa Inggris, padahal mereka menyukai cara guru pengampu mengajar yang santai dan tidak tegang. "Belajar ngomong itu yang sulit," kata beberapa murid. Hampir semua murid tidak menyukai PPKN. Para murid memiliki alasan yang seragam, yakni metode mengajar guru pengampu membosankan. Guru PPKN lebih banyak membaca teks dan jarang menjelaskan materi pelajaran. Murid-murid

---

<sup>26</sup>Tim peneliti agak meragukan beberapa jawaban yang disampaikan oleh kelompok murid laki-laki karena mereka terkesan sekadar menjawab pertanyaan peneliti. Hal ini karena setiap kali peneliti mengajukan pertanyaan untuk mengonfirmasi jawaban para murid, mereka memberikan respons yang tidak konsisten dengan jawaban yang mereka sampaikan sebelumnya.

pun disuruh menyalin kembali apa yang dibaca oleh guru pengampu ini. Guru bahkan meminta murid-murid bergantian menyalin isi buku teks di papan tulis. Mereka yang tidak menulis di papan tulis diwajibkan untuk menyalin catatan di papan tulis ke buku tulis masing-masing. Guru pun keluar kelas saat para murid menulis.

Ketidaksukaan terhadap PPKN juga dirasakan oleh para murid perempuan. Murid-murid perempuan tidak menyukai PPKN karena pelajaran ini sulit dimengerti dan guru pengampu selalu berbicara kasar. Rata-rata alasan pelajaran sulit dimengerti menjadi penyebab murid tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Mata pelajaran lain yang tidak disukai murid perempuan peserta wawancara kelompok adalah Matematika, Fisika, dan Bahasa Inggris. Khusus untuk Bahasa Inggris, murid tidak menyukai pelajaran ini karena cara membaca dalam bahasa ini sulit dan diperlukan waktu lama untuk mengartikan bacaannya. Fisika tidak disukai karena pelajaran ini sulit dimengerti dan murid harus banyak berhitung.

Meskipun tidak menyukai pelajaran-pelajaran tersebut, murid-murid perempuan SMPN B menyatakan bahwa PPKN bermanfaat karena membuat mereka mengenal negara-negara tetangga beserta sejarahnya. Salah satu murid beranggapan bahwa Matematika bermanfaat karena membantunya menghitung uang saat ayahnya berdagang bakso keliling. Bahasa Inggris dianggap tidak terlalu bermanfaat meskipun murid-murid mengakui bahwa guru pengampu mata pelajaran ini disiplin. Khusus untuk Fisika, murid-murid menilai bahwa manfaat pelajaran ini baru akan tampak di masa depan.

Kelompok murid laki-laki SMPN A tidak menyukai mata pelajaran IPS, Matematika, dan TIK. Mereka tidak menyukai IPS karena merasa grogi setiap kali diminta bergiliran membaca buku paket. Ketika satu murid membaca, murid-murid yang lain menuliskan apa yang mereka dengar di buku tulis. Murid-murid memang tidak mendapatkan buku paket. Murid-murid tidak menyukai Matematika karena mengalami kesulitan dalam berhitung dan guru terlalu cepat saat menjelaskan. Ketika mereka sedang menulis atau menuliskan materi yang baru dijelaskan guru, si guru sudah beralih ke materi selanjutnya. Guru pun terlalu serius saat mengajar dan tidak pernah bercanda. Murid-murid tidak menyukai TIK dengan alasan bahwa guru pengampu lebih banyak mendikte dan jarang menjelaskan materi pelajaran. Murid-murid terus saja diminta menyalin kata-kata yang didiktekan guru ke buku tulis masing-masing.

Semua murid perempuan SMPN A yang mengikuti wawancara kelompok menyatakan tidak menyukai pelajaran TIK. Para murid tidak menyukai pelajaran ini karena guru pengampu tidak dapat memberikan penjelasan yang jelas tentang materi pelajaran. Ketiadaan alat peraga makin membuat murid-murid sulit memahami teori yang disampaikan guru pengampu. Sejauh ini murid-murid belum merasakan manfaat pelajaran TIK. Meskipun tidak menyukai pelajaran yang sangat teoretis dan tidak ada praktiknya ini, belum ada murid-murid yang menyampaikan rasa tidak suka mereka ini baik kepada guru kelas maupun kepada kepala sekolah.

Meskipun tidak menyukai pelajaran-pelajaran tersebut, para murid beranggapan nilai mereka masih lumayan. Supaya tidak tertinggal dalam pelajaran yang tidak mereka sukai, para murid berusaha untuk tetap hadir mengikuti pelajaran, tetap mengerjakan PR, dan belajar dalam kelompok. Selain itu, murid-murid berusaha mendapatkan bantuan dari guru pengampu atau kakak mereka ketika kesulitan memahami pelajaran.

Cara murid belajar di sekolah. Para murid mengaku menyukai guru yang tidak suka marah-marah atau bisa diajak bercanda, menyukai kebersihan, sopan menghadapi murid, dan baik, tetapi tetap tegas. Selain itu, murid-murid menyukai guru yang mampu menjelaskan materi pelajaran dengan jelas sehingga mempermudah mereka memahami pelajaran. Murid-murid tidak menyukai guru yang terlalu cepat saat menjelaskan pelajaran, apalagi yang hanya sibuk

mendikte murid untuk mencatat tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang didiktekan. Guru yang disukai murid adalah guru yang selalu menjawab pertanyaan yang diajukan para murid. Murid-murid juga menyukai guru yang mengajar dengan memanfaatkan alat peraga atau membuat gambar-gambar saat menjelaskan pelajaran kepada para murid. Alat peraga dan gambar-gambar memudahkan murid dalam memahami isi pelajaran. Guru yang menggunakan alat peraga biasanya adalah guru Matematika dan guru IPS.

Semua kelompok murid peserta wawancara menyatakan bahwa guru-guru hampir tidak pernah absen mengajar. Ketika ada guru yang berhalangan mengajar, akan ada guru pengganti bagi kelas tersebut. Guru pengganti akan mengajar mata pelajaran yang sama dengan yang sudah dijadwalkan. Jika tidak ada guru pengganti, murid-murid tidak diperbolehkan pulang atau keluar kelas. Mereka tetap berada di dalam kelas dan bermain-main saja.

Cara murid belajar di rumah. Ketika mengalami kesulitan belajar di rumah, para murid meminta bantuan kepada orang tua (biasanya ibu), kakak (biasanya kakak perempuan), tetangga yang sama-sama masih SMP atau sudah tamat SMP. Murid-murid juga memanfaatkan belajar kelompok sebagai sarana mengatasi kesulitan memahami pelajaran ketika mereka tidak dapat mengandalkan siapapun di rumah untuk membantu mereka. Namun, ada juga murid yang harus mengandalkan diri sendiri ketika mengalami kesulitan dalam belajar. Ketika berhadapan dengan soal-soal yang sangat sulit, misalnya, murid ini membiarkan PR-nya tidak terjawab karena ia kesulitan mendapatkan bantuan. Murid-murid menyampaikan bahwa mereka senang dan selalu berusaha mengerjakan PR dari guru. Namun, mereka akan lebih senang lagi jika tidak ada PR dari guru.

Belajar kelompok merupakan bagian dari tugas yang diberikan oleh guru. Hampir semua guru pernah memberikan tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Tidak ada murid yang memiliki inisiatif sendiri untuk belajar dalam kelompok. Telepon genggam dimanfaatkan beberapa murid untuk membuat janji belajar kelompok. Murid-murid perempuan SMPN B merasakan manfaat layanan pesan singkat sebagai sarana bertanya atau bertukar informasi terkait PR yang harus mereka kerjakan. Mereka tidak langsung menelepon sesama murid karena pesan singkat lebih murah dibandingkan dengan telepon.

Murid-murid yang tidak memiliki telepon genggam biasanya langsung datang ke rumah teman yang hendak ditanya terkait PR atau hendak diajak belajar kelompok. Murid-murid perempuan SMPN B secara terbatas telah memanfaatkan Facebook. Mereka menggunakan fasilitas kotak masuk (*inbox*) dalam Facebook untuk berdiskusi dengan kakak kelas tentang persiapan pentas drama. Murid-murid perempuan SMPN A, meski rata-rata tidak memiliki telepon genggam, telah terbiasa memanfaatkan mesin pencari Google untuk mengerjakan PR. Mereka mengakses internet dari warung-warung internet.

Akses terhadap pelajaran tambahan. Hanya SMPN B memberikan pelajaran tambahan bagi murid-murid mereka. Pelajaran tambahan diberikan setelah jam pelajaran terakhir di sekolah tersebut berakhir. Pada dasarnya, semua murid wajib mengikuti pelajaran tambahan. Baik murid laki-laki maupun murid perempuan berpendapat bahwa mereka memerlukan pelajaran tambahan. Pelajaran tambahan diberikan kepada murid untuk beberapa pelajaran, seperti Matematika, Fisika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. Murid laki-laki secara khusus menyatakan bahwa seharusnya ada pelajaran tambahan untuk PPKN karena para murid tidak banyak mendapatkan penjelasan tentang materi PPKN pada jam-jam formal pelajaran tersebut.

Murid-murid SMPN A menyatakan bahwa mereka membutuhkan pelajaran tambahan. Murid laki-laki tidak menjelaskan mata pelajaran apa saja yang memerlukan tambahan jam di luar jam formal. Murid-murid perempuan mengatakan bahwa mereka memerlukan pelajaran tambahan

untuk semua mata pelajaran. Mereka menambahkan bahwa mereka akan mengikuti pelajaran tambahan sekalipun harus membayar iuran untuk itu karena murid-murid perempuan ini ingin menambah ilmu.

Harapan murid terkait kelanjutan pendidikan. Semua murid ingin melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat SMA. Murid-murid laki-laki dari SMPN B ingin melanjutkan ke SMAN 1 Dompu, SMAN 2 Dompu, sekolah teknik menengah (STM), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1. Murid yang ingin melanjutkan ke SMAN 1 Dompu menyatakan bahwa ia ingin masuk sekolah favorit supaya bisa bersaing dengan murid-murid dari sekolah lain. Murid yang ingin melanjutkan ke SMAN 2 Dompu mengetahui bahwa sekolah ini mempunyai peralatan musik yang lengkap. Mereka yang ingin melanjutkan ke STM dan SMKN ingin cepat bekerja setelah lulus.

Hampir semua murid perempuan SMPN B peserta wawancara kelompok ingin melanjutkan ke SMKN 1 dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Hanya satu murid perempuan hendak melanjutkan pendidikan ke pesantren di Kabupaten Bima, mengikuti jejak ibunya. Dari enam peserta wawancara kelompok murid perempuan, hanya tiga murid menyatakan ingin kuliah selepas SMA. Supaya bisa masuk ke sekolah yang mereka inginkan, murid-murid mengatakan bahwa mereka harus memiliki nilai tes yang bagus, mempersiapkan uang untuk pendaftaran sekolah, dan mempersiapkan uang untuk membeli baju seragam.

Semua murid SMPN A berencana melanjutkan sekolah. Rata-rata murid laki-laki ingin bersekolah di SMA yang paling dekat dari rumah mereka, yakni sekolah yang masih berada di wilayah Kabupaten Dompu. Namun, ada juga yang ingin melanjutkan sekolah di SMA yang berada di Kabupaten Bima dengan alasan ingin mencari pengalaman baru. Ada juga murid yang ingin melanjutkan sekolah di SMK bidang IT karena ia ingin belajar tentang komputer.

Lima murid perempuan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Ada yang ingin bersekolah di SMAN 3 dan ada juga yang ingin bersekolah di SMAN 5. Mereka bercita-cita menjadi guru, polisi wanita, dan bidan. Satu murid perempuan ingin melanjutkan pendidikannya di SMKN 1; ia bercita-cita menjadi guru Matematika. Sebagian murid mengatakan bahwa mereka ingin melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah tertentu yang semuanya masih berlokasi di Kabupaten Dompu karena ada kakak atau tetangga mereka yang sudah bersekolah di sekolah tersebut. Murid-murid ini belum tahu tentang persyaratan akademik setiap sekolah yang hendak mereka tuju. Namun, mereka mengetahui bahwa SMA yang menjadi tujuan mereka memiliki aturan tersendiri tentang penggunaan jilbab dan rok panjang bentuk A.

Perubahan yang terjadi di sekolah sampel. Secara umum, para murid menyampaikan informasi tentang perubahan-perubahan fisik di sekolah masing-masing. Penambahan ruangan di sekolah, seperti ruang kelas dan laboratorium, dan penambahan hiasan kaligrafi di dinding-dinding sekolah hingga ruang kelas merupakan beberapa perubahan yang diamati murid-murid SMPN B. Selain mencermati perbaikan infrastruktur, murid-murid perempuan menyebutkan tentang bertambahnya guru untuk mata pelajaran Matematika, Seni dan Budaya, dan Fisika. Dari sisi lingkungan, murid-murid berpendapat bahwa lingkungan sekolah makin bersih sehingga membuat para murid nyaman belajar di sekolah.

Murid-murid SMPN A juga mencermati perubahan terkait ruangan kelas di sekolah mereka.<sup>27</sup> Perubahan paling mencolok adalah bahwa kini murid-murid tidak lagi harus berbagi ruangan

---

<sup>27</sup>SMPN A belum mempunyai fasilitas jamban sekolah dan sarana air bersih.

dengan rombongan belajar lain. Mereka mempunyai ruangan kelas sendiri. Murid-murid perempuan menyatakan bahwa sejak mereka naik ke kelas 3, guru-guru yang mengampu pelajaran banyak yang berbeda dibandingkan dengan guru-guru pengampu pelajaran saat mereka masih di kelas 2. Hampir semua guru-guru kelas 2 mengajar murid-murid kelas 1.

## LAMPIRAN 2

### Metode Komunikasi Pemangku Kepentingan

#### a) Kelompok Pembuat Kebijakan<sup>28</sup>

Metode komunikasi: tatap muka, telepon, pesan singkat, laporan, surat/undangan resmi, kunjungan sekolah (*school visit*), rapat, surel, WhatsApp (terbatas), grup WhatsApp (terbatas)

Secara khusus, Bappeda menggunakan telepon untuk menghubungi berbagai instansi terkait demi pengumpulan data. Komunikasi secara tidak langsung melalui suara ini dilakukan secara insidental. Instansi-instansi yang dihubungi oleh Bappeda akan mengirimkan data melalui surel. Namun, instansi-instansi tersebut lebih sering mengantarkan data secara langsung kepada Bappeda.

Di antara para pembuat kebijakan tersebut, hanya Kabid Dikmen Dinas Dikpora yang menyatakan menggunakan media sosial untuk melakukan komunikasi dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pembelajaran. Kabid Dikmen Dikpora memanfaatkan WhatsApp dan grup WhatsApp (anggotanya meliputi pejabat dikmen dan para kepala sekolah SMP) untuk menyebarkan berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan undangan pertemuan/rapat. Komunikasi melalui WhatsApp bersifat insidental. Belum semua kepala sekolah SMP (dan SMA) memiliki akun WhatsApp. Oleh karena itu, komunikasi terutama masih menggunakan saluran-saluran komunikasi seperti pesan singkat, surat, dan tatap muka.

Pesan singkat, surel, laporan, dan surat resmi (termasuk undangan) merupakan komunikasi tertulis yang pada dasarnya dipakai oleh para pembuat kebijakan untuk melakukan koordinasi internal instansi dan antarin instansi dengan laporan dan surat resmi sebagai saluran komunikasi utama. Pesan singkat dapat digunakan sebagai pemberitahuan awal yang akan diikuti oleh undangan atau surat resmi dan dapat dipakai secara terpisah untuk memberitahukan tentang penyelenggaraan rapat. Pesan singkat juga bermanfaat sebagai sarana untuk membuat janji tatap muka secara insidental. Sementara itu, surel telah secara reguler dimanfaatkan oleh Dinas Dikpora untuk mengirimkan kalender pendidikan kepada para pengelola sekolah di wilayah Kabupaten Dompus. Secara insidental, surel menjadi alat bagi Dinas Dikpora untuk menyebarkan informasi mengenai kebijakan baru.

Komunikasi langsung dengan tatap muka menjadi pilihan saluran komunikasi yang penting bagi Dinas Dikpora, Bappeda, dan DPRD. Hal ini karena tipe komunikasi tersebut sangat berterima dan lazim di kalangan pembuat kebijakan. Tatap muka juga dapat menjadi sarana bagi ketiga instansi tersebut untuk mendapatkan informasi langsung dari lapangan, seperti dalam kunjungan ke sekolah. Menurut Kabid Dikdas Dinas Dikpora, pelaksanaan kunjungan ke sekolah sangat bergantung pada anggaran. Bentuk lain tatap muka adalah rapat dan pertemuan-pertemuan informal. Tahapan penting sebelum kunjungan ke sekolah, rapat, dan pertemuan informal dilakukan adalah pengiriman surat sebagai undangan atau pemberitahuan kepada instansi yang terlibat dalam tiga forum komunikasi tersebut.

---

<sup>28</sup>Kelompok pembuat kebijakan meliputi (i) Kabid Dikdas Dinas Dikpora, (ii) Kabid Dikmen Dinas Dikpora, (iii) Kasi Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Dasar Dinas Dikpora, (iv) Kasi Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Menengah Dinas Dikpora, (v) Kepala Bidang Sosial Budaya Kantor Bappeda, dan (vi) Ketua Komisi 3 DPRD.

## b) Kelompok Pelaksana Kebijakan<sup>29</sup>

Metode komunikasi: tatap muka, lobi, telepon, pesan singkat, laporan, surat/undangan resmi, kunjungan sekolah, rapat, surel, WhatsApp (terbatas), grup WhatsApp (terbatas), grup Facebook (terbatas)

Para pelaksana kebijakan memanfaatkan saluran komunikasi yang lebih bervariasi dibandingkan dengan kelompok pemangku kepentingan yang lain. Saluran komunikasi yang hanya ditemukan pada kelompok pelaksana kebijakan adalah komunikasi interpersonal berupa lobi. Forum komunikasi yang dimanfaatkan oleh satu-satunya informan kunci yang melakukan lobi, yakni kepala sekolah salah satu SD sampel, adalah pertemuan dengan kepala Dinas Dikpora. Latar belakang kepala sekolah dan kepala Dinas Dikpora—keduanya pernah menempuh pendidikan di lembaga yang sama—tampaknya sangat berperan dalam keberhasilan lobi yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Menurut kepala sekolah ini, hal-hal yang dibicarakannya dengan kepala Dinas Dikpora saat mereka bertemu adalah berbagai persoalan sarana dan prasarana yang dialami oleh sekolah yang dikelolanya.

Komunikasi tidak langsung dengan menggunakan media sosial ditemukan pada sebagian dari tiga kelompok pemangku kepentingan, yaitu guru SD, guru SMP, dan pengawas SMP. WhatsApp, grup WhatsApp, dan Facebook adalah media sosial yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan tersebut. Para pengawas SMP telah mulai memanfaatkan Facebook dengan membentuk grup Facebook Pemerhati Pendidikan Dompus meskipun belum semua pengawas mengakses Facebook karena mereka belum memiliki akun. Grup WhatsApp dibentuk oleh beberapa guru SMP yang pernah mengikuti pelatihan pembelajaran yang diadakan oleh Plan beberapa tahun yang lalu. Para alumni pelatihan guru yang memiliki akun WhatsApp dan mengakses grup WhatsApp tersebut rata-rata berumur kurang dari 40 tahun. Pada kelompok guru SD, hanya ditemukan satu guru dari dua SD sampel yang memiliki akun WhatsApp tetapi menggunakannya sekadar untuk keperluan pribadi guru tersebut alih-alih untuk meningkatkan kualitas pengajarannya atau meningkatkan hasil pembelajaran para muridnya.

Semua pemangku kepentingan yang merupakan pelaksana kebijakan memanfaatkan telepon untuk melakukan komunikasi insidental. Biasanya hal ini dilakukan dalam rangka koordinasi internal instansi dan antarinstansi. Menelepon juga digunakan untuk mengundang individu atau instansi terkait ke pertemuan-pertemuan informal dan formal. Biasanya, undangan melalui telepon akan diikuti dengan undangan resmi berupa surat. Komunikasi dalam rangka mengundang ke kegiatan tertentu juga dapat dilakukan secara lisan.

Kepala sekolah dan guru SD secara lisan mengundang para orang tua murid ketika akan mengadakan pertemuan orang tua murid di sekolah. Para murid biasanya diminta oleh guru-guru mereka untuk meneruskan undangan lisan tersebut kepada orang tua masing-masing. Komunikasi secara lisan menjadi bagian keseharian para guru SD ketika menjalankan, antara lain, KBM dan pembagian rapor murid. Komunikasi langsung secara lisan juga menjadi bagian dari pertukaran informasi antara kepala sekolah dan guru-guru dalam rapat berkala sekolah, antara kepala sekolah dan sesama kepala sekolah dalam pertemuan kelompok kerja kelompok sekolah atau K3S<sup>30</sup>, antara kepala sekolah dan komite sekolah atau pemerintah setempat dalam kegiatan rutin di luar sekolah, serta antarguru dalam pertemuan-pertemuan informal dengan guru dari SD lain. Untuk pertemuan-pertemuan selain dengan orang tua murid, kepala sekolah memanfaatkan pesan singkat untuk mengundang peserta pertemuan sebelum mengirimkan undangan atau surat resmi.

<sup>29</sup>Kelompok pelaksana kebijakan meliputi (i) kepala sekolah SD, (ii) kepala sekolah SMP, (iii) pengawas SD, (iv) pengawas SMP, (v) guru SD, (vi) guru SMP, dan (vii) kepala UPTD Dikpora.

<sup>30</sup>Salah satu kepala SD yang diwawancarai adalah ketua K3S.

Seperti halnya dengan kepala sekolah dan guru SD, kepala sekolah SMP juga melakukan komunikasi langsung secara lisan dalam rapat berkala dengan para guru untuk kepentingan evaluasi. Kepala sekolah juga bertukar informasi melalui komunikasi lisan ini dengan sesama kepala sekolah dalam forum MKKS. Sementara itu, guru SMP memiliki forum tatap muka dengan sesama guru di rapat guru, dengan orang tua murid dalam pembagian rapor saat kenaikan kelas, dan dengan murid-murid selama KBM. Guru-guru SMP juga mengikuti pertemuan informal untuk dapat bertatap muka dan bertukar pengalaman dengan sesama guru SMP dari sekolah lain.

Tatap muka dalam bentuk kunjungan ke sekolah-sekolah dilakukan secara teratur oleh para pengawas SD.<sup>31</sup> Tatap muka juga menjadi saluran komunikasi penting bagi para pengawas SD dan SMP untuk secara rutin berdiskusi dengan sesama pengawas sekolah. Para pengawas SD akan berkumpul dengan sesama pengawas SD di kantor UPT Dikpora di wilayah kerja kecamatan masing-masing; tidak ada informasi tentang waktu khusus bagi mereka untuk berkumpul. Setiap Jumat, para pengawas SMP bertukar pengalaman dengan sesama pengawas sekolah di ruang pengawas sekolah yang tersedia di Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu.

Tatap muka dengan pihak dinas dilakukan secara insidental dan berkala oleh kepala UPTD Pendidikan. Selain itu, kepala UPTD juga rutin melakukan komunikasi langsung secara lisan dengan para guru dalam pertemuan KKG dan dengan para kepala sekolah dalam pertemuan K3S.

Secara tertulis, para pemangku kepentingan yang merupakan pelaksana kebijakan memberikan laporan kegiatan mereka. Contohnya, pengawas SD dan pengawas SMP mengirimkan laporan hasil supervisi kepada Dinas Dikpora secara berkala—setiap bulan dan setiap semester. Demikian pula halnya dengan kepala sekolah.

Selain memberikan laporan resmi melalui komunikasi tertulis, kepala sekolah menggunakan surat resmi untuk mengundang orang tua murid guna menghadiri kegiatan sekolah. Biasanya orang tua murid diundang ke sekolah saat awal tahun ajaran dan saat kenaikan kelas. Untuk mengikuti kegiatan wawancara kelompok yang diadakan oleh tim peneliti SMERU, orang tua murid pun mendapatkan undangan resmi dari kepala sekolah sampel.

Kepala UPTD Dikpora melakukan komunikasi tertulis berupa laporan kepada Dinas Dikpora tentang hasil pengawasan para pengawas sekolah. Selain itu, kepala UPTD Dikpora menggunakan dan menerima surat resmi yang berfungsi sebagai undangan mengikuti rapat koordinasi dengan Dinas Dikpora.

Pesan singkat menjadi pilihan saluran komunikasi ketika para pemangku kepentingan yang merupakan pelaksana kebijakan hendak memberikan pemberitahuan cepat atau undangan tidak resmi untuk suatu kegiatan. Pesan singkat biasanya dikirim terlebih dulu, lalu diikuti dengan pengiriman undangan resmi. Ada kalanya pesan singkat dikirimkan tanpa diikuti dengan undangan resmi ketika situasi sangat mendesak dan kegiatan perlu segera dilakukan. Sebagai contoh, jika ada kegiatan yang tidak direncanakan jauh hari sebelumnya yang memerlukan kehadiran para kepala sekolah, kepala UPTD Pendidikan dapat mengirimkan pesan singkat kepada semua kepala sekolah SD untuk memenuhi undangan ke kegiatan tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi kepala UPTD. Mereka dapat juga menerima undangan mendadak dari Dinas Dikpora melalui pesan singkat.

Komunikasi dengan menggunakan pesan singkat sebagai pemberitahuan juga dimanfaatkan dalam pertemuan KKG. Guru-guru SD biasanya mendapatkan pesan singkat untuk mengikuti kegiatan KKG.

---

<sup>31</sup>Kunjungan dilakukan tiap dua minggu sekali.

Perlu dicatat bahwa KKG tidak rutin berjalan. Para pengawas sekolah pun menggunakan pesan singkat untuk memberitahukan kepada para guru tentang pertemuan yang akan dilakukan antara pengawas sekolah dan guru.

Komunikasi melalui surel juga sudah dilakukan oleh para pengelola sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan operator sekolah. Namun, jaringan internet yang kurang baik dapat membuat komunikasi ini tidak berjalan. Hal ini terjadi di SMPN B yang jaringan internetnya rusak selama beberapa waktu.

### **c) Kelompok Pendukung Pelaksanaan Kebijakan<sup>32</sup>**

Metode komunikasi: tatap muka, telepon, pesan singkat, laporan, surat/undangan resmi, rapat, surel, WhatsApp (terbatas), grup WhatsApp (terbatas), grup Facebook (terbatas)

Tatap muka menjadi saluran komunikasi yang paling lazim digunakan oleh para pemangku kepentingan yang tergolong dalam kelompok pendukung pelaksanaan kebijakan. Forum MKKS, sebagai contoh, menggunakan pertemuan tahunan yang diadakan setiap menjelang tahun ajaran baru oleh para kepala sekolah untuk berbagi informasi terkait masalah pembelajaran yang dihadapi oleh sekolah dan solusinya. Pertemuan MGMP yang diikuti oleh para guru mata pelajaran menjadi ajang bagi guru-guru untuk menyiapkan rencana pengajaran. Namun, meskipun diakui bermanfaat bagi peningkatan kualitas mengajar guru dan bagi peningkatan hasil pembelajaran murid, pertemuan MGMP tidak rutin berjalan. Hal ini biasanya terkait dengan ada atau tidaknya anggaran sekolah untuk mengirim guru-guru ke pertemuan MGMP dan inisiatif atau kemauan para guru untuk menyisihkan dana sertifikasi mereka untuk peningkatan profesionalisme guru.

Kepala desa melakukan tatap muka dengan orang tua murid untuk meminta orang tua mendorong anak-anak rajin bersekolah setelah mendapatkan informasi dari kepala sekolah atau guru tentang murid yang membolos. Komite sekolah melakukan komunikasi secara lisan dalam rapat dengan pengelola sekolah dan dengan orang tua murid atau perangkat desa dalam pertemuan-pertemuan informal. Hal ini terutama dilakukan oleh kepala desa dan komite sekolah SD karena warga desa biasanya menyekolahkan anak-anak mereka ke SD yang ada di desa itu juga.

Komunikasi orang tua murid dengan sekolah dilakukan saat penerimaan murid baru, awal tahun ajaran, kenaikan kelas, dan penerimaan beasiswa. Biasanya, anak-anak menyampaikan undangan dari pihak sekolah secara lisan kepada orang tua mereka. Jika anak sakit, orang tua biasanya datang langsung kepada guru untuk meminta izin tidak masuk/sakit bagi anak mereka. Orang tua bisa juga menitipkan surat kepada siswa lain atau guru yang tinggal sedesa.

Dewan Pendidikan memanfaatkan kegiatan kunjungan ke sekolah untuk mengamati jalannya pelaksanaan ujian nasional (UN) dan kegiatan penerimaan murid baru. Dalam tatap muka seperti ini, Dewan Pendidikan mendapatkan informasi tentang capaian sekolah yang dikunjungi. Komunikasi lisan juga menjadi sarana bagi Dewan Pendidikan untuk mengundang anggota dewan untuk rapat internal.

Adapun di kalangan anggota PGRI, komunikasi lisan dapat berlangsung dalam berbagai forum, contohnya konferensi PGRI tingkat daerah dan pertemuan anggota PGRI dengan bupati di pendopo kabupaten. Ketua PGRI menyatakan bahwa komunikasi lisan berupa tatap muka juga bisa terjadi

---

<sup>32</sup>Kelompok pendukung pelaksanaan kebijakan meliputi (i) komite sekolah, (ii) MKKS, (iii) kepala desa, (iv) orang tua murid, (v) LSM, (vi) ketua Dewan Pendidikan, (vii) anggota Dewan Pendidikan, (viii) ketua PGRI, dan (ix) media lokal-wartawan Suara NTB biro Dompur.

antara ketua PGRI dan anggota persatuan tersebut dan antaranggota PGRI dalam pertemuan informal jika sewaktu-waktu diperlukan.

Bagi LSM, komunikasi langsung merupakan salah satu cara bertukar informasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk dengan para penerima manfaat program yang dibawa oleh LSM. Baik rapat internal maupun rapat dengan instansi lain, misalnya Dinas Dikpora, juga menjadi salah satu bentuk forum komunikasi lisan yang dilakukan LSM.

Wartawan dari media lokal biasanya berkomunikasi dengan narasumber melalui telepon untuk mendapatkan berita menarik, termasuk informasi yang menyangkut peningkatan mutu pembelajaran. Komunikasi melalui telepon ini dilakukan baik secara rutin maupun secara insidental. Tidak ada periode waktu tertentu untuk mendapatkan informasi bagi media lokal sepanjang informasi yang diperoleh bernilai berita tinggi.

Para pemangku kepentingan lain yang masuk dalam kelompok pendukung kebijakan juga memanfaatkan telepon untuk berkomunikasi dengan instansi terkait. Biasanya, telepon dipakai secara insidental ketika ada persoalan yang perlu segera didiskusikan. Selain melalui telepon, para pemangku kepentingan ini juga memanfaatkan komunikasi tidak langsung berupa pesan singkat untuk berbagai keperluan. Pesan singkat dimanfaatkan untuk mengirim undangan pertemuan rutin PGRI atau sebagai sarana koordinasi dalam rangka diseminasi informasi dari PGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketua MKKS, kepala desa, LSM, dan ketua Dewan Pendidikan menggunakan layanan pesan singkat secara insidental.

Komunikasi tertulis berupa surat undangan dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk mengundang pengelola sekolah atau wakilnya untuk mengikuti musyawarah desa (musdes)/musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Di sisi lain, pihak sekolah mengundang perangkat desa melalui surat undangan untuk mengikuti kegiatan di awal tahun ajaran baru. Selain itu, kepala sekolah mengundang orang tua murid dengan surat resmi untuk hadir ke sekolah dalam rangka koordinasi pencairan beasiswa murid atau ke acara-acara insidental, seperti wawancara kelompok yang dilakukan oleh tim peneliti. Biasanya para guru menitipkan undangan resmi tersebut kepada para murid untuk disampaikan kepada orang tua mereka.

Sebagai sebuah lembaga, Dewan Pendidikan tidak melakukan surat-menyurat secara internal untuk kepentingan pertemuan. Para anggota dewan lebih mudah dikumpulkan dengan memanfaatkan sarana telepon. Namun, Dewan Pendidikan menerima undangan dari pihak lain, contohnya bupati. Surat-surat resmi yang diterima oleh Dewan Pendidikan biasanya berkaitan dengan undangan pertemuan dengan Dinas Dikpora atau pemda.

LSM menggunakan surel sebagai sarana komunikasi secara lebih teratur daripada pemangku kepentingan lain dalam kelompok pendukung kebijakan. Media sosial, dalam hal ini WhatsApp dan Facebook, juga sudah dimanfaatkan oleh LSM untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi terkait mandat mereka. Ketua MKKS menyatakan telah mulai memanfaatkan WhatsApp untuk bertukar informasi dengan sesama kepala sekolah. Namun, ketua MKKS mengakui bahwa masih sedikit anggota MKKS memiliki akun WhatsApp. Hal serupa terjadi pada PGRI. Ketua PGRI menyatakan bahwa grup WhatsApp menjadi media penyebaran informasi antaranggota PGRI.

#### **d) Kelompok Sasaran Kebijakan**

Metode komunikasi: tatap muka, pesan singkat, telepon, Facebook (terbatas)

Murid-murid SD di lokasi studi di Dompu hanya menggunakan satu tipe komunikasi, yakni komunikasi langsung. Komunikasi secara lisan yang mereka lakukan dengan guru berupa tatap

muka yang terjadi dalam KBM. Komunikasi secara lisan dalam rangka pembelajaran juga terjadi di antara para murid dalam kegiatan belajar kelompok.

Media, saluran, dan forum komunikasi bagi murid-murid SMP jauh lebih beragam dibandingkan dengan yang dipakai oleh murid-murid SD. Murid-murid SMP memanfaatkan komunikasi langsung dan tidak langsung. Seperti halnya murid-murid SD, para murid SMP memanfaatkan saluran komunikasi lisan saat bertatap muka dengan para guru dan sesama murid. Forum tatap muka dengan guru adalah KBM dan dengan sesama murid adalah belajar kelompok.

Komunikasi tidak langsung dilakukan oleh para murid SMP secara tertulis dengan memanfaatkan telepon dan media sosial. Komunikasi melalui pesan singkat paling banyak dilakukan oleh para murid dengan alasan murah dan lebih jelas. Komunikasi melalui pesan singkat dilakukan ketika para murid memerlukan informasi dari teman-teman mereka, misalnya informasi tentang PR yang diberikan oleh guru.

Komunikasi tidak langsung melalui telepon dilakukan oleh para murid ketika mereka hendak melakukan belajar kelompok. Menelepon menjadi cara bagi murid-murid ini untuk mengetahui apakah semua anggota kelompok sudah tiba di tempat mereka hendak belajar. Para murid SMP juga sudah mulai memanfaatkan media sosial, khususnya Facebook, untuk berkomunikasi. Meskipun demikian, Facebook lebih dipakai untuk bersosialisasi dengan sesama murid dan tidak untuk keperluan pembelajaran. Dari semua murid peserta wawancara kelompok murid SMP, hanya dua murid (keduanya perempuan) telah memiliki akun Facebook.

## LAMPIRAN 3

**Tabel A1. Daftar Mitra Potensial**

No.	Instansi	Jabatan
<b>Kabupaten</b>		
1	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dompu	Kepala seksi peningkatan mutu pendidikan dasar
2	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dompu	Kepala seksi peningkatan mutu pendidikan menengah
3	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dompu	Kepala bidang pendidikan menengah
4	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dompu	Kepala bidang pendidikan dasar
5	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dompu	Pengawas SMP
6	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dompu	Pengawas SMP
7	Dewan Pendidikan Dompu	Ketua Dewan Pendidikan
8	Dewan Pendidikan Dompu	Anggota Dewan Pendidikan
9	Suara NTB (media lokal)	Wartawan Suara NTB (biro Dompu)
10	Bappeda Kabupaten Dompu	Kepala bidang sosial budaya
11	MKKS SMP/MTs Kabupaten Dompu	Ketua MKKS; Kepala sekolah SMPN 1 Woja
12	PGRI Kabupaten Dompu	Ketua PGRI
13	DPRD Kabupaten Dompu	Ketua Komisi III
14	DPRD Kabupaten Dompu	Anggota Komisi III
15	LSM: Lensa	Mantan Direktur Lensa NTB Dompu
16	LSM: Lensa	Direktur Lensa NTB Dompu
17	LSM: World Relief	Aktivis; Ketua World Relief Dompu
18	LSM: We save	Ketua We Save
<b>Kecamatan</b>		
19	UPTD Kecamatan Woja	Kepala UPTD
20	UPTD Kecamatan Woja	Pengawas TK/SD
21	UPTD Kecamatan Woja	Pengawas TK/SD
22	UPTD Kecamatan Dompu	Kepala UPTD
<b>Lingkup Sekolah: SMP</b>		
23	SMPN A	Kepala sekolah
24	SMPN A	Ketua komite sekolah
25	SMPN B	Kepala sekolah
26	SMPN B	Ketua komite sekolah

No.	Instansi	Jabatan
<b>Lingkup Sekolah: SD</b>		
27	SDN A	Kepala sekolah
28	SDN A	Ketua komite sekolah
29	Desa 1	Kepala desa
30	SDN B	Kepala sekolah
31	SDN B	Ketua komite sekolah
32	Desa 2	Kepala desa

## LAMPIRAN 4

**Tabel A2. Matriks Nilai Pemangku Kepentingan**

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (tinggi/menengah/rendah)	Kemauan untuk Terlibat (tinggi/menengah/rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (tinggi/menengah/rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan tersebut Dilibatkan (tinggi/menengah/rendah)
Dinas Dikpora: bidang pendidikan dasar	Tinggi Alasan: tupoksinya memang di bidang pendidikan	Rendah Alasan: kabid dikdas lebih sering mewakili tugas-tugasnya kepada kasi peningkatan mutu bidang dikdas	n.a.	Rendah
Dinas Dikpora: bidang pendidikan menengah	Tinggi Alasan: tupoksinya memang di bidang pendidikan	Tinggi (kalau pejabatnya adalah kabid dikmen) Alasan: kabid dikmen sering turun langsung ke sekolah-sekolah; kabid dikmen menerapkan pendekatan kekerabatan 'kakak-adik' dengan para kepala sekolah	Tinggi Alasan: turun langsung mendorong anak-anak bersekolah; kunjungan ke sekolah	Tinggi
Bappeda	Menengah Alasan: pelaksanaan tugas bergantung pada prioritas kebijakan bupati; mengoordinasi diskusi antar-SKPD terkait pengutamaan program SKPD	Rendah Alasan: secara pribadi, informan sudah akan pensiun	Rendah	Rendah
Ketua Dewan Pendidikan	Tinggi Alasan: tupoksi jelas terkait masalah-masalah pembelajaran	Menengah Alasan: hanya sekedar menjalankan tupoksi dan karena berada dalam struktur yang di-SK-kan oleh bupati	Rendah Alasan: hasil rekomendasi Dewan Pendidikan tentang pemerataan guru tidak tampak	Menengah Alasan: rekomendasi Dewan Pendidikan tidak mengikat; terkait erat dengan ada atau tidaknya kedekatan dengan bupati yang akan menentukan dijalankannya sebuah rekomendasi

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (tinggi/menengah/rendah)	Kemauan untuk Terlibat (tinggi/menengah/rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (tinggi/menengah/rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan tersebut Dilibatkan (tinggi/menengah/rendah)
Kepala UPTD Dikpora	Tinggi Alasan: informan memanfaatkan PNPM GSC untuk memasukkan motivasi tentang pendidikan	Tinggi Alasan: dalam posisi sebagai kepala UPTD dan individu, informan selalu mendorong anak-anak di sekitarnya untuk bersekolah; berkolaborasi dengan pengawas; khusus di Kecamatan Dompus telah ada diseminasi tentang pentingnya pendidikan	Rendah Alasan: tidak terukur	Tinggi Alasan: secara teknis, kepala UPTD lebih dapat menjangkau kegiatan di tingkat satuan pendidikan
MKKS	Tinggi Alasan: sudah banyak gagasan inovatif yang diterapkan informan di sekolah yang dipimpinnya	Tinggi Alasan: informan sudah banyak berbagi dan sudah terbukti terlibat	Tinggi Alasan: inovasi sudah direplikasi oleh kepala sekolah lain; program yang dijalankan (Sehari Bersama Wali Murid) terbukti membangun kebanggaan murid terhadap orang tuanya	Tinggi Alasan: sebagai ketua MKKS dan kepala sekolah, informan sudah banyak melakukan inovasi
Media lokal	Tinggi Alasan: secara individu, informan pernah menjadi guru honorer; media akan tetap memuat reportase tentang pendidikan di Dompus meskipun jatah halaman untuk pemberitaan Dompus sudah penuh	Menengah Alasan: walaupun informan memiliki kemauan yang tinggi untuk terlibat, keputusan untuk memuat reportase tentang pendidikan ada di tangan dewan redaksi	n.a., tidak ada informasi	Tinggi Alasan: agar informasi tentang upaya peningkatan hasil pembelajaran bisa tersebar luas
LSM Lensa NTB Dompus	Menengah Alasan: sebagai lembaga, LSM Lensa mampu masuk ke isu apapun; sejauh ini, Lensa fokus pada advokasi anggaran-pendampingan terhadap desa dalam kaitannya dengan UU Desa dan anggaran desa	n.a., peran Lensa dalam kegiatan INOVASI tidak dapat diprediksi	n.a., tidak ada kegiatan sehingga tidak terukur	n.a., bergantung pada kebutuhan INOVASI

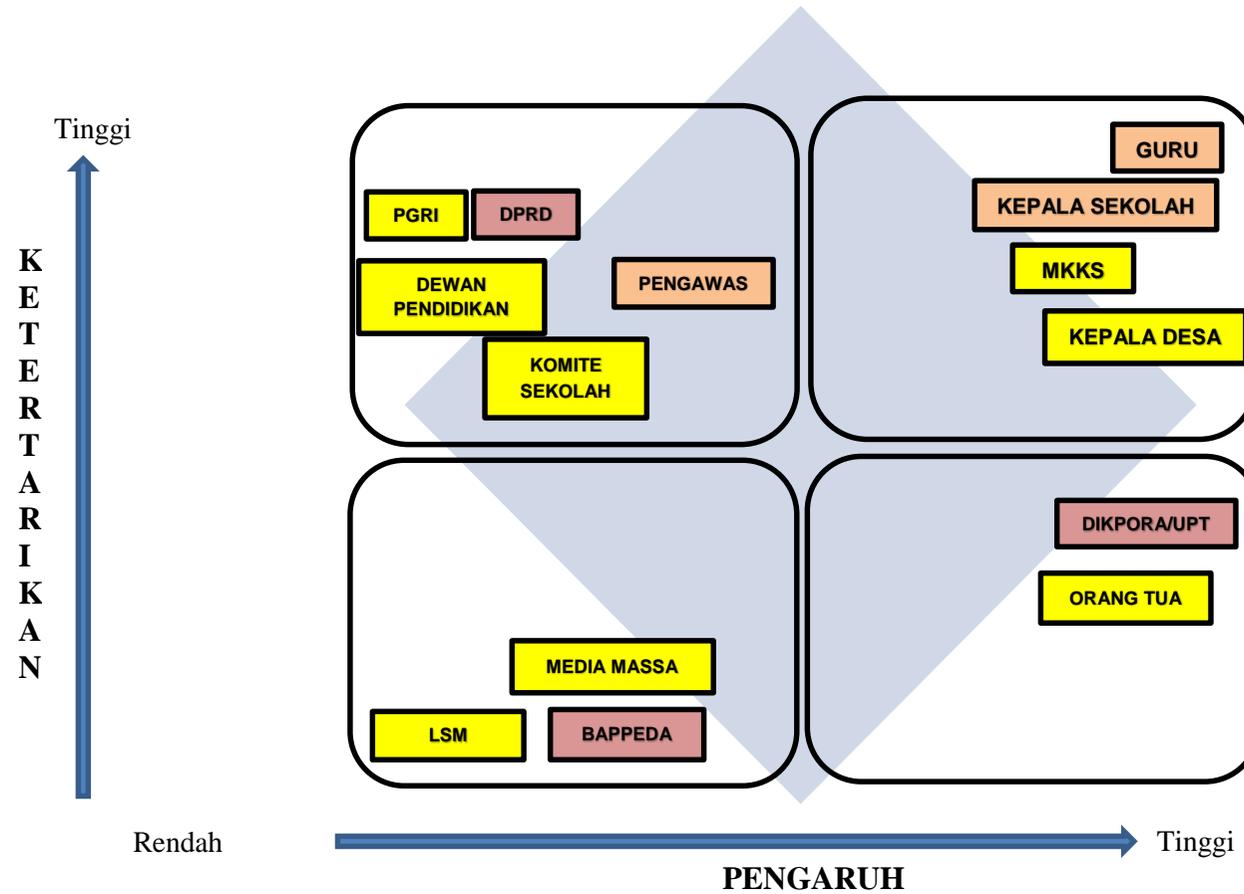
Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (tinggi/menengah/rendah)	Kemauan untuk Terlibat (tinggi/menengah/rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (tinggi/menengah/rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan tersebut Dilibatkan (tinggi/menengah/rendah)
LSM World Relief	Rendah Alasan: LSM ini memang tidak ada fokus pada pendidikan dasar	n.a., peran World Relief dalam kegiatan INOVASI tidak dapat diprediksi	n.a., tidak ada kegiatan sehingga tidak terukur	n.a., bergantung pada kebutuhan INOVASI
LSM We Save	Tinggi Alasan: fokus We Save memang pendidikan bagi yang membutuhkan, tetapi perlu dicatat bahwa We Save membawa nilai-nilai tertentu	Tinggi Alasan: fokus We Save memang pendidikan tetapi mereka membawa nilai-nilai tertentu	Tinggi Alasan: fokus pada pendidikan bagi anak-anak kurang mampu	Menengah Alasan: meskipun fokus We Save pendidikan, metode We Save cukup spesifik dan mereka membawa nilai-nilai tertentu
Pengawas SD	Tinggi Alasan: pengawas telah mendapat fasilitas biaya untuk supervisi ke sekolah-sekolah; pengawas mampu memberikan kritik atas kebijakan pemda yang membuat anak tidak belajar di sekolah karena sibuk menyiapkan diri untuk kegiatan di tingkat kabupaten dan kritik tersebut dimuat di media lokal	Menengah Alasan: pengawas sekolah memiliki kemauan untuk terlibat yang tidak sama	Rendah Alasan: pengawas sekolah datang ke sekolah sekadar untuk memenuhi kewajiban; kritik yang diajukan oleh pengawas sekolah tidak mendapatkan respons dari pemerintah setempat	Tinggi Alasan: pengawas sekolah bertemu dengan kepala sekolah dan guru, serta melakukan evaluasi terhadap KBM
Pengawas SMP	Tinggi Alasan: pengawas sekolah menjadi orang yang utama yang bertemu dengan kepala sekolah dan para guru; pengawas sekolah paling menguasai data tentang sekolah karena menjadi yang pertama kali mengetahui apa yang terjadi pada kepala sekolah dan para guru	Tinggi Alasan: pengawas menjadi orang yang paling sering terlibat dalam melakukan komunikasi terkait masalah pembelajaran dengan kepala sekolah dan para guru	Menengah Alasan: ada yang masih memiliki pekerjaan ganda sebagai ketua LPTK; ada yang jarak rumahnya ke lokasi sekolah yang menjadi tanggung jawabnya jauh	Tinggi Alasan: pengawas menjadi orang yang utama yang bertemu dengan kepala sekolah dan para guru

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (tinggi/menengah/rendah)	Kemauan untuk Terlibat (tinggi/menengah/rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (tinggi/menengah/rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan tersebut Dilibatkan (tinggi/menengah/rendah)
Kepala sekolah SDN B	Tinggi Alasan: SDN B terdapat di pusat pemerintahan Desa 2 dan menjadi tujuan sekolah masyarakat empat dusun	Tinggi Alasan: informan melakukan banyak pembenahan yang dimulai dari pembenahan fisik; informan telah mencanangkan untuk melakukan pembenahan mutu karena telah selesai dengan urusan fisik sekolah	Tinggi Alasan: disiplin guru dan murid sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan saat informan baru menjabat	Tinggi Alasan: komitmen tinggi dan disiplin
Kepala sekolah SDN A	Tinggi Alasan: informan sudah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan sekolah	Tinggi Alasan: informan sudah berinisiatif menjemput siswa yang lebih dari dua hari tidak masuk sekolah	Tinggi Alasan: informan mencoba menempatkan guru yang cocok untuk setiap tingkat kelas; contohnya, menempatkan guru yang mudah berbaur dengan anak kecil untuk mengajar kelas 1	Tinggi Alasan: informan mempunyai komitmen tinggi terhadap sekolahnya; ia ingin menjabat di sekolah tersebut sampai pensiun tiba
Kepala sekolah SMPN B	Tinggi Alasan: informan sangat mengetahui situasi pendidikan yang dialami sekolahnya  Catatan: informan sudah akan memasuki usia pensiun	Tinggi Alasan: informan melakukan kunjungan rumah, serta menyarankan guru-guru dan komite sekolah untuk melakukan hal serupa	Tinggi Alasan: kunjungan ke rumah dilakukan sesegera mungkin, yakni tiga hari setelah ada murid yang tidak masuk berturut-turut	Tinggi Alasan: informan sangat mengetahui situasi pendidikan yang dialami sekolahnya; informan menjadi kepala sekolah sejak SMPN B didirikan
Kepala sekolah SMPN A	Menengah Alasan: terkait manajemen sekolah, potensi kontribusinya lumayan  Rendah Alasan: terkait substansi peningkatan mutu pembelajaran, potensinya kurang	Menengah-tinggi Alasan: informan menyatakan bahwa "sepanjang untuk pembelajaran, saya bersedia [dan tidak mau terlibat dalam politik]"	Tinggi Alasan: informan langsung mendatangi murid yang masih bekerja menjelang ujian; ada juga yang tidak berhasil dalam upaya ini karena murid sudah kabur lebih dulu ke Sumbawa	Tinggi Alasan: jabatan informan sebagai kepala sekolah

Pemangku Kepentingan	Potensi untuk Berkontribusi (tinggi/menengah/rendah)	Kemauan untuk Terlibat (tinggi/menengah/rendah)	Pengaruh Aktual terhadap Pembelajaran (tinggi/menengah/rendah)	Pentingnya Pemangku Kepentingan tersebut Dilibatkan (tinggi/menengah/rendah)
Guru	Menengah Alasan: guru memiliki upaya untuk menyelesaikan masalah dengan berkonsultasi dengan pengawas sekolah; guru menjemput murid untuk kembali masuk sekolah; guru menggunakan dua bahasa saat mengajar	Tinggi Alasan: para guru bersedia untuk mengikuti pelatihan terkait pembelajaran karena merasa perlu mendapatkannya	Tinggi Alasan: ada pendampingan oleh guru bagi murid-murid yang lemah dalam calistung	Tinggi Alasan: guru adalah pelaksana utama dalam KBM dan terlibat langsung dengan proses belajar murid
Komite sekolah SDN B	Menengah Alasan: tidak banyak terlibat dalam pembelajaran; lebih banyak terlibat dalam pembangunan fisik sekolah	Menengah Alasan: sudah sibuk menjadi kepala urusan keuangan di pemerintah desa	Rendah Alasan: tidak pernah dilibatkan dalam pembelajaran	Menengah Alasan: walaupun sibuk dengan tugasnya di pemerintah desa, dengan jabatan tersebut informan memiliki peluang untuk mengakses bantuan dari desa
Komite sekolah SDN A	Tinggi Alasan: perannya sebagai komite sekolah cukup signifikan	Tinggi Alasan: membuka kelas belajar di rumahnya	Tinggi Alasan: komite sekolah dan guru menjemput murid-murid yang tidak bersekolah; komite sekolah membantu memastikan murid-murid mendapatkan fasilitas sepatu dari alokasi dana BOS	Tinggi Alasan: kepedulian komite sekolah akan SDN A sangat tinggi
Komite sekolah SMPN B	Menengah Alasan: tidak banyak terlibat dalam pembelajaran; lebih banyak terlibat dalam pembangunan fisik sekolah	Menengah Alasan: informan sudah mengajukan pengunduran diri kepada kepala sekolah dengan alasan sudah cukup lama menjabat	Rendah Alasan: tidak pernah dilibatkan dalam pembelajaran; hanya terlibat dalam pemenuhan kebutuhan fisik sekolah	Rendah Alasan: sudah ingin mundur dari jabatan di komite sekolah
Komite sekolah SMPN A	Tinggi Alasan: informan juga menjadi pendidik sehingga memahami konteks pendidikan	Tinggi Alasan: kemauan untuk terlibat tinggi meskipun informan menunjukkan keraguan karena ia hanya sendirian di komite sekolah	Rendah Alasan: tidak pernah dilibatkan dalam pembelajaran; hanya terlibat dalam pemenuhan kebutuhan fisik sekolah	Tinggi Alasan: informan adalah orang pertama yang bergelar sarjana di desanya; selain itu, informan menjadi tokoh masyarakat

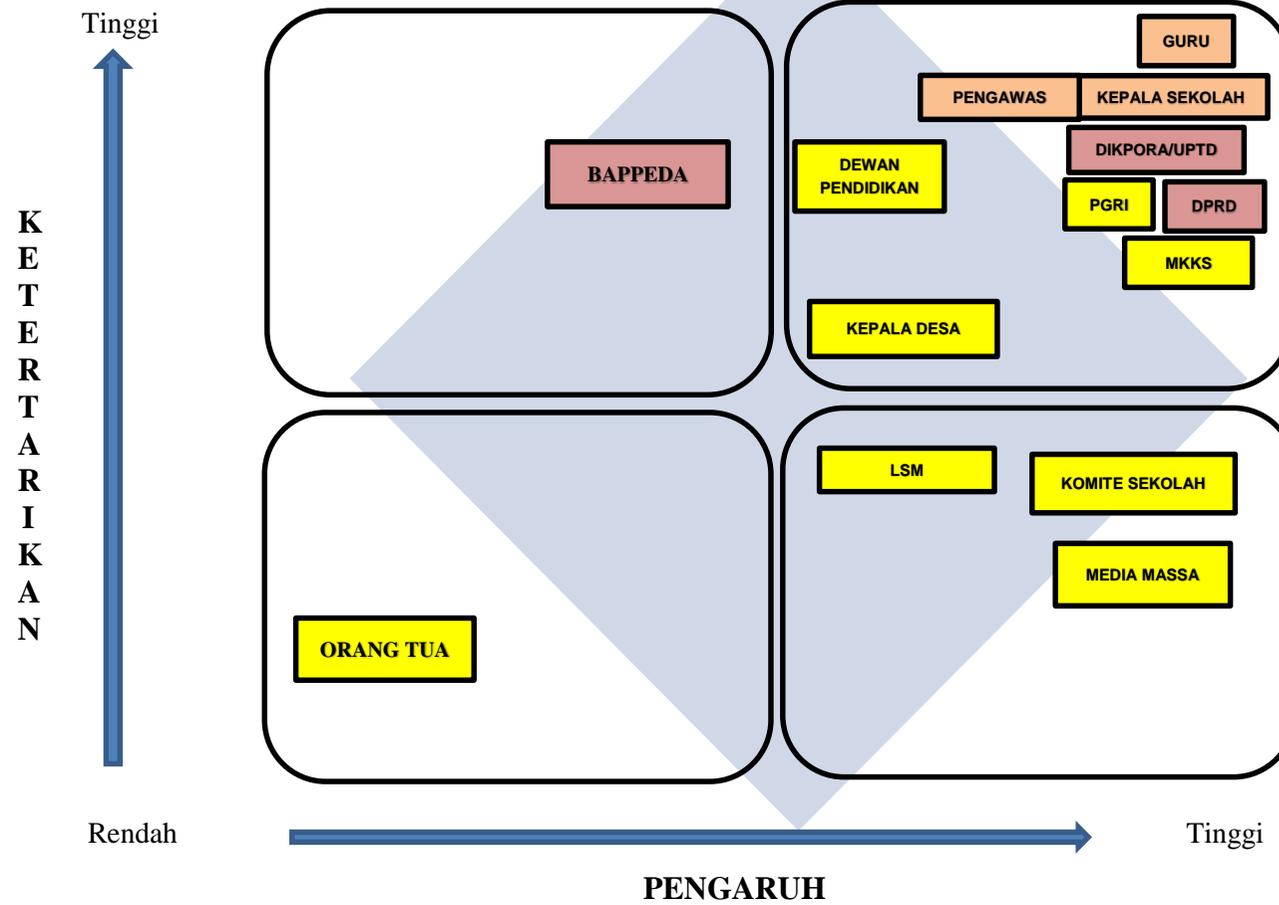
## LAMPIRAN 5

Gambar A1. Peta Pemangku Kepentingan 1<sup>33</sup>



<sup>33</sup>Hasil analisis tim peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan analisis dokumen perencanaan.

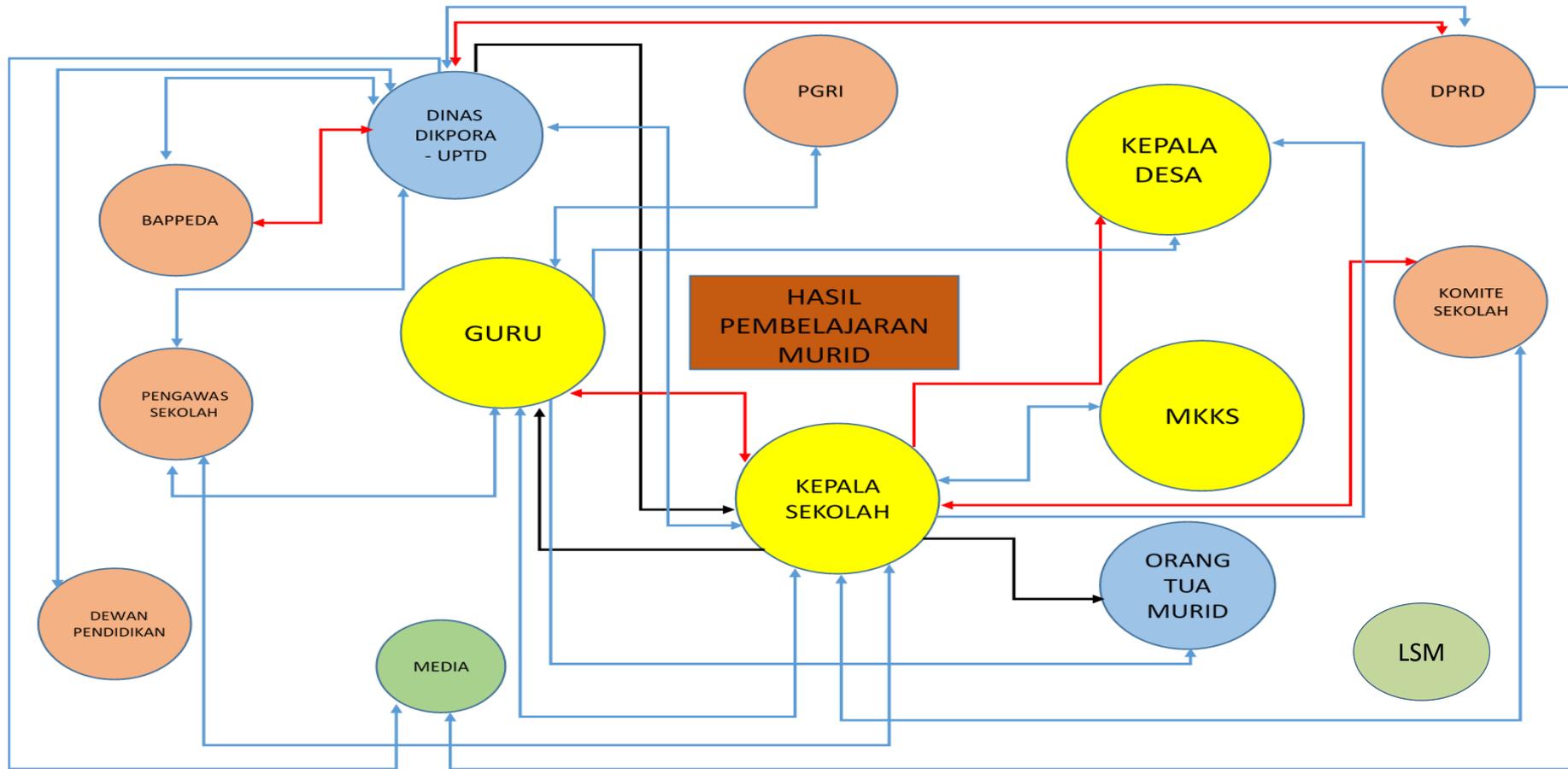
Gambar A2. Peta Pemangku Kepentingan 2<sup>34</sup>



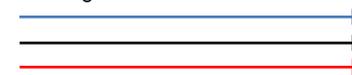
<sup>34</sup>Hasil kesepakatan para pemangku kepentingan peserta FGD Kabupaten.

## LAMPIRAN 6

Gambar A3. Analisis Jejaring Pemangku Kepentingan

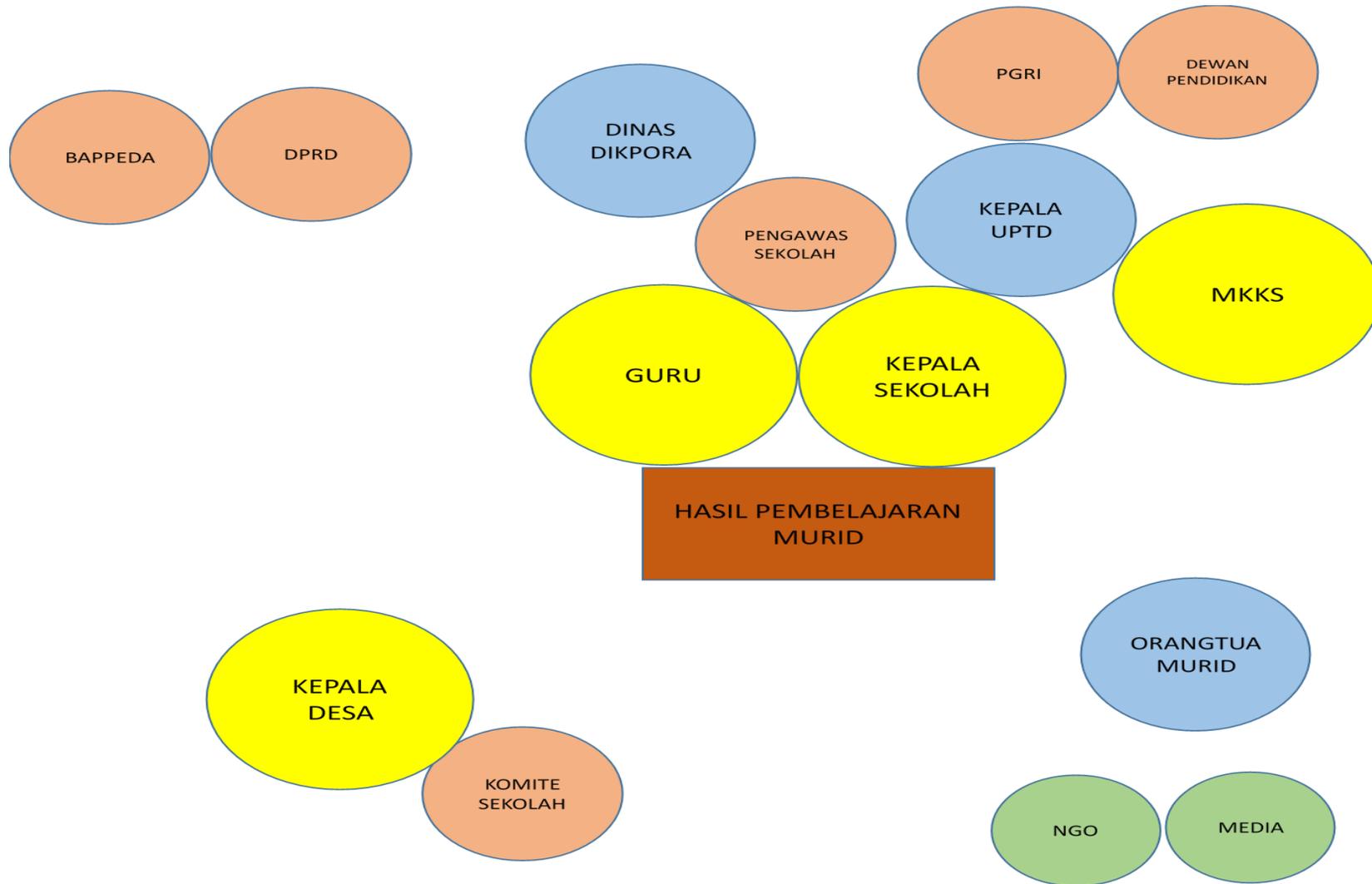


Keterangan:



= informasi/laporan  
 = instruksi  
 = koordinasi

Gambar A4. Kedekatan dan Peran Pemangku Kepentingan



## LAMPIRAN 7

Tabel A3. Matriks Metode Komunikasi Pemangku Kepentingan

Matriks Komunikasi				
Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Jenis Media	Saluran Komunikasi	Saluran untuk Berinteraksi (forum yang ada)
Dinas Dikpora	Kabid dikdas Dinas Dikpora	Komunikasi tidak langsung	Pesan singkat (sebagai undangan/ pemberitahuan)	Tatap muka
		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon (telepon genggam)	Insidental
		Komunikasi langsung	Tatap muka	Kunjungan ke sekolah <sup>35</sup> , rapat
		Komunikasi tertulis	Laporan, surat resmi	
	Kabid dikmen Dinas Dikpora	Komunikasi langsung	Tatap muka	Kunjungan ke sekolah, rapat
		Komunikasi tidak langsung (tertulis)	Pesan singkat (sebagai undangan/pemberitahuan)	Rapat
		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon (telepon genggam)	Insidental
		Komunikasi tidak langsung (media sosial)	WhatsApp, grup WhatsApp <sup>36</sup>	Insidental
		Komunikasi tidak langsung (tertulis)	Surel	Reguler (pengiriman kalender pendidikan, laporan), insidental (informasi tentang kebijakan)
		Komunikasi tertulis	Laporan, surat resmi	

<sup>35</sup>Kunjungan ke sekolah-sekolah sangat bergantung pada anggaran.

<sup>36</sup>Grup Whatsapp diikuti oleh pejabat dikmen Dinas Dikpora dan para kepala SMP meskipun masih belum semua kepala sekolah memiliki WhatsApp. Informasi yang disebarkan melalui grup WhatsApp meliputi kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan dan undangan untuk pertemuan.

Matriks Komunikasi				
Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Jenis Media	Saluran Komunikasi	Saluran untuk Berinteraksi (forum yang ada)
Bappeda	Kepala bidang sosial budaya	Komunikasi langsung	Surat (sebagai undangan)	Tatap muka (rapat)
		Komunikasi tidak langsung (tertulis)	Pesan singkat	Insidental
		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon (telepon genggam) <sup>37</sup>	Insidental
		Komunikasi tertulis	Laporan, surat resmi	
Sekretaris daerah	Asisten 1 bidang pemerintahan hukum	n.a.	n.a.	n.a.
DPRD	Ketua Komisi III DPRD	Komunikasi tertulis	Surat (sebagai undangan/ pemberitahuan)	Rapat
		Komunikasi langsung		Tatap muka formal (rapat), pertemuan informal
		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon (telepon genggam)	Insidental
		Komunikasi tertulis	Laporan, surat resmi	
		Komunikasi tidak langsung (tertulis)	Pesan singkat	

<sup>37</sup>Bappeda menggunakan telepon untuk meminta data dari instansi-instansi terkait. Data yang diperlukan akan dikirimkan melalui surel; data lebih sering diantarkan langsung ke Bappeda.

Matriks Komunikasi				
Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Jenis Media	Saluran Komunikasi	Saluran untuk Berinteraksi (forum yang ada)
Kepala sekolah	Kepala sekolah SD	Komunikasi langsung	Undangan lisan (melalui murid) Kegiatan rutin luar sekolah Pesan singkat (sebagai undangan/ pemberitahuan)	Rapat (dengan orang tua/guru) Pertemuan informal <sup>38</sup> Pertemuan MKKS Pertemuan K3S <sup>39</sup>
		Komunikasi tertulis	Laporan, surat resmi	Ke/dari Dinas Dikpora Ke orang tua
		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon (telepon genggam)	Insidental
		Komunikasi interpersonal	Lobi	Pertemuan dengan kepala Dinas Dikpora <sup>40</sup>
	Kepala sekolah SMP	Komunikasi lisan	-	Rapat berkala dengan guru-guru untuk kepentingan evaluasi
		Komunikasi tertulis	Surat, undangan, pemberitahuan	Rapat
		Komunikasi tidak langsung (tertulis)	Pesan singkat, surel <sup>41</sup>	
		Komunikasi tidak langsung (lisan)	Telepon (telepon genggam)	

<sup>38</sup>Setiap Sabtu ada pengajian yang dikelola oleh yayasan pondok pesantren yang menaungi SMPS Islam Tastura Az Zikra. Para orang tua murid SMP setiap Sabtu datang ke pengajian tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang tua murid untuk mencari tahu tentang perkembangan anak-anak mereka dan dimanfaatkan oleh para guru untuk berdiskusi dengan orang tua murid.

<sup>39</sup>Salah satu kepala SD yang diwawancarai adalah ketua K3S.

<sup>40</sup>Hanya ditemui pada satu kepala SDN sasaran karena ada hubungan pertemanan dengan kepala dinas terkait.

<sup>41</sup>Ada jaringan internet di dua SMP sampel. Namun, jaringan internet di SMPN B sudah rusak.

Matriks Komunikasi				
Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Jenis Media	Saluran Komunikasi	Saluran untuk Berinteraksi (forum yang ada)
Pengawas SD	Pengawas SD	Komunikasi langsung	Lisan	Tatap muka (kunjungan ke sekolah-sekolah <sup>42</sup> ), setiap hari sesama pengawas bertemu
		Komunikasi tertulis	Laporan, surat	Laporan kepada kepala dinas
		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon (telepon genggam)	Insidental
		Komunikasi tidak langsung (tertulis)	Pesan singkat (sebagai undangan/pemberitahuan)	Pertemuan dengan guru
Pengawas SMP	Pengawas SMP	Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	
		Komunikasi tidak langsung (tertulis)	Pesan singkat (sebagai undangan/pemberitahuan)	
		Komunikasi tertulis	Laporan	Laporan bulanan dan per semester hasil supervisi diserahkan langsung ke Dinas Dikpora
		Komunikasi langsung	Lisan	Pertemuan rutin para pengawas SMP <sup>43</sup>
		Komunikasi tidak langsung (media sosial)	Facebook	Grup Facebook Pemerhati Pendidikan Dompus

<sup>42</sup>Kunjungan dilakukan dua minggu sekali.

<sup>43</sup>Bertukar pengalaman dengan sesama pengawas setiap Jumat di Dinas Dikpora.

Matriks Komunikasi				
Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Jenis Media	Saluran Komunikasi	Saluran untuk Berinteraksi (forum yang ada)
Guru	Guru SD	Komunikasi langsung	Lisan	Tatap muka (rapat, KBM, pembagian rapor kenaikan kelas); lisan ke murid/orang tua/guru dari SD lain
		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	
		Komunikasi tidak langsung (lisan)	Pesan singkat (sebagai undangan/ pemberitahuan)	Pertemuan KKG (tidak rutin)
		Komunikasi tidak langsung (media sosial)	WhatsApp (hanya ditemui pada satu guru SD di salah satu SD lokasi studi, dan itu pun hanya untuk komunikasi yang tidak terkait dengan pekerjaan)	
Guru	Guru SMP	Komunikasi langsung	Lisan	Tatap muka (rapat, KBM, pembagian rapor kenaikan kelas); pertemuan informal dengan guru dari SMP lain <sup>44</sup>
		Komunikasi tidak langsung (lisan)	Pesan singkat (sebagai undangan/ pemberitahuan)	
		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon (telepon genggam)	Insidental
		Komunikasi tidak langsung (media sosial)	Grup WhatsApp <sup>45</sup>	Alumni pelatihan guru
Komite sekolah	Ketua komite sekolah	Komunikasi langsung	Lisan	Tatap muka (rapat, pertemuan informal)
		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon (telepon genggam)	Insidental

<sup>44</sup>Bertandang ke sekolah lain untuk mendapatkan informasi dan konsultasi tentang rencana pengajaran. Pertemuan ini merupakan konsekuensi tidak adanya MGMP.

<sup>45</sup>Yang memanfaatkan WhatsApp adalah guru-guru muda (sekitar di bawah 40 tahun).

Matriks Komunikasi				
Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Jenis Media	Saluran Komunikasi	Saluran untuk Berinteraksi (forum yang ada)
Murid	Murid SD	Komunikasi langsung	Lisan	Tatap muka (komunikasi dengan guru selama KBM dan komunikasi dengan murid lain selama belajar kelompok)
Murid	Murid SMP	Komunikasi tertulis	Pesan singkat	
		Komunikasi tidak langsung (media sosial)	Facebook <sup>46</sup>	
		Komunikasi langsung	Lisan	Tatap muka (komunikasi dengan guru selama KBM dan komunikasi dengan murid lain selama belajar kelompok)
		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon (telepon genggam)	Menghubungi sesama murid untuk membuat janji belajar kelompok
Kepala desa	Kepala desa	Komunikasi langsung	Lisan <sup>47</sup>	Tatap muka
		Komunikasi tertulis	Surat	Desa mengundang pihak sekolah untuk mengikuti musdes/musrembang; sekolah mengundang perangkat desa untuk mengikuti kegiatan di awal tahun ajaran baru
		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon (telepon genggam)	Insidental (dari sekolah ke desa ketika ada kejadian penting yang perlu melibatkan kepala desa)
		Komunikasi tidak langsung (tulisan)	Pesan singkat	Insidental

<sup>46</sup>Hanya ditemukan pada satu anak perempuan di tiap sekolah sampel dan tidak dipakai untuk tujuan pendidikan.

<sup>47</sup>Menerima informasi dari guru tentang anak yang tidak masuk sekolah. Kepala desa kemudian mendatangi rumah orang tua si anak.

Matriks Komunikasi				
Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Jenis Media	Saluran Komunikasi	Saluran untuk Berinteraksi (forum yang ada)
Orang tua	Orang tua murid SD & SMP	Komunikasi langsung	Lisan <sup>48</sup>	Tatap muka (pertemuan dengan guru saat kenaikan kelas, penerimaan beasiswa, dan saat awal tahun ajaran)
		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon (telepon genggam)	Insidental (orang tua menghubungi guru dan sebaliknya)
		Komunikasi tertulis	Surat	Kepala sekolah mengundang orang tua murid (menitipkan undangan kepada murid) untuk keperluan pencairan beasiswa dan acara khusus, misalnya bertemu dengan tim peneliti
Dewan Pendidikan	Ketua Dewan Pendidikan	Komunikasi langsung	Lisan (sebagai undangan/pemberitahuan)	Kunjungan sekolah, rapat
		Komunikasi tertulis	Surat resmi <sup>49</sup>	Pertemuan dengan Dinas Dikpora atau pemda
		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon (telepon genggam)	Insidental
		Komunikasi tidak langsung (lisan)	Pesan singkat	

<sup>48</sup>Anak-anak menyampaikan informasi dari sekolah kepada orang tua mereka secara lisan. Orang tua biasanya datang langsung kepada guru untuk memintakan izin tidak masuk/sakit anak mereka. Orang tua juga bisa menitipkan surat kepada murid lain atau kepada guru yang tinggal sedesa.

<sup>49</sup>Sebagai lembaga, Dewan Pendidikan tidak bersurat kepada anggotanya untuk kepentingan pertemuan. Biasanya, telepon dimanfaatkan untuk mengumpulkan anggota Dewan Pendidikan. Namun, Dewan Pendidikan menerima undangan dari pihak lain, contohnya bupati.

Matriks Komunikasi				
Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Jenis Media	Saluran Komunikasi	Saluran untuk Berinteraksi (forum yang ada)
PGRI	Ketua PGRI Kabupaten Dompu	Komunikasi langsung	Lisan	Konferensi tingkat daerah; pertemuan di pendopo dengan bupati; pertemuan informan dengan guru (yang bisa dilakukan kapan saja)
		Komunikasi tidak langsung (tertulis)	Pesan singkat <sup>50</sup>	Pertemuan rutin
		Komunikasi tidak langsung (lisan)	Telepon (telepon genggam)	Insidental
		Komunikasi tidak langsung (media sosial)	Grup WhatsApp <sup>51</sup>	-
LSM	Lensa NTB Dompu, World Relief, We Save	Komunikasi langsung	Lisan	Tatap muka (rapat, kunjungan ke penerima manfaat, dan kunjungan ke pemangku kepentingan, contohnya Dinas Dikpora)
		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon (telepon genggam)	Insidental
		Komunikasi tertulis	Pesan singkat	Insidental
		Komunikasi tidak langsung (media sosial)	WhatsApp dan Facebook	
		Komunikasi tidak langsung (media elektronik tulisan)	Surel	

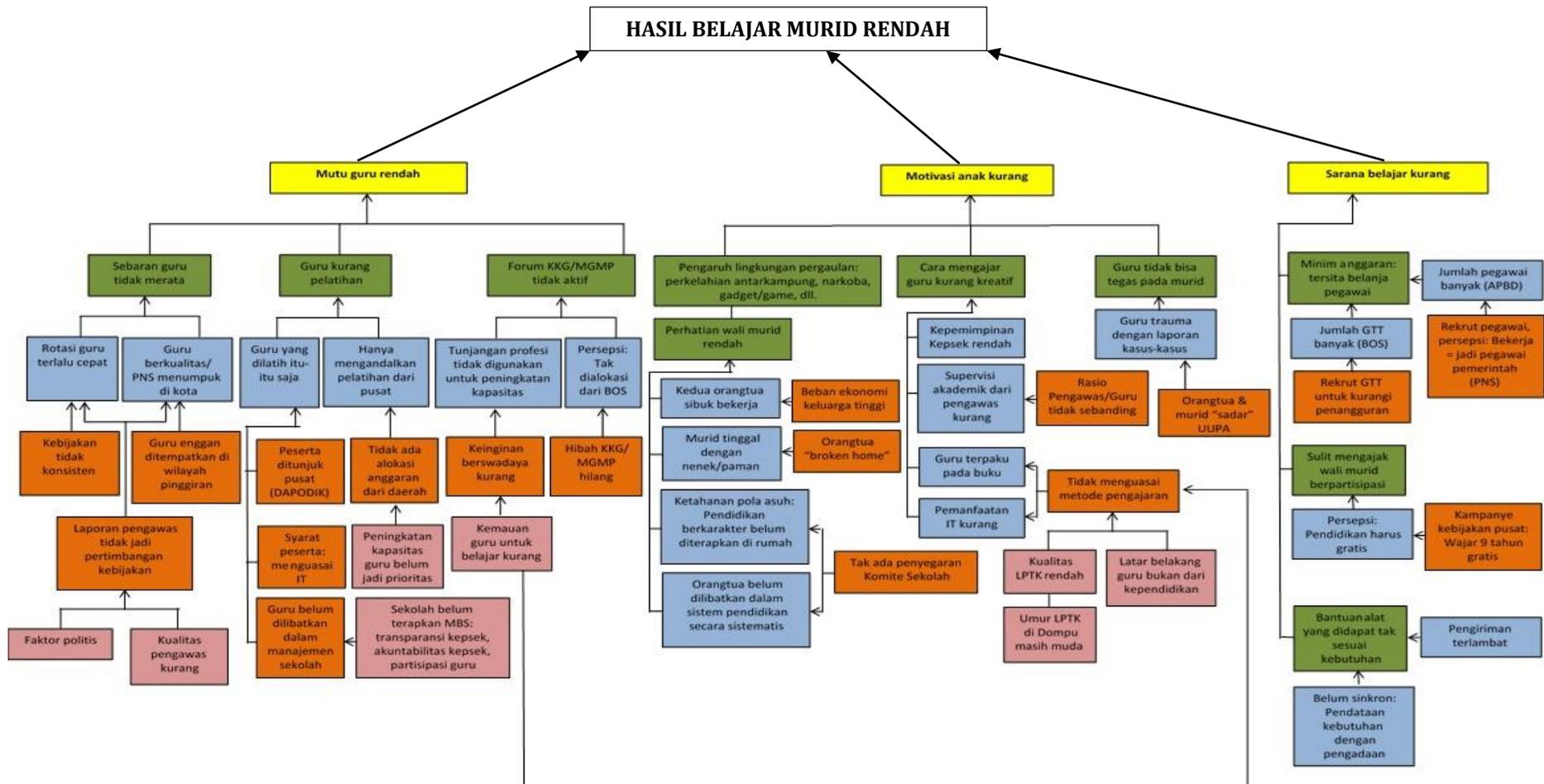
<sup>50</sup>Sebagai sarana diseminasi informasi dari PGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat.

<sup>51</sup>Saluran komunikasi ini digunakan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kepengurusan PGRI. Grup WhatsApp memiliki jalur dari tingkat provinsi hingga kabupaten. Ketua PGRI meneruskan informasi yang didapat dari grup WhatsApp melalui pesan singkat kepada pengurus tingkat kecamatan. Kemudian, pengurus tingkat kecamatan meneruskan pesan tersebut kepada para anggota.

Matriks Komunikasi				
Kelompok Pemangku Kepentingan	Informan	Jenis Media	Saluran Komunikasi	Saluran untuk Berinteraksi (forum yang ada)
UPT Pendidikan	Kepala UPTD Dikpora	Komunikasi tertulis	Laporan	Pengawas melaporkan tentang sekolah-sekolah
		Komunikasi tidak langsung (suara)	Telepon	Insidental
		Komunikasi tidak langsung (tertulis)	Pesan singkat (sebagai undangan/pemberitahuan)	Diundang oleh Dinas Dikpora atau pihak sekolah (bila mendadak)
		Komunikasi tertulis	Surat	Rapat koordinasi dengan Dinas Dikpora
		Komunikasi langsung	Lisan	Tatap muka dengan Dinas Dikpora, serta guru-guru dalam K3S dan KKG

## LAMPIRAN 8

Gambar A5. Analisis Pohon Masalah



## LAMPIRAN 9

Tabel A4. Analisis Penyelesaian Masalah Pendidikan

Upaya Pemecahan Masalah	Lembaga yang Berwenang	Dukungan yang Diperlukan	Kapasitas	
			Yang Tersedia	Yang Dibutuhkan
<b>Pemerataan guru dengan perjanjian jangka waktu penempatan</b>	Dinas Dikpora, Bupati, PGRI, DPRD	Surat edaran bupati	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kuantitas guru cukup</li> <li>✓ Reses DPRD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Data yang akurat</li> <li>– Pemanfaatan laporan pengawas sekolah</li> <li>– Dukungan organisasi guru</li> <li>– Reses DPRD yang mengagendakan topik alokasi dan dana guru</li> </ul>
<b>Berbagi pengalaman antarguru/kepala sekolah</b>	Dinas Dikpora, MKKS, MGMP, KKG, K3S	Peraturan kepala dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Guru sebagai instruktur nasional</li> <li>✓ Kepala sekolah yang inovatif</li> <li>✓ Pengawas sekolah yang sudah lama berkarir di bidang pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Alokasi dana</li> <li>– Penjadwalan yang berkala</li> <li>– Pembinaan setelah pelatihan</li> </ul>
<b>Meningkatkan kepedulian orang tua melalui kunjungan rumah</b>	Kepala sekolah, guru, komite sekolah, kepala desa	Komitmen dari pejabat yang lebih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kesiediaan lembaga-lembaga yang berwenang untuk meluangkan waktu dan tenaga untuk memotivasi orang tua</li> <li>✓ Lembaga-lembaga yang berwenang mengenal para orang tua</li> <li>✓ Pertemuan antara lembaga yang berwenang dengan orang tua</li> </ul>	Kemauan untuk mereplikasi
<b>Memisahkan anak-anak yang belum lancar membaca, menulis, dan berhitung</b>	Kepala sekolah, guru	SOP dan sistem evaluasi dari Dinas Dikpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keberadaan GTT di setiap sekolah sebagai guru kolaborasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Konsistensi Dinas Dikpora untuk menjalankan SOP dan sistem evaluasi</li> <li>– Laporan pengawas yang akurat</li> </ul>
<b>Memanfaatkan buku yang tersedia sebagai penunjang pemberian PR kepada murid</b>	Guru, kepala sekolah	Komitmen Dinas Dikpora untuk mendorong agar upaya tersebut lebih merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Buku inventaris yang dimiliki sekolah</li> <li>✓ Inisiatif guru</li> </ul>	Forum untuk menjalankan proses replikasi
<b>Pendidikan karakter melalui sopan santun</b>	Kepala sekolah dan guru-guru	Komitmen semua pihak termasuk siswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sudah diterapkan di sebagian sekolah</li> </ul>	Kemauan untuk membiasakan apa yang diajarkan pada pendidikan karakter sehingga menjadi budaya

## LAMPIRAN 10

Tabel A5. Daftar Inovasi Pendidikan

No.	Nama Kebijakan/ Inovasi	Sumber Kebijakan/ Inovasi	Sifat	Periode Pelaksanaan	Penggagas	Pelaksana	Cakupan	Dampak/Capaian
1	Murid bergantian berceramah di depan teman-temannya	Kepala sekolah	Interpretasi pendidikan karakter	2015–sekarang	Kepala sekolah	Murid didampingi guru	Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kemahiran berbicara di depan umum (<i>public speaking</i>)</li> <li>– Literasi bahasa Indonesia</li> </ul>
2	Satu jam bersama wali murid	Pengalaman sekolah-sekolah di luar negeri	Replikasi	2015–sekarang	Kepala sekolah SMPN 1 Woja	Guru	Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Inspirasi murid</li> <li>– Literasi bahasa Indonesia</li> <li>– Murid bangga pada orang tua</li> </ul>
3	Datang pungut, pulang pungut	Kepala sekolah	Interpretasi pendidikan karakter	Sudah lama	Kepala sekolah	Murid diawasi guru	Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Disiplin terbangun</li> <li>– Lingkungan bersih</li> </ul>
4	Kunjungan rumah	Kepala sekolah dan guru	Inovasi	Sudah lama	Kepala sekolah	Guru, kepala sekolah, komite sekolah, kepala desa	Sekolah dan lingkungan sekitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kesadaran orang tua meningkat</li> <li>– Anak kembali bersekolah</li> </ul>
5	Dekorasi kelas sebagai media pembelajaran	n.a.	Modifikasi	Juni 2016–sekarang	Kepala sekolah SDN B	Guru	Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Belum terlihat</li> </ul>
6	Ulangan dengan sistem buka buku ( <i>open book</i> )	Kepala sekolah SMPN 4 Manggalewa			Kepala sekolah SMPN 4 Manggalewa	Guru	Sekolah	Murid memahami isi pelajaran, bukan menghafalkan isi pelajaran
7	Seleksi penerimaan GTT	Kepala sekolah SMPN 1 Woja	Inovasi	2015–sekarang	Kepala sekolah	Pengawas pembina, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru senior	Sekolah	GTT berkualitas

No.	Nama Kebijakan/ Inovasi	Sumber Kebijakan/ Inovasi	Sifat	Periode Pelaksanaan	Penggagas	Pelaksana	Cakupan	Dampak/Capaian
8	Antar-jemput murid	Kepala sekolah SDN A (dan kemungkinan besar masih banyak lagi kepala sekolah yang menjalankan kebijakan ini)		Sudah lama		Kepala sekolah dan guru	Sekolah dan lingkungan sekitar sekolah	Tingkat kehadiran anak meningkat
9	Pendampingan calistung	Kepala Dinas Dikpora periode sebelumnya		Sudah lama	Kepala Dinas Dikpora	Guru	Sekolah	Murid lancar calistung
10	Pakta integritas antara kepala sekolah dan Dikpora tentang ketuntasan calistung	Dinas Dikpora		2008–2010	Dinas Dikpora	Kepala sekolah dan Guru	Kabupaten	Belum terukur karena tidak berlanjut
11	Kerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Mataram untuk pengiriman dan pembinaan bagi anak-anak berkelakuan khusus <sup>52, 53</sup>	Dinas Sosial Provinsi		Telah memasuki tahun ketiga. Setiap tahun dikirim 45 anak usia sekolah; kelas 4, 5, dan 6	Dinas Sosial Provinsi	Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Woja	Beberapa SD di Kecamatan Woja	Perilaku anak-anak menjadi lebih dewasa

<sup>52</sup>Inovasi ini tidak mendapatkan konfirmasi dari informan-informan kunci selain pemberi informasi, yakni Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Woja. Info tentang inovasi ini juga tidak muncul dari Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Woja yang hadir dalam FGD.

<sup>53</sup>Kemungkinan besar bahwa yang dimaksud dengan tempat pembinaan/petirahan adalah Rumah Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak Putra Utama Mataram (<http://sosdukcapil.ntbprov.go.id/uptd/uptd-rumah-perlindungan-dan-petirahan-sosial-anak-putra-utama-mataram/>).

## LAMPIRAN 11

Tabel A6. Daftar Data Sekunder Kabupaten Dompu

No.	Jenis Dokumen	Ketersediaan Data		
		Ada/ Tidak Ada	Penjelasan Ketersediaan Data	Keterangan
1	Kontak (lembaga/ individu) lain yang memengaruhi pembelajaran	Ada	Lihat Lampiran 3	
2	Data 2005–2016:			
	a. Regulasi/kebijakan pendidikan (dokumen sidang terbentuknya suatu peraturan daerah, rapat DPRD, dan pemda, dll.)	Tidak Ada		
	b. Daftar program/proyek/kegiatan dan laporan pelaksanaannya	Ada	Rencana Strategis Dinas Dikpora Kabupaten Dompu Tahun 2011–2015	salinan cetak
	c. RPJMD dan Renstra Pendidikan	Tidak Ada		
	d. Profil Pendidikan	Ada	1. Buku Profil Pendidikan Kabupaten DOMPU Tahun 2013/2014 2. Buku Profil Pendidikan Kabupaten DOMPU Tahun 2014/2015	salinan cetak
	b. Rencana Kerja (tahunan) SKPD	Ada	1. RENJA 2015 Dinas Dikpora Kabupaten Dompu 2. RENJA DISDIKPORA 2016 Kabupaten Dompu	salinan digital
	c. Laporan tahunan Dinas Pendidikan	Tidak ada		
	d. Statistik pendidikan:	Ada	1. Statistik 2013–2014 ACC-Dinas Dikpora Kabupaten Dompu 2. Statistik 2014–2015-Copy- Dinas Dikpora Kabupaten Dompu	salinan digital
	i. jumlah, karakteristik, dan sebaran sekolah			
	ii. jumlah, karakteristik, dan sebaran guru			
	iii. rasio guru-murid			
	iv. Angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM)			
	e. Nilai rata-rata ujian nasional sekolah dasar (tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten)	Ada	Laporan Hasil Sub Rayon Ujian Sekolah/Madrasah Jenjang SD/MI Tahun Pelajaran 2015/2016 (distribusi nilai siswa untuk delapan kecamatan dan distribusi nilai siswa untuk Kabupaten Dompu)	salinan cetak
	f. Nilai rata-rata ujian nasional sekolah menengah (tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten)	Tidak ada		
	g. Tingkat kelulusan ujian nasional (tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten)	Tidak ada		
	h. Hasil uji kompetensi guru tingkat kabupaten (untuk verifikasi)	Ada	Data terdapat pada Neraca Pendidikan Kabupaten Dompu 2015	salinan digital
	i. Data hasil ujian akhir sekolah di sekolah sampel	Tidak ada		

No.	Jenis Dokumen	Ketersediaan Data		
		Ada/ Tidak Ada	Penjelasan Ketersediaan Data	Keterangan
3	Data dan dokumen terkait anggaran 2015–2016			
	a. Perda APBD 2016	Tidak ada		
	b. Perda APBD Perubahan 2015	Tidak ada		
	c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015	Tidak ada		
	d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perubahan (DPA-P) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Ada	1. Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Tahun Anggaran 2015 2. Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Satuan kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Nomor 900/01.DPA/DPPKAD/2016 Tahun Anggaran 2015	salinan cetak
	e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan 2016	Tidak ada		
	f. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendidikan 2015	Ada	Realisasi Anggaran Pendidikan Kabupaten Dompu 2015	salinan digital
	g. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015	Ada	Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dompu Tahun 2016	salinan cetak
4	Data lain yang tersedia:			
	a. Dompu Dalam Angka	Ada	Dompu Dalam Angka 2016	salinan digital
	b. RPJMD Tahun 2016–2021 Kabupaten Dompu	Ada	Rancangan RPJMD Kabupaten DOMPU Tahun 2016–2021	salinan cetak
	c. Profil sekolah	Ada	Profil Sekolah SDN A Tahun Pelajaran 2015/2016	salinan digital
	d. Neraca pendidikan	Ada	Neraca Pendidikan Kabupaten Dompu 2015	salinan cetak

## LAMPIRAN 12

**Tabel A7. Diagram Proses Pemetaan Pemangku Kepentingan dalam Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat**

Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
1. Tahap persiapan	Merancang penelitian: mencari metode yang tepat untuk menjawab tujuan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengacu pada ToR</li> <li>- Pemilihan nama sekolah tepat waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunggu kepastian sekolah sampel dari Program INOVASI</li> <li>- Menerjemahkan ToR ke dalam rancangan penelitian sehingga diperoleh metode pengumpulan dan analisis data yang tepat</li> <li>- Memilih pendekatan analisis yang paling tepat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan komunikasi secara intensif dengan INOVASI</li> <li>- Melakukan rapat-rapat dengan semua anggota tim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar dan peta lokasi sekolah sampel</li> <li>- Tujuan penelitian disekapati</li> <li>- Metode pengumpulan data: wawancara mendalam, wawancara kelompok, dan FGD.</li> <li>- Metode analisis data: matriks</li> </ul>
	Menyusun instrumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan penelitian yang jelas sudah dirumuskan</li> <li>- Metode penelitian (pengumpulan dan analisis data sudah disetujui bersama)</li> <li>- Pembagian tugas di antara anggota tim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyamakan pemahaman tentang definisi kunci, misalnya hasil pembelajaran, kualitas, tolok ukur dsb.</li> <li>- Menyesuaikan pertanyaan atau data yang ingin digali dengan waktu yang tersedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draf awal instrumen yang sudah dibuat oleh anggota tim didiskusikan kembali dalam rapat tim</li> <li>- Masing-masing anggota kembali memperbaiki instrumen berdasarkan hasil diskusi tim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draf instrumen yang siap digunakan untuk pelatihan dan uji coba</li> </ul>
	Merekrut peneliti tamu dan peneliti regional (RR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapatkan peneliti tamu dan RR yang mendalami isu pendidikan</li> <li>- Mendapatkan peneliti tamu dan RR yang sudah pernah bekerja sama dengan SMERU</li> <li>- Mendapatkan RR yang memahami situasi NTB, lebih baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu perekrutan sangat terbatas</li> <li>- Mendapatkan peneliti tamu dan RR yang berkualitas dan tidak sedang terikat kontrak dengan lembaga lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meminta referensi dari para peneliti SMERU yang pernah merekrut RR dari NTB</li> <li>- Merekrut peneliti tamu yang sudah memahami cara kerja SMERU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peneliti tamu dan RR yang direkrut mampu memahami isu penelitian dan aktif menjalin komunikasi dengan informan kunci sebelum penelitian dilakukan sehingga kegiatan</li> </ul>

Tahap	Langkah-Langkah yang Diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi terhadap Tantangan	Hasil
		lagi jika memahami situasi keenam lokasi pengambilan data			pengambilan data berjalan lancar
	Pelatihan dan uji coba instrumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi dan jadwal uji coba harus ditetapkan sejak awal</li> <li>- Izin kunjungan sudah diterima dari pihak berwenang di lokasi uji coba</li> <li>- Mendapat daftar pemangku kepentingan dan nomor kontakannya</li> <li>- Penyiapan logistik yang relevan dengan kebutuhan: pengumpulan data, transportasi, dan komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan waktu pelaksanaan yang dapat dihadiri oleh semua anggota tim</li> <li>- Sebagian pemangku kepentingan yang dihubungi menginginkan pemberitahuan lebih awal</li> <li>- Sebagian pemangku kepentingan tidak merespons permohonan uji coba instrumen</li> <li>- Waktu untuk mengontak pemangku kepentingan yang dilibatkan terlalu singkat</li> <li>- Tantangan selama uji coba di lapangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Instrumen terlalu panjang sehingga memakan waktu lama untuk wawancara (khususnya wawancara mendalam)</li> <li>o Pemangku kepentingan banyak yang mengaitkan peningkatan pembelajaran dengan peningkatan karakter/akhlak murid</li> <li>o Informan wawancara kelompok rata-rata sangat aktif; sekolah yang dipilih merupakan sekolah unggulan</li> <li>o Pengisian instrumen analisis masih membingungkan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim melakukan rapat untuk menyepakati lokasi dan jadwal uji coba</li> <li>- Mengirimkan anggota tim ke lokasi uji coba untuk menemui informan-informan kunci, menyepakati jadwal dan sekolah yang dijadikan uji coba</li> <li>- Diskusi bersama semua anggota tim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi uji coba: Purwakarta</li> <li>- Tim berhasil menyepakati jadwal dengan Dikpora Kabupaten Purwakarta; pihak Dinas Dikpora bersedia mengontak dan mengatur jadwal wawancara mendalam dan wawancara kelompok dengan informan yang dibutuhkan</li> <li>- Perbaikan instrumen pengumpulan data: mempertajam yang kurang jelas dan mengurangi pertanyaan ganda</li> <li>- Perbaikan instrumen analisis dengan memberi keterangan sumber isian pada setiap kolomnya (berdasarkan jawaban dari setiap nomor pertanyaan)</li> </ul>

Tahap	Langkah-langkah yang diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi Terhadap Tantangan	Hasil
2. Tahapan pengumpulan data di Kabupaten Dompu	Merekrut peneliti tamu untuk menggantikan peneliti SMERU yang berhalangan turun lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapatkan peneliti tamu yang berkualitas dan mampu memahami inti penelitian INOVASI dengan cepat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu perekrutan sangat pendek sehingga peneliti tamu pengganti tidak mendapatkan induksi khusus seperti yang diperoleh peneliti tamu dan peneliti regional untuk tim kabupaten lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskusi harian dilakukan beberapa hari sebelum kegiatan lapangan dan sepanjang pengumpulan data dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peneliti tamu pengganti mampu memahami isu penelitian dan menghasilkan data catatan lapangan yang lengkap</li> </ul>
	Menyusun daftar pemangku kepentingan dan nomor kontak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan daftar hadir peserta sosialisasi program INOVASI di tingkat provinsi sebagai basis awal informasi kontak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak semua informan yang dibutuhkan ada dalam daftar hadir yang tersedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode <i>snowballing</i> untuk mendapatkan informasi kontak pemangku kepentingan yang lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar kontak pemangku kepentingan dapat dilengkapi</li> </ul>
	Mengontak informan kunci ( <i>gate keeper</i> ) dan menjadwalkan wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RR dan peneliti tamu mengontak informan kunci untuk meminta kesediaan dan jadwal wawancara sebelum tim turun ke lapangan</li> <li>- Peneliti datang langsung ke sekolah untuk menjelaskan kebutuhan wawancara di sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa informan tidak menjawab ketika dikontak</li> <li>- Beberapa informan sedang berada di luar lokasi studi dalam waktu yang lama (tugas luar kota, kunjungan, pelatihan, dll.).</li> <li>- Ada kepala sekolah yang tampak menghindari untuk ditemui hingga beberapa kali meminta jadwal kunjungan ke sekolah diubah</li> <li>- Ada kepala sekolah yang langsung mengeluhkan banyak hal terkait kebutuhan sekolah ketika dikontak oleh RR</li> <li>- Sebagian besar informan disibukkan dengan persiapan (dan) peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-71</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terus mengontak informan selama proses di lapangan</li> <li>- Langsung mendatangi informan ke rumah dan/atau kantornya (<i>go show</i>)</li> <li>- Meminta nama informan pengganti yang bisa diwawancarai (untuk informan utama yang tidak bisa diwawancarai)</li> <li>- Menyesuaikan jadwal wawancara dengan jadwal sekolah dan informan yang sibuk dengan persiapan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-71</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jadwal wawancara dengan setiap informan berhasil disepakati</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara khusus perwakilan tim peneliti menemui kepala Dinas Dikpora untuk menjelaskan tujuan penelitian dan kebutuhan tim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas Dikpora beranggapan bahwa data merupakan hal yang sangat sensitif untuk diberikan kepada tim peneliti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan penjelasan terperinci kepada kepala Dinas Dikpora tentang pemanfaatan data semata-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan</li> </ul>

Tahap	Langkah-langkah yang diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi Terhadap Tantangan	Hasil
		peneliti akan dukungan Dinas Dikpora termasuk dalam hal data		mata untuk tujuan penelitian - Meminta informan kunci yang telah mengikuti peluncuran Program INOVASI di Mataram untuk turut menjelaskan tujuan penelitian kepada kepala Dinas Dikpora	
	Melakukan wawancara (wawancara kelompok dan wawancara mendalam)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jadwal wawancara yang disepakati dengan setiap informan</li> <li>- Informan mengisi <i>informed consent</i></li> <li>- Tim melakukan evaluasi harian untuk menghitung jadwal lapangan yang tersedia dengan jumlah wawancara yang harus dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Syarat wawancara: minimal harus dilakukan dua orang per informan/ kelompok informan</li> <li>- Masih ditemukan pertanyaan yang senada dalam instrumen</li> <li>- Ada informan kunci dengan posisi penting yang sulit ditemui</li> <li>- Setelah mengalami turun lapangan pertama, ditemukan banyak bagian pedoman wawancara kelompok murid, guru, dan orang tua yang kurang bunyi sehingga informasi yang diperoleh tidak begitu kaya; pedoman wawancara kelompok murid, guru, dan orang tua belum sepenuhnya ditinjau untuk disesuaikan dengan situasi riil di lapangan</li> <li>- Informan ingin tahu mengapa mereka harus mengisi <i>informed consent</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanyaan yang senada tidak lagi ditanyakan</li> <li>- Membuat janji baru untuk melakukan wawancara lanjutan sesuai dengan kesediaan waktu informan</li> <li>- Mewawancarai perwakilan informan kunci dengan posisi penting tersebut</li> <li>- Meyakinkan informan akan arti penting <i>informed consent</i>, yakni untuk melindungi identitas informan (dirahasiakan)</li> <li>- Menjelaskan kepada para informan bahwa rekaman, catatan peneliti, dan foto merupakan bagian dari upaya peneliti mengumpulkan bahan penyusunan laporan</li> </ul>	Semua informan berhasil diwawancarai
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Idealnya, setelah mendapatkan informasi tentang inovasi di tingkat kabupaten dan kecamatan, tim peneliti melakukan <i>crosscheck</i> dengan sekolah mengenai apakah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim peneliti menyesuaikan jadwal dengan sekolah karena kesibukan sekolah mempersiapkan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-71. Akibatnya, tim peneliti belum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim peneliti melakukan diskusi harian untuk memastikan tidak ada informasi tentang inovasi pendidikan yang tercecer</li> </ul>	Inovasi pendidikan terdata oleh peneliti

Tahap	Langkah-langkah yang diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi Terhadap Tantangan	Hasil
		inovasi-inovasi dari kabupaten dan kecamatan berjalan juga di sekolah	mendapatkan data tentang inovasi di tingkat kabupaten dan kecamatan untuk di- <i>cross-check</i> dengan pihak sekolah	- Menggunakan FGD sebagai sarana triangulasi untuk informasi mengenai inovasi pendidikan	
		- Mendapatkan informasi tentang situasi dan inovasi pendidikan dari pihak Dinas Dikpora yang bertanggung jawab atas pendidikan dasar (untuk SD) dan pendidikan menengah (untuk SMP)	- Karena para kabid dikdas dan dikmen tidak dapat ditemui oleh tim peneliti, tim peneliti mewawancarai kasi peningkatan mutu dikdas dan kasi peningkatan mutu dikmen; namun, dua orang tersebut bukanlah pembuat kebijakan meskipun informasi mereka cukup komprehensif	- Setelah kembali menghubungi dan mendatangi kantor Dinas Dikpora, tim peneliti dapat mewawancarai kabid dikmen (di kantornya) dan kabid dikdas (di rumahnya); hal ini dilakukan oleh peneliti karena ada informasi yang belum lengkap yang diperlukan dari kedua kepala bidang sebagai pengambil kebijakan	Informasi yang cukup komprehensif diperoleh tim peneliti
	Menyelenggarakan FGD	- Tidak ada usulan peserta dari Dinas Dikpora sehingga tim peneliti menetapkan peserta berdasarkan kesepakatan tim - Sesuai dengan saran para kasi peningkatan mutu bidang dikdas dan dikmen, FGD dilakukan pada Jumat 19 Agustus 2016 (siang-sore) - Tim menyiapkan bahan untuk dipresentasikan yang mencakup: o Analisis pohon masalah o Analisis penyelesaian masalah o Analisis pengaruh/ketertarikan pemangku kepentingan o Jejaring pemangku kepentingan	- Jadwal FGD berdekatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-71 - Kabid dikdas dan kabid dikmen tidak datang ke FGD - Kabid dikmen tidak mewakilkan kehadirannya ke anak buahnya - Kabid dikdas (seperti yang selalu dilakukan) mewakilkan kehadirannya kepada kasi peningkatan mutu - Dari 17 orang yang diundang, 14 datang ke FGD - Kegiatan FGD bersamaan dengan jamuan yang diselenggarakan Bupati	- Dukungan dari Dinas Dikpora berupa kepala dinas menandatangani undangan FGD - Kasi peningkatan mutu dikdas menjadi penghubung tim peneliti ke pegawai dinas yang bertugas memintakan tanda tangan kepala dinas - Tim peneliti aktif menghubungi informan yang diundang sebagai peserta FGD - Tim peneliti memutuskan untuk mengundang kepala sekolah dan kepala desa	- FGD selesai menjelang maghrib - FGD menyepakati: o Analisis pohon masalah o Analisis penyelesaian masalah o Analisis pengaruh/ketertarikan pemangku kepentingan o Jaringan pemangku kepentingan o Kebijakan/inovasi yang dijalankan di kabupaten

Tahap	Langkah-langkah yang diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi Terhadap Tantangan	Hasil
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kebijakan/inovasi yang dijalankan di kabupaten</li> <li>- Peserta memaparkan kondisi aktual hasil pembelajaran murid, penyelesaian masalah, kondisi pengaruh/ketertarikan, jaringan pemangku kepentingan, dan kebijakan/inovasi yang dijalankan</li> </ul>	Dompu bagi para calon jemaah haji; dampaknya adalah para peserta (hampir separuhnya) melewati hotel saat melihat keramaian yang ada karena berpikir FGD dibatalkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sebagai bagian dari pemangku kepentingan</li> <li>- RR pun mengontak para peserta untuk menginformasikan bahwa FGD tetap berjalan sesuai jadwal; beberapa peserta tidak hadir mungkin karena tim peneliti tidak melakukan konfirmasi ulang</li> </ul>	Catatan penting: pada undangan FGD, seharusnya dicantumkan nama dan nomor kontak tim peneliti supaya penerima undangan dapat menghubungi tim peneliti untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang penyelenggaraan FGD
	Mengumpulkan data sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada daftar data yang dibutuhkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala dinas tidak mempercayakan data Dinas Dikpora kepada peneliti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim peneliti menjelaskan kepada kepala Dinas Dikpora tentang pentingnya data sekunder bagi tim peneliti dan bahwa tim peneliti tidak akan menyalahgunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Dikpora</li> </ul>	Sebagian besar data sekunder dapat terkumpul
3. Tahapan analisis data	Entri data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan lapangan sebagai data mentah</li> <li>- Tabel entri data sudah tersedia</li> <li>- Transkrip verbatim rekaman wawancara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak semua informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan wawancara kelompok dapat dimasukkan ke dalam matriks analisis; hal ini terutama pada wawancara kelompok orang tua murid dan wawancara kelompok murid yang memiliki judul berbeda dari wawancara mendalam dan wawancara kelompok guru; dari wawancara kelompok guru pun, hanya sedikit informasi yang dapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinator lapangan bertugas sebagai koordinator entri data</li> <li>- Koordinator lapangan menyelesaikan entri data untuk kelompok murid, orang tua murid, dan guru dengan tidak sepenuhnya menggunakan matriks analisis</li> <li>- Transkrip verbatim dialihdayakan dan anggota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entri data sebagian besar diselesaikan di Dompu</li> <li>- Transkrip verbatim dikumpulkan secara bertahap</li> </ul>

Tahap	Langkah-langkah yang diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi Terhadap Tantangan	Hasil
			<p>dimasukkan ke dalam matriks analisis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap malam selama di lapangan, tim peneliti mengisi matriks analisis di sela-sela diskusi tentang perkembangan harian tim</li> <li>- Catatan lapangan tidak bisa diselesaikan saat proses di lapangan karena sedikitnya waktu yang tersedia dan karena tim peneliti memfokuskan diri pada analisis terhadap temuan harian</li> <li>- Transkrip verbatim memerlukan sumber daya yang banyak dan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya; kualitas transkrip tidak sama karena banyaknya sumber daya; kualitas transkrip, khususnya wawancara kelompok dan FGD, juga sulit dijaga karena rekaman sangat riuh oleh suara dari luar</li> <li>- Analisis awal terhadap temuan dilakukan selama di lapangan; hal ini dilakukan tidak saja dalam rangka mempersiapkan FGD dan diagram-diagram pemetaan pemangku kepentingan, tetapi juga dalam rangka mempersiapkan laporan kabupaten</li> </ul>	<p>tim tersebar di berbagai provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada peneliti yang bertugas sebagai koordinator transkrip verbatim</li> </ul>	
	Analisis	- Entri data selesai dilakukan	- Jadwal yang singkat untuk mengirimkan laporan kabupaten	- Proses analisis untuk laporan kabupaten dilakukan dengan diskusi tim berdasarkan catatan buku dan matriks analisis yang telah dilengkapi	- Hal-hal penting untuk setiap topik laporan disepakati

Tahap	Langkah-langkah yang diambil	Prasyarat	Tantangan	Antisipasi Terhadap Tantangan	Hasil
	Penyusunan laporan kabupaten dan sintesis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh data selesai dianalisis</li> <li>- Kerangka laporan tersedia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jadwal yang singkat untuk mengirimkan laporan kabupaten</li> <li>- Banyaknya lampiran yang menyertai laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembagian tugas di antara anggota tim untuk membuat laporan kabupaten</li> <li>- Koordinator lapangan bertugas penuh atas finalisasi laporan karena anggota tim mendapat tanggung jawab menyelesaikan laporan kabupaten lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan kabupaten beserta lampirannya dikirim sesuai jadwal</li> </ul>
Tahap refleksi atau <i>lessons learned</i>	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya sesi refleksi bagi tim peneliti</li> </ul>	n.a.	n.a.	n.a.

## The SMERU Research Institute

Telepon : +62 21 3193 6336

Faksimili : +62 21 3193 0850

Surel : smeru@smeru.or.id

Situs web : www.smeru.or.id

Facebook : @SMERUInstitute

Twitter : @SMERUInstitute

YouTube : The SMERU Research Institute

